D. PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	35111	Pembangkitan Tenaga Listrik	Seluruh, selain Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru dan Terbarukan yang terintegrasi dengan SPKLU	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Studi Kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik, dengan ketentuan dokumen (berbahasa Indonesia) berisi: a. Kajian kelayakan finansial b. Kajian kelayakan operasional c. Studi interkoneksi jaringan d. Lokasi instalasi	14 Hari	1. Instalasi yang akan dioperasikan wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi 2. Pengoperasian dilakukan oleh Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi 3. Peralatan yang digunakan memenuhi Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan	- Penyimpanan mineral Ikutan Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama - Persetujuan Studi Kelayakan / *Feasibility Study* (FS) Proyek PLTP	1. Dilakukan oleh BUMN 2. Usaha penyediaan tenaga Listrik terintegrasi yang memiliki wilayah usaha 3. Fasilitas instalasinya lintas provinsi 4. Usaha jual beli listrik lintas negara dan/atau	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							e. Diagram satu garis f. Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan g. Jadwal pembangunan dan h. Jadwal pengoperasian yang disusun oleh Badan Usaha yang tersertifikasi 2. Kesepakatan jual beli tenaga listrik antara pemohon		Wajib 4. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala kepada Direktur Jenderal. 5. Rekomendasi Persetujuan dan penandasahan Rencana Impor Barang dalam hal Badan Usaha melakukan impor barang modal untuk mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk.		5. Menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.D.3

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dengan calon pembeli tenaga listrik (PJBL beserta amandemen-nya), dengan harga jual tenaga listrik dalam PJBL yang: a. Sesuai dengan ketentuan harga jual tenaga listrik atau 3. Harga jual tenaga listrik dalam PJBL telah mendapatkan persetujuan harga jual tenaga listrik				1. Memiliki wilayah usaha namun tidak termasuk usaha pembang-kitan tenaga listrik 2. Memiliki fasilitas instalasi dalam provinsi 3. Menjual tenaga listrik dan/atau menyewa-kan jari-ngan tenaga	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dari Menteri/ Gubernur sesuai dengan kewenangan-nya dalam menetapkan perizinan berusaha				listrik kepada pemegang perizinan berusaha penyedia-an tenaga listrik untuk kepenting an umum yang dite-tapkan oleh Pe-merintah Daerah Provinsi	
			Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru dan Terbaru-	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Jenis pembangkit yang digunakan merupakan Pembangkit	- Perse-tujuan Kajian Kela-yakan	1. Dilakukan oleh BUMN 2. Usaha penyedia-an tenaga	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			kan yang terintegrasi dengan SPKLU						Energi Baru dan Terbarukan, 2. Instalasi yang akan dioperasikan wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi 3. Pengoperasian dilakukan oleh Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi 4. Peralatan yang digunakan memenuhi Standar Nasional Indonesia yang	Teknis, Ekonomis dan Lingkungan Kegiatan Usaha Panas Bumi - Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif sebagai Penun-	Listrik terintegrasi yang memiliki wilayah usaha 3. Fasilitas instalasinya lintas provinsi 4. Usaha jual beli listrik lintas negara dan/atau 5. Menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									diberlakukan Wajib 5. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala kepada Direktur Jenderal 6. Berkomitmen melengkapi dokumen sebagai berikut: a. Studi Kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik, dengan ketentuan dokumen (berbahasa	jang Kegia-tan Utama	tenaga listrik kepada pemegang perizinan berusaha penyedia-an tenaga listrik untuk umum yang ditetap-kan oleh Pemerin-tah Pusat	
											1. Memiliki wilayah usaha namun tidak termasuk usaha	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Indonesia) berisi: 1) Kajian kelayakan finansial 2) Kajian kelayakan operasional 3) Studi interkoneksi jaringan 4) Lokasi instalasi 5) Diagram satu garis 6) Jenis		pembangkitan tenaga listrik 2. Memiliki fasilitas instalasi dalam provinsi 3. Menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang perizinan berusaha penyedia-	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dan kapasitas usaha yang akan dilakukan 7) Jadwal pembangunan dan 8) Jadwal pengoperasian yang disusun oleh badan usaha yang tersertifikasi b. Penetapan Wilayah		an tenaga listrik untuk kepentingan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang ditetapkan oleh Menteri c. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik d. Melakukan permohon-an per-panjangan perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik sesuai			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									masa berlaku perizinan berusaha, maksimal 30 tahun			
2	35112	Transmisi Tenaga Listrik	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Studi Kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik, dengan ketentuan dokumen (berbahasa Indonesia) berisi: a. Kajian kelayakan finansial b. Kajian kelayakan operasional	14 Hari	1. Instalasi yang akan dioperasikan wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi 2. Pengoperasian dilakukan oleh Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi 3. Peralatan yang digunakan memenuhi	-	1. Dilakukan oleh BUMN 2. Usaha penyediaan tenaga Listrik terintegrasi yang memiliki wilayah usaha 3. Fasilitas instalasinya lintas provinsi 4. Usaha jual beli	Menteri Kepala/ Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Studi interkoneksi jaringan d. Lokasi instalasi e. Diagram satu garis f. Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan g. Jadwal pembangunan dan h. Jadwal pengoperasian yang disusun oleh badan usaha yang tersertifikasi		Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan Wajib 4. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala kepada Direktur Jenderal 5. Melakukan permohonan perpanjangan perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik sesuai masa berlaku perizinan		listrik lintas negara dan/atau 5. Menjual tenaga listrik dan/ atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk umum yang ditetapkan oleh	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Kesepakatan sewa jaringan tenaga listrik antara pemohon dengan calon penyewa jaringan tenaga listrik dengan harga sewa jaringan tenaga listrik: a. Sesuai dengan ketentuan harga sewa jaringan tenaga listrik atau b. Telah mendapatkan persetujuan harga sewa jaringan		berusaha, maksimal 30 tahun		Pemerintah Pusat 1. Memiliki wilayah usaha namun tidak termasuk usaha pembangkitan tenaga listrik 2. Memiliki fasilitas instalasi dalam provinsi 3. Menjual tenaga listrik dan/atau menyewa-	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tenaga listrik dari Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenang-annya				kan jaringan tenaga listrik kepada Pemegang perizinan berusaha penyedia-an tenaga listrik untuk ke-pentingan umum yang ditetap-kan oleh Pemerin-tah Daerah Provinsi.	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.D.14

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3	35113	Distri-busi Tenaga Listrik	Seluruh	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Studi Kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik, dengan ketentuan dokumen (berbahasa Indonesia) berisi: a. Kajian kelayakan finansial b. Kajian kelayakan operasional c. Studi interkonek-si jaringan d. Lokasi instalasi e. Diagram satu garis	14 Hari	1. Instalasi yang akan dioperasikan wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi 2. Pengoperasian dilakukan oleh Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi 3. Peralatan yang digunakan memenuhi Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan Wajib	-	1. Dilakukan oleh BUMN 2. Usaha pe-nyediaan tenaga Listrik ter-integrasi yang memiliki wilayah usaha 3. Fasilitas instalasi-nya lintas provinsi 4. Usaha jual beli listrik lintas negara dan/atau 5. Menjual tenaga	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							f. Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan g. Jadwal pembangunan dan h. Jadwal pengoperasian yang disusun oleh Badan Usaha yang tersertifikasi 2. Kesepakatan sewa jaringan tenaga listrik antara pemohon dengan calon penyewa jaringan		4. Melaporkan Kegiatan Usaha secara berkala kepada Direktur Jenderal. 5. Melakukan permohonan perpanjangan perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik sesuai masa berlaku perizinan berusaha, maksimal 30 tahun.		listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	
											1. Memiliki wilayah	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tenaga listrik dengan harga sewa jaringan tenaga listrik: a. Sesuai dengan ketentuan harga sewa jaringan tenaga listrik atau b. Telah mendapatkan persetujuan harga sewa jaringan tenaga listrik dari Menteri atau Gubernur sesuai dengan				usaha namun tidak termasuk usaha pembangkitan tenaga listrik 2. Memiliki fasilitas instalasi dalam provinsi 3. Menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kewenang-annya 3. Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang ditetapkan oleh Menteri 4. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik				Pemegang perizinan berusaha penyedia-an tenaga listrik untuk ke-pentingan umum yang di-tetapkan oleh Pe-merintah Daerah Provinsi.	
4	35114	Pen-jualan Tenaga Listrik	Seluruh, selain Izin Usaha Penyedia-an Tenaga Listrik untuk Ke-pentingan	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Studi Kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik, dengan ketentuan dokumen	14 Hari	1. Instalasi yang akan dioperasikan wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi 2. Pengoperasian dilakukan	-	1. Dilakukan oleh BUMN 2. Usaha pe-nyediaan tenaga Listrik ter-integrasi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Umum Penjualan Tenaga Listrik SPKLU				(berbahasa Indonesia) berisi: a. Kajian kelayakan finansial b. Kajian kelayakan operasio-nal c. Studi in-terkoneksi jaringan d. Lokasi instalasi e. Diagram satu garis f. Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan g. Jadwal pem-bangunan		oleh Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi 3. Peralatan yang digunakan memenuhi Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan Wajib 4. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala kepada Direktur Jenderal 5. Melakukan		yang memiliki wilayah usaha 3. Fasilitas instalasi-nya lintas Provinsi 4. Usaha jual beli listrik lintas negara dan/atau 5. Menjual tenaga listrik dan/atau menyewa-kan jaringan tenaga listrik kepada	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan h. Jadwal peng-operasian yang disusun oleh badan usaha yang ter-sertifikasi 2. Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang ditetapkan oleh Menteri 3. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik		permohonan perpanjangan perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik sesuai masa berlaku perizinan berusaha, maksimal 30 tahun		pemegang perizinan berusaha penyedia-an tenaga listrik untuk umum yang di-tetapkan oleh Pe-merintah Pusat	
											1. Memiliki wilayah usaha namun tidak termasuk usaha pembang-kitan tenaga listrik	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											2. Memiliki fasilitas instalasi dalam provinsi dan 3. Menjual tenaga listrik dan/ atau menyewa kan jaringan tenaga listrik kepada Pemegang perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	
			Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum Penjualan Tenaga Listrik SPKLU	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Instalasi yang akan dioperasikan wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi 2. Pengoperasian dilakukan oleh Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi 3. Peralatan yang digunakan	Registrasi Nomor Identitas Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									memenuhi Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan Wajib 4. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala kepada Direktur Jenderal 5. Berkomitmen melengkapi dokumen sebagai berikut: a. Studi Kelayakan usaha penyediaan tenaga	Umum (SPBKLU)		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									listrik, dengan ketentuan dokumen (berbahasa Indonesia) berisi: 1) Kajian kelayakan finansial 2) Kajian kelayakan operasional 3) Studi interkoneksi jaringan 4) Lokasi instalasi 5) Diag-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ram satu garis 6) Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan 7) Jadwal pembangunan dan 8) Jadwal pengoperasian yang disusun oleh badan usaha yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									terserti-fikasi. b. Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang ditetapkan oleh Menteri c. Melakukan permohon-an per-panjangan perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik sesuai masa berlaku			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perizinan berusaha, maksimal 30 tahun			
5	35115	Pembangkit, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha	IUPTLU Terintegrasi Pembangkit, Transmisi, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang ditetapkan oleh Menteri 2. Studi Kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik, dengan ketentuan dokumen (berbahasa Indonesia) berisi: a. Kajian	14 Hari	1. Instalasi yang akan dioperasikan wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi 2. Pengoperasian dilakukan oleh Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi 3. Peralatan yang digunakan memenuhi Standar Nasional	Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kelayakan finansial b. Kajian kelayakan operasio-nal c. Studi in-terkoneksi jaringan d. Lokasi instalasi e. Diagram satu garis f. Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan g. Jadwal pem-bangunan dan h. Jadwal peng-operasian yang		Indonesia yang diberlakukan Wajib 4. Melaporkan Kegiatan Usaha secara berkala kepada Direktur Jenderal 5. Melakukan permohonan perpanjangan perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik sesuai masa berlaku perizinan berusaha, maksimal 30 tahun			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							disusun oleh badan usaha yang ter-sertifikasi 3. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik					
			Izin Penjualan Tenaga Listrik Lintas Negara	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Salinan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepenti-ngan Umum 2. Kesepakatan awal penjualan tenaga listrik 3. Neraca daya di wilayah usahanya 4. Rencana	14 Hari	1. Instalasi yang akan dioperasikan wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi 2. Pengoperasian dilakukan oleh Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi 3. Peralatan yang	Penyim-panan Mineral Ikutan Radio-aktif sebagai Penun-jang Ke-giatan Utama	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Usaha Penyediaan Tenaga Listrik selama 5 (lima) tahun ke depan 5. Data rasio rumah tangga berlistrik pada sistem tenaga listrik setempat dan wilayah sekitar		digunakan memenuhi Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan Wajib 4. Melaporkan Kegiatan Usaha secara berkala kepada Direktur Jenderal 5. Memperbaharui izin usaha penjualan tenaga listrik lintas negara yang telah berakhir paling lama 30 tahun, dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									melakukan proses evaluasi izin paling sedikit tiap 5 tahun			
			Izin Pembelian Tenaga Listrik Lintas Negara	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik selama 5 (lima) tahun ke depan 2. Salinan angka pengenal importir yang diperoleh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 3. Kesepakatan Awal Pembelian	14 Hari	1. Instalasi yang akan dioperasikan wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi 2. Pengoperasian dilakukan oleh Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi 3. Peralatan yang digunakan memenuhi	- Persetujuan harga pembelian tenaga listrik lintas negara - Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif sebagai Penunjang kegia-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Tenaga Listrik 4. Neraca Daya di Wilayah Usahanya 5. Salinan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik		Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan Wajib 4. Melaporkan Kegiatan Usaha secara berkala kepada Direktur Jenderal 5. Melakukan permohonan perpanjangan izin usaha penjualan tenaga listrik lintas negara yang telah berakhir, paling lama 30 tahun	tan utama		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dengan periode evaluasi setiap 5 tahun sekali			
			Izin Interkoneksi Jaringan Tenaga Listrik Lintas Negara	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Salinan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2. Perjanjian Kerjasama Interkoneksi, yang berisi: a. Materi kerja sama teknis dan b. Pelaksanaan interkoneksi mengacu pada aturan jaringan	14 Hari	1. Instalasi yang akan dioperasikan wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi 2. Pengoperasian dilakukan oleh Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi 3. Peralatan yang digunakan memenuhi	Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							transmisi dan aturan jaringan distribusi tenaga listrik		Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan Wajib 4. Melaporkan Kegiatan Usaha secara berkala kepada Direktur Jenderal 5. Melakukan permohonan perpanjangan izin interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara yang telah berakhir, paling lama			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									30 tahun dengan periode evaluasi setiap 5 tahun sekali			
6	35116	Pembangkit, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha	IUPTLU - Pembangkit, Transmisi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang ditetapkan oleh Menteri 2. Studi Kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik, dengan ketentuan dokumen (berbahasa	14 Hari	1. Instalasi yang akan dioperasikan wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi 2. Pengoperasian dilakukan oleh Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi 3. Peralatan yang digunakan memenuhi	Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Indonesia) berisi: a. Kajian kelayakan finansial b. Kajian kelayakan operasio-nal c. Studi in-terkoneksi jaringan d. Lokasi instalasi e. Diagram satu garis f. Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan g. Jadwal pem-bangunan		Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan Wajib 4. Melaporkan Kegiatan Usaha secara berkala kepada Direktur Jenderal 5. Melakukan permohonan perpanjangan perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik sesuai masa berlaku perizinan berusaha,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan h. Jadwal peng-operasian yang disusun oleh badan usaha yang ter-sertifikasi 3. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik		maksimal 30 tahun.			
			Izin Penjualan Tenaga Listrik Lintas Negara	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Salinan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum 2. Kesepakatan awal penjualan	14 Hari	1. Instalasi yang akan dioperasikan wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi 2. Pengoperasi an dilakukan oleh Tenaga Teknik yang	Penyim-panan Mineral Ikutan Radio-aktif sebagai Penun-jang Ke-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tenaga listrik 3. Neraca daya di wilayah usahanya 4. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik selama 5 (lima) tahun ke depan 5. Data rasio rumah tangga berlistrik pada sistem tenaga listrik setempat dan wilayah sekitar		memiliki Sertifikat Kompetensi 3. Peralatan yang digunakan memenuhi Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan Wajib 4. Melaporkan Kegiatan Usaha secara berkala kepada Direktur Jenderal. 5. Melakukan permohonan perpanjangan izin penjualan	giatan Utama		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									tenaga listrik lintas negara yang telah berakhir, paling lama 30 tahun dengan periode evaluasi setiap 5 tahun sekali			
			Izin Pembelian Tenaga Listrik Lintas Negara	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik selama 5 (lima) tahun ke depan 2. Salinan angka pengenal importir yang diperoleh sesuai dengan ketentuan	14 Hari	1. Instalasi yang akan dioperasikan wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi 2. Pengoperasian dilakukan oleh Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi	- Perse-tujuan Harga Pem-belian Tenaga Listrik Lintas Negara - Penyim-panan Mineral Ikutan	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perundang-undangan 3. Kesepakatan Awal Pembelian Tenaga Listrik 4. Neraca Daya di Wilayah Usahanya 5. Salinan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik		3. Peralatan yang digunakan memenuhi Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan Wajib 4. Melaporkan Kegiatan Usaha secara berkala kepada Direktur Jenderal. 5. Melakukan permohonan perpanjangan izin pembelian tenaga listrik lintas negara yang telah berakhir, paling lama 5	Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									tahun			
			Izin Interkoneksi Jaringan Tenaga Listrik Lintas Negara	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Salinan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2. Perjanjian Kerjasama Interkoneksi, yang berisi: a. Materi kerja sama teknis dan b. Pelaksanaan interkoneksi mengacu pada aturan jaringan transmisi dan aturan jaringan distribusi	14 Hari	1. Instalasi yang akan dioperasikan wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi 2. Pengoperasian dilakukan oleh Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi 3. Peralatan yang digunakan memenuhi Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan Wajib	Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tenaga listrik		4. Melaporkan Kegiatan Usaha secara berkala kepada Direktur Jenderal 5. Melakukan permohonan perpanjangan izin interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara yang telah berakhir, paling lama 30 tahun dengan periode evaluasi setiap 5 tahun sekali			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	35117	Pembangkit, Distribusi, dan Penjualan Tenaga Listrik Dalam Satu Kesatuan Usaha	IUPTLU - Pembangkit, Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik dalam Satu Kesatuan Usaha	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Studi Kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik, dengan ketentuan dokumen (berbahasa Indonesia) berisi: a. Lokasi instalasi b. Diagram satu garis c. Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan d. Jadwal pembangunan dan e. Jadwal	14 Hari	1. Instalasi yang akan dioperasikan wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi 2. Pengoperasian dilakukan oleh Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi 3. Peralatan yang digunakan memenuhi Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan Wajib	Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peng-operasian yang disusun oleh badan usaha yang ter-sertifikasi 2. Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang ditetapkan oleh Menteri 3. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik		4. Melaporkan Kegiatan Usaha secara berkala kepada Direktur Jenderal 5. Melakukan permohonan perpanjangan perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik sesuai masa berlaku perizinan berusaha, maksimal 30 tahun			
			Izin Penjualan Tenaga Listrik	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Tinggi	NIB dan Izin	1. Salinan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	14 Hari	1. Instalasi yang akan dioperasikan wajib memiliki	Penyim-panan Mineral Ikutan	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Lintas Negara	- Besar			2. Kesepakatan Awal Penjualan Tenaga Listrik 3. Rencana Daya di Wilayah Usahanya 4. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik selama 5 (lima) Tahun ke depan 5. Data Rasio Rumah Tangga berlistrik pada Sistem Setempat dan Wilayah Sekitar		Sertifikat Laik Operasi 2. Pengoperasian dilakukan oleh Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi 3. Peralatan yang digunakan memenuhi Standar Nasional Indonesia yang diber-lakukan Wajib 4. Melaporkan Kegiatan Usaha secara berkala kepada Direktur	Radio-aktif sebagai Penun-jang Ke-giatan Utama		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Jenderal 5. Melakukan permohonan perpanjangan perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik sesuai masa berlaku perizinan berusaha, maksimal 30 tahun			
			Izin Pembelian Tenaga Listrik Lintas Negara	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Salinan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2. Kesepakatan Awal Pembelian Tenaga Listrik 3. Rencana Daya	14 Hari	1. Instalasi yang akan dioperasikan wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi 2. Pengoperasian dilakukan oleh Tenaga	- Persetujuan Harga Pembelian Tenaga Listrik Lintas Negara	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							di Wilayah Usahanya 4. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik selama 5 (lima) tahun ke depan 5. Salinan angka pengenal importir yang diperoleh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi 3. Peralatan yang digunakan memenuhi Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan Wajib 4. Melaporkan Kegiatan Usaha secara berkala kepada Direktur Jenderal. 5. Melakukan permohonan perpanjangan	- Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									izin pembelian tenaga listrik lintas negara yang telah berakhir, paling lama 5 tahun			
			Izin Interkoneksi Jaringan Tenaga Listrik Lintas Negara	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Salinan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2. Perjanjian Kerjasama Interkoneksi, yang berisi: a. Materi kerja sama teknis dan b. Pelaksanaan interkoneksi mengacu pada aturan	14 Hari	1. Instalasi yang akan dioperasikan wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi 2. Pengoperasian dilakukan oleh Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi 3. Peralatan yang digunakan	Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jaringan dan aturan distribusi tenaga listrik		memenuhi Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan Wajib 4. Melaporkan Kegiatan Usaha secara berkala kepada Direktur Jenderal. 5. Melakukan permohonan perpanjangan izin interkoneksi jaringan tenaga listrik lintas negara yang telah berakhir,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									paling lama 30 tahun dengan periode evaluasi setiap 5 tahun sekali			
8	35118	Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik	Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum - Distribusi dan Penjualan Tenaga Listrik	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Studi Kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik, dengan ketentuan dokumen (berbahasa Indonesia) berisi: a. Kajian kelayakan finansial b. Kajian kelayakan	5 Hari	1. Instalasi yang akan dioperasikan wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi 2. Pengoperasian dilakukan oleh Tenaga Teknik yang memiliki Sertifikat Kompetensi 3. Peralatan yang digunakan	Registrasi Nomor Identitas Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kenda-	1. Dilakukan oleh BUMN 2. Usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi yang memiliki wilayah usaha 3. Fasilitas instalasinya lintas Provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							operasional c. Studi interkoneksi jaringan d. Lokasi instalasi e. Diagram satu garis f. Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan g. Jadwal pembangunan dan h. Jadwal pengoperasian yang disusun oleh badan usaha		memenuhi Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan Wajib 4. Melaporkan Kegiatan Usaha secara berkala kepada Direktur Jenderal	raan Listrik Umum (SPB-KLU)	4. Menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang perizinan berushaa penyediaan tenaga listtik untuk umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang ter-sertifikasi 2. Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang ditetapkan oleh Menteri 3. Pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam menetapkan pereizinan berusaha				1. Memiliki wilayah usaha namun tidak termasuk usaha pembang-kitan tenaga listrik 2. Memiliki fasilitas instalasi dalam provinsi 3. Menjual tenaga listrik dan/atau menyewa-kan jari-ngan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
											tenaga listrik kepada pemegang perizinan berusaha penyedia-an tenaga listrik untuk kepenting an umum yang dite-tapkan oleh Pe-merintah Daerah Provinsi	
9	35121	Pengope-rasian Instalasi Penye-diaan	Seluruh	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Tinggi	NIB dan Izin	1. Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha	5 Hari	Menyampaikan Laporan Berkala	-	Badan usaha milik negara, atau badan layanan umum	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Tenaga Listrik		- Besar			Jasa Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik 2. Dokumen sistem manajemen mutu				Pemerintah Pusat	
											Badan usaha milik daerah, penanam modal dalam negeri, koperasi, atau badan layanan umum Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Gubernur
10	43211	Instalasi Listrik	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha Jasa Pembangunan dan Pemasangan	5 Hari	1. Menyampaikan Laporan berkala 2. Khusus kantor perwakilan jasa penunjang	-	Badan usaha milik negara, kantor perwakilan, atau badan layanan umum Pemerintah Pusat	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Instalasi Tenaga Listrik, Jasa Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik 2. Dokumen sistem manajemen mutu		tenaga listrik asing juga harus memenuhi kewajiban sebagai berikut: a. membentuk kerja sama operasi dengan badan usaha jasa penunjang tenaga listrik dalam negeri berkualifikasi besar yang memiliki perizinan berusaha		Badan usaha milik daerah, penanam modal dalam negeri, koperasi, atau badan layanan umum Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dalam setiap kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik di Indonesia dengan ketentuan paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan dikerjakan dengan badan usaha jasa penunjang tenaga listrik dalam			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									negeri b. mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja Indonesia daripada tenaga kerja asing c. menempatkan warga negara Indonesia sebagai penanggung jawab badan usaha kantor perwakilan asing d. mengutamakan penggunaan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									material dalam negeri e. memiliki teknologi tinggi, mutakhir, efisien, berwawasan lingkungan, serta memperhatikan kearifan lokal dan f. melaksanakan proses alih teknologi.			
11	35122	Pengoperasian instalasi peman-	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menenga	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha Jasa Pengoperasian	5 Hari	Menyampaikan Laporan Berkala	-	Badan usaha milik negara, atau badan layanan umum	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		faatan tenaga listrik		- Besar			Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik				Pemerintah Pusat	
											Badan usaha milik daerah, penanam modal dalam negeri, koperasi, atau badan layanan umum Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Gubernur
12	71102	Aktivitas keinsi-nyuran dan kon-sultasi teknis YBDI	Usaha dalam kelompok ini adalah usaha jasa konsultansi dalam bidang instalasi	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Memenuhi Standar Perizinan Berusaha Jasa Konsultansi Dalam Bidang Instalasi Tenaga Listrik	5 Hari	Menyampaikan Laporan Berkala *Khusus kantor perwakilan jasa penunjang tenaga listrik asing juga harus	-	Badan usaha milik negara, kantor perwakilan jasa penunjang tenaga listrik asing, atau badan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			tenaga listrik						memenuhi kewajiban sebagai berikut: 1. Membentuk kerja sama operasi dengan badan usaha jasa penunjang tenaga listrik dalam negeri berkualifikasi besar yang memiliki perizinan berusaha dalam setiap kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik di Indonesia dengan ketentuan		layanan umum Pemerintah Pusat	
											Badan usaha milik daerah, penanam modal dalam negeri, koperasi, atau badan layanan umum Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan dikerjakan dengan badan usaha jasa penunjang tenaga listrik dalam negeri 2. Mempekerja-kan lebih banyak tenaga kerja Indonesia daripada tenaga kerja asing 3. Menempatkan warga negara Indonesia sebagai			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									penanggung jawab badan usaha kantor perwakilan asing 4. Mengutama-kan penggunaan material dalam negeri 5. Memiliki teknologi tinggi, mutakhir, efisien, berwawasan lingkungan, serta mem-perhatikan kearifan lokal dan 6. Melaksanakan proses alih teknologi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Kelompok ini mencakup jasa konsultasi kegiatan survei geofisika, survei geologi, survei seismik dan survei geokimia	- Besar	Tinggi	NIB dan Izin (Izin Survei Umum)	1. Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) 2. Berita Acara Klarifikasi Rencana Pelaksanaan Survei Umum 3. Batas wilayah dan lintasan Survei Umum yang dilengkapi dengan koordinat geografis dalam proyeksi Longitude dan Latitude 4. Tata waktu dan rencana kerja	10 Hari	1. Setelah diterbitkannya Izin Survei Umum, pemegang izin wajib mengadakan kontrak kerja sama dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM mengenai penyimpanan, pemeliharaan, dan pe-masyarakatan data dengan ketentuan dan mekanisme sebagai berikut:	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Peralatan dan parameter survei 6. Parameter dan tahapan pengolahan data 7. Rencana pembiayaan perolehan data Survei Umum 8. Rencana pemasyarakatan data 9. Jaminan kecukupan pendanaan yang dibuktikan dengan: a. Bagi Badan Usaha yang telah		a. Apabila sampai pada akhir masa berlaku-nya Izin Survei Umum, pemegang Izin tidak memiliki kontrak kerja sama, Izin Survei Umum dinyata-kan tidak berlaku dan seluruh data hasil kegiatan Survei			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berdiri lebih dari 3 tahun menyampai kan laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar dari Badan Usaha atau yang dilakukan bersamaan dengan perusaha-		Umum wajib diserah- kan kepa- da Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM b. Dalam hal Survei Umum melintasi Wilayah Kerja, Izin Survei Umum yang terdiri dari area di Wilayah Terbuka dan area di Wilayah			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							an induknya b. Bagi Badan Usaha yang berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun: 1) laporan keuangan tahunan yang ada 2) laporan keuangan perusahaan induknya yang telah diaudit oleh akuntan publik bagi		Kerja yang dilintasi akan dituangkan pada 1 (satu) kontrak kerja sama terkait penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasyarakatan data antara Pemegang Izin Survei Umum dan Pusat Data dan Teknologi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							badan usaha yang merupakan anak perusahaan 3) jaminan kecukupan pendanaan yang dikeluarkan oleh perusahaan induk yang nilainya sesuai dengan rencana usaha dalam Studi		Informasi ESDM c. Kontrak kerja sama dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM dapat dilakukan setelah Izin Survei Umum diterbitkan, dengan tanggal efektif kontrak yaitu sejak memenuhi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Kelayakan dan/atau 4) Surat keterangan dari bank utama (*prime bank*) yang berkedudukan di Indonesia, yang menerangkan bahwa Badan Usaha memiliki kemampuan pendanaan untuk		realisasi luasan area, panjang lintasan, atau jumlah titik Survei Umum minimal 51% (lima puluh satu persen) di Wilayah Terbuka berdasarkan hasil pemantauan pelaksanaan Survei Umum oleh			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							melakukan kegiatan usahanya 10. Apabila melintasi Wilayah Kerja maksimal 30% dari seluruh luasan area, panjang lintasan, atau jumlah titik Survei Umum, wajib menyertakan: a. Surat keterangan tidak keberatan dari Kontraktor yang		Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi d. Apabila realisasi luasan area, panjang lintasan, atau jumlah titik Survei Umum lebih kecil dari yang tertuang dalam Izin Survei Umum, termasuk perubahan izin-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Wilayah Kerjanya dilintasi b. Dokumen/ peta yang menggambarkan luasan area, panjang lintasan, atau jumlah titik Survei Umum termasuk pada area Wilayah Kerja yang dilintasi 11. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk		nya apabila ada, akan mengurangi secara proporsional jangka waktu kontrak kerja sama terkait penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasyarakatan data 2. Dalam hal terjadi perubahan, baik luasan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menanda-tangani *Confidentiality Agreement* (CA) apabila pengolahan data survei dilakukan di luar negeri		area, panjang lintasan, jumlah titik dan/atau lokasi survei di luar wilayah yang tercakup dalam Izin Survei Umum, pemegang Izin wajib: a. Mempertahankan realisasi pelaksanaan minimal 70% (tujuh puluh persen) di Wilayah Terbuka dalam hal Survei			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Umum melintasi Wilayah Kerja b. Melaporkan pelaksana-an Survei Umum kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas bumi 3. Dalam hal terdapat perubahan luasan area, panjang lintasan, atau jumlah titik Survei Umum yang melebihi 20% (dua			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									puluh persen) dari total luasan area, panjang lintasan, atau jumlah titik Survei Umum yang tertuang dalam Izin Survei Umum, pemegang izin terlebih dahulu wajib menyampaikan surat permohonan perubahan izin kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal setelah melakukan presentasi ke			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Setelah terbitnya perubahan izin, kontrak kerja sama dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM wajib dilakukan amandemen 4. Apabila pemegang Izin Survei Umum tidak melak-sanakan kewajiban sebagaimana			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dimaksud pada angka 2 dan angka 3, data tambahan yang dihasilkan dari perubahan luasan area, panjang lintasan, jumlah titik dan/atau lokasi survei wajib diserahkan kepada Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM setelah dievaluasi oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									serta data menjadi milik negara dan pemegang izin tidak memiliki hak pemasya-rakatan atas data tambahan 5. Dalam hal Survei Umum melintasi Wilayah Kerja, luasan area, panjang lintasan, atau jumlah titik hasil survei umum yang dapat dima-sukkan dalam kontrak kerja sama dengan Pusat Data			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Teknologi dan Informasi ESDM wajib memenuhi minimal 70% (tujuh puluh persen) dari realisasi pelaksanaan Survei Umum di Wilayah Terbuka. Data hasil Survei Umum yang tidak masuk dalam lingkup kontrak kerja sama wajib diserahkan kepada Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM setelah			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dievaluasi oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi serta data menjadi milik negara dan pelaku usaha tidak memiliki hak pemasyarakatan atas data 6. Pemegang Izin Survei Umum menyampaikan dokumen perjanjian dengan pihak ketiga kepada Pusat Data Teknologi dan Informasi ESDM antara			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									lain terkait dengan pelaksanaan Survei Umum dan penyimpanan, pemeliharaan, dan pemasyarakatan data hasil kegiatan Survei Umum 7. Pemegang Izin Survei Umum wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan Survei Umum kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 8. Pemegang Izin Survei Umum wajib bertang-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									gung jawab sepenuhnya terhadap penguasaan di dalam kegiatan penyimpanan, pengelolaan dan kegiatan pemasyarakatan data hasil kegiatan survei umum 9. Pemegang Izin Survei Umum wajib menyerahkan *Snapshot* perekaman seluruh data Survei Umum yang diperoleh termasuk daftar seluruh			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									datanya kepada Pusat Data dan Teknologi Informasi ESDM melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi serta mempresentasikan hasil Survei Umum kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi 10. Izin Survei Umum tidak dapat dialihkan kepada pihak lain			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									11. Pemegang Izin wajib melakukan kegiatan Survei Umum 12. Pemegang Izin Survei Umum wajib memenuhi realisasi luasan area, panjang lintasan atau jumlah titik Survei Umum minimal mencapai 51% (lima puluh satu persen) di Wilayah Terbuka			
13	71201	Jasa sertifikasi	Usaha dalam kelompok ini adalah	- Mikro - Kecil - Menengah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha Jasa	5 Hari	1. Menyampaikan Laporan Berkala	Pendaftaran Lembaga Penilaian	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			usaha jasa sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik	- Besar			Sertifikasi Peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik		2. Memiliki sistem informasi sertifikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal yang membidangi Ketenagalistrikan 3. Memenuhi persyaratan akreditasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku di bidang ketenagalistrikan	Kesesuaian (LPK)		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Usaha dalam kelompok ini adalah usaha jasa sertifikasi badan usaha jasa penunjang tenaga listrik	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha Jasa Sertifikasi Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik	5 Hari	1. Menyampaikan Laporan Berkala 2. Memiliki sistem informasi sertifikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal yang membidangi Ketenagalistrikan 3. Memenuhi persyaratan akreditasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku di bidang	Pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ketenaga-listrikan			
14	71202	Jasa Pengu-jian Labo-ratorium	Usaha dalam kelompok ini adalah usaha jasa laborato-rium pengujian peralatan dan pe-manfaat tenaga listrik	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha Jasa Laboratorium Pengujian Peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik	5 Hari	Menyampaikan Laporan Berkala	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
15	71203	Jasa Inspeksi Periodik	Kelompok ini mencakup kegiatan jasa inspeksi teknis dan pemerik-saan	- Kecil - Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Laporan keuangan tahun terakhir untuk perusahaan yang telah berdiri	15 hari	Wajib mengikuti standar internasional, Standar Nasional Indonesia, dan standar lain sesuai ketentuan peraturan	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			keselamat-an peralatan pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi serta kegiatan pengujian teknis tak merusak (*Non Destructive Testing*) Non Radiasi oleh Badan Usaha Inspeksi Minyak				minimal 1 (satu) tahun 2. Surat Pernyataan diatas materai mengenai komitmen meliputi: a. Daftar Peralatan pen-dukung/ penunjang inspeksi peralatan b. Daftar inspektur yang memiliki Sertifikat Keahlian inspeksi peralatan		perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			dan Gas Bumi				c. Daftar Pengalaman perusahaan (kecuali untuk perusahaan baru) dan pengalaman personil dalam melakukan pemeriksaan peralatan dan 3. Analisis manajemen risiko keselamatan peralatan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Minyak dan Gas Bumi 4. Surat Pernyataan diatas meterai mengenai kebenaran atas dokumen persyaratan dan keterangan/ pernyataan mengenai: a. Kesang-gupan Badan Usaha terhadap peme-nuhan: - Aspek kese-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lamatan, kesehatan kerja dan pengelolaan lindungan lingkungan hidup - Ketentuan peraturan perundang-undangan b. Badan Usaha bebas dari konflik atau permasa-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lahan hukum lainnya dengan pihak lain					
16	71204	Jasa Inspeksi Teknik Instalasi	Usaha dalam kelompok ini adalah usaha jasa pemeriksa-an dan pengujian instalasi tenaga listrik	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	Memenuhi Standar Perizinan Berusaha Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik	5 hari	1. Memenuhi Standar Perizinan Berusaha Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik 2. Menyampaikan Laporan Berkala 3. Memiliki sistem informasi sertifikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Jenderal yang membidangi Ketenaga-listrikan 4. Melakukan registrasi setiap Sertifikat Laik Operasi yang diterbitkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang membidangi Ketenaga-listrikan 5. Memenuhi persyaratan akreditasi sesuai peraturan perundangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang berlaku di bidang ketenaga-listrikan			
17	72102	Penelitian dan pengembangan teknologi dan rekayasa	Usaha dalam kelompok ini adalah usaha jasa penelitian dan pengembangan yang terkait dengan instalasi tenaga listrik	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha Jasa Penelitian dan Pengembangan yang Terkait dengan Instalasi Tenaga Listrik	5 Hari	Menyampaikan Laporan Berkala	-	Badan usaha milik negara, atau badan layanan umum Pemerintah Pusat	Menteri/ Kepala Badan
											Badan usaha milik daerah, penanam modal dalam negeri, koperasi atau badan layanan umum Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
18	74322	Aktivitas sertifikasi personel independen	Usaha dalam kelompok ini adalah usaha jasa sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha Jasa Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan	5 Hari	1. Menyampaikan Laporan Berkala 2. Memiliki sistem informasi sertifikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal yang membidangi Ketenagalistrikan 3. Memenuhi persyaratan akreditasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku di bidang	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ketenaga-listrikan			
19	85497	Pendidi-kan teknik swasta	Usaha dalam kelompok ini adalah usaha jasa pendidi-kan dan	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Pemenuhan Standar Perizinan Berusaha Jasa Pendidikan dan Pelatihan di	5 Hari	Menyampaikan Laporan Berkala	-	Badan usaha milik negara, atau badan layanan umum Pemerintah Pusat	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			pelatihan di bidang ketenaga-listrikan				Bidang Ketenaga-listrikan				Badan usaha milik daerah, penanam modal dalam negeri, koperasi, atau badan layanan umum Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
20	35129	Aktivitas penunjang tenaga listrik lainnya	Seluruh, selain Usaha Jasa Konservasi Energi	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	Memenuhi Standar Perizinan Berusaha Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan
			Usaha Jasa Konservasi Energi	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	1. Memiliki 1 orang atau lebih ahli konservasi energi yang dibuktikan dengan sertifikat auditor energi dan/atau verifikator 2. Daftar kelengkapan peralatan	Otomatis	1. Memenuhi dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Melaporkan pelaksanaan usaha konservasi energi pada Menteri melalui Direktur Jenderal	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penunjang 3. Surat pernyataan tertulis diatas materai mengenai kesediaan dilakukan inspeksi lapangan oleh Direktur Jenderal EBTKE 4. Surat pernyataan tertulis diatas materai mengenai kemampuan keuangan untuk melaksanakan usaha jasa konservasi		setiap akhir tahun			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							energi dan 5. Surat pernyataan tertulis diatas materai mengenai kesediaan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan					
21	46610	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI	Perdagangan Besar Batubara	- Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin (Izin Pengangkutan dan Penjualan Minerba)	**Permohonan Baru** 1. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi, atau	14 Hari	1. Melaksanakan kegiatan pengangkutan dan penjualan batubara sesuai ketentuan tata cara pengangkutan dan penjualan termasuk menggunakan sistem	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Seluruh	Menteri/ Kepala badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perusahaan perseorangan 2. Sumber pasokan batubara yang dibuktikan dengan salinan nota kesepahaman atau perjanjian kerjasama pengangkutan dan penjualan batubara yang masih berlaku dengan pemegang: a. IUP b. IUPK c. IUPK sebagai kelanjutan operasi		informasi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampai-kan laporan kegiatan pengangkutan dan penjualan kepada Menteri sesuai dengan tata cara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Mengangkut dan menjual komoditas batubara yang berasal dari pemegang izin			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kontrak/ perjanjian d. PKP2B e. Izin Pengangkutan dan Penjualan batubara lainnya **Permohonan Perpanjangan** 1. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan 2. Sumber		yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 4. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pasokan batubara yang dibuktikan dengan salinan nota kesepahaman atau perjanjian kerjasama pengangkutan dan penjualan batubara yang masih berlaku dengan pemegang: a. IUP b. IUPK c. IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/ perjanjian d. PKP2B					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							e. Izin Pengangkutan dan Penjualan batubara lainnya 3. Laporan akhir kegiatan pengangkutan dan penjualan					
			Perdagangan Besar Minyak Pelumas	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	1. Menerapkan Standar K3L 2. Melaporkan realisasi penjualan pelumas setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									3. Mencantumkan NPT pada kemasan produk pelumas			
			Perdagangan Besar bahan bakar gas cair dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel gasoline, bahan bakar oli,	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin (Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi)	A. **Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan Niaga Minyak Bumi, Niaga Umum Bahan Bakar Minyak, dan/atau Niaga Umum Hasil Olahan** 1. Persyaratan Administratif a. Surat Permohonan b. Daftar Penerima	15 Hari	1. Memenuhi dan mematuhi peraturan perundang-undangan 2. Menjamin ketersediaan komoditas yang diniagakan secara berkesinambungan pada jaringan distribusi niaganya 3. Menjamin harga jual	- Persetujuan Layak Operasi Instalasi Minyak dan Gas Bumi - Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			kerosin, premium, solar, minyak dan bahan bakar gas (LPG, gas butana dan propane, LNG, CNG, dan lain-lain)				Manfaat (*Beneficial Ownership*) c. Identitas dan Surat Kuasa Nara-hubung d. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai: 1) Kesang gupan Badan Usaha me-menuhi ke-tentuan per-aturan perun-dang-		komoditas yang diniagakan sesuai yang diatur dan/atau ditetapkan oleh menteri 4. Menjamin dan bertanggung-jawab atas standar dan mutu (spesifikasi) komoditas yang diniagakan sampai ke konsumen akhir sesuai dengan ketentuan peraturan	Bahan Peno-long		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							undangan 2) Kesanggupan memenuhi aspek keselamatan, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup 3) Kesanggupan memenuhi kewajiban badan usaha 4) Ke-		5. Mempunyai dan menggunakan merek dagang tertentu yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang 6. Menjamin dan bertanggung jawab atas penggunaan peralatan, keakuratan dan sistem alat ukur yang digunakan yang memenuhi standar sesuai ketentuan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sediaan dilakukan audit kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan 5) Kesanggupan badan usaha menjamin dan bertanggung jawab		peraturan perundang-undangan 7. Menjamin keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat 8. Bersedia dilakukan inspeksi oleh petugas Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi secara periodik atau			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bahwa sarana dan fasilitas yang dimiliki/ dikuasai layak beroperasi dan mampu dijalankan sesuai dengan kaidah ketekni kan yang baik selama masa operasi 6) Badan usaha		sewaktu-waktu apabila diperlukan 9. Memenuhi perizinan yang ditetapkan oleh instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 10. Melakukan penyesuaian terhadap Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi apabila terjadi perubahan dan/atau penambahan terhadap:			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bebas dari konflik atau permasalahan hukum lainnya dengan pihak lain 7) Dokumen persyaratan dan keterangan/ pernyataan yang diberikan adalah benar adanya		a. Sarana dan fasilitas maupun lokasi kegiatan usaha atau b. Jenis komoditas dan/atau merek dagang 11. Menyampaikan laporan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan apabila dikemudian hari terbukti tidak benar akan dicabut izin usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan 8) Kesanggupan menerima penun-		mengenai pelaksanaan kegiatan usaha niaganya dan/atau terdapat perubahan terhadap data administrasi 12. Menjamin keselamatan instalasi dan peralatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 13. Badan Usaha Niaga dapat melaksanakan penunjukan penyalur			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jukan dan penugasan dari Menteri untuk melaksanakan penyimpanan dalam rangka penyediaan cadangan penyangga energi atau cadangan operasi dan pemenuh-		dengan ketentuan sebagai berikut: a. Penyalur wajib berbentuk Koperasi, usaha kecil dan/atau Badan Usaha Swasta Nasional b. Penyalur bukan untuk usaha perseorangan, ditujukan untuk badan usaha yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							an kebutuhan minyak bumi di dalam negeri pada fasilitas dan sarana penyimpanan miliknya (untuk kegiatan usaha niaga minyak bumi). 2. Persyaratan Teknis (Izin Usaha		berbadan hukum, dan hanya untuk usaha PMDN c. Penyalur hanya dapat menerima penunjukan dari 1 (satu) Badan Usaha Niaga Migas untuk masing-masing jenis komoditas BBM, BBG,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Sementara) a. Studi Kelayakan paling sedikit memuat lokasi, sarana dan fasilitas, komoditas (untuk 1 komoditas wajib memiliki/ menguasai 1 fasilitas penyim-panan), skema usaha, rencana pasokan, Pengguna-an Tenaga Kerja Asing dan		LPG, dan/ atau LNG d. Penyalur wajib mengguna-kan logo dan merek dagang BU Niaga Migas e. Penyalur menyam-paikan laporan kegiatan penyaluran nya kepada Badan Usaha Niaga Migas f. Memenuhi kewajiban lainnya			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Tenaga Kerja Lokal, realisasi kegiatan usaha Niaga Migas yang pernah dijalani sebelumnya (apabila ada) dan analisis keekonomian (rencana biaya investasi, harga jual, dan indikator kelayakan usaha) serta rencana merek		sesuai dengan peraturan perundangan g. Memiliki kontrak perjanjian kerjasama penunjukan penyalur h. Penyalur memiliki dokumen NIB, Persetujuan lingkungan hidup, persetujuan kegiatan pemanfaatan ruang, dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dagang dan rencana spesifikasi produk yang akan diniagakan untuk kegiatan niaga umum Bahan Bakar Minyak dan/atau Hasil Olahan b. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau Persetujuan Pemerintah		keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan i. Penyalur memiliki/ menguasai sarana fasilitas dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Penyalur BBM, LPG, BBG, dan LNG yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							/instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku atau pengelola kawasan yang berwenang mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana c. Kesepakatan awal (HoA atau MoU) jual beli dengan pemasok dan/atau		menyalurkan Bahan Bakar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk transportasi Darat, transportasi Laut, dan transportasi udara (SPBU, SPBN, SPBG,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dokumen yang meng-indikasi-kan ter-sedianya pasokan dengan calon pemasok Minyak Bumi yang difasilitasi oleh SKK Migas untuk kegiatan Niaga Minyak Bumi dan/atau Niaga umum Hasil Olahan d. Rencana		dsb) wajib me-miliki Sarana dan Fa-silitas pengisi-an Bahan Bakar 2) Penya-lur BBM, BBG/ LPG/ LNG yang menya-lurkan selain di Stasiun Peng-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pembangunan sarana dan fasilitas Niaga Minyak Bumi dan/atau Niaga Umum Hasil Olahan yang dimiliki dan/atau dikuasai berupa fasilitas penyimpanan Minyak Bumi dan/atau Hasil Olahan beserta data titik		isian Bahan Bakar untuk transportasi Darat, transportasi Laut, dan transportasi udara (agen BBM, agen LPG, agen LNG dsb) wajib memiliki			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							koordinat berupa Data *Geo-reference Standard Datum* WGS84 dan e. Rencana penggunaan sarana dan fasilitas Niaga Umum Bahan Bakar Minyak berupa kepemilikan sarana dan fasilitas penyimpanan dengan jumlah keseluruhan		Sarana dan fasilitas pengangkutan untuk kegiatan penyaluran dengan transportasi darat 3) Untuk kegiatan penyaluran dengan transportasi laut/			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							paling sedikit 1500 KL (seribu lima ratus kiloliter) dan kebutuhan fasilitas pe-nyimpanan selanjut-nya dapat menguasai /sewa Sarana Fasilitas Pe-nyimpanan BBM dimaksud dapat berupa tangki darat, floating		sungai, Penya-lur dapat me-nguasai sarana dan Fa-silitas peng-angkut-an j. Penyalur selain penyalur LPG PSO dan Minyak Tanah hanya dapat me-nyalurkan bahan bakar			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							storage, tangki penyimpanan BBM di Fasilitas Sarana Pengisian Bahan Bakar untuk Transportasi Darat, Laut, dan Udara dan fasilitas penyimpanan lain sesuai ketentuan peraturan lainnya Beserta data titik koordinat berupa Data *Geo-*		kepada konsumen pengguna langsung untuk kepentingan sendiri dan tidak diperjualbelikan kembali k. Penyalur dilarang menjual/ menyalurkan kepada Badan Usaha Niaga Migas l. Penyalur LPG Bersubsidi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							reference Standard Datum WGS84 baik yang: 1) Dimiliki dengan jangka waktu pembangunan sarana dan fasilitas penyimpanan dan/atau 2) Dikuasai, dengan sewa eksklusif kepada pihak		(PSO) dan Minyak Tanah PSO wajib menunjuk Sub Penyalur dalam melaksanakan kegiatan penyaluran m. Penyalur wajib menjual jenis BBM Umum, Jenis LPG Umum, dan LNG sesuai dengan harga yang ditentukan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lain f. Badan Usaha Niaga yang melakukan kegiatan pen-campuran *(blending)* untuk menghasil-kan Bahan Bakar Minyak dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki/ menguasai fasilitas pencampu-ran (*blending*) Badan Usaha		oleh Badan Usaha Niaga n. Stok (cadangan) bahan bakar yang ada di fasilitas penyalur merupakan milik/ dicatat sebagai stok Badan Usaha Niaga 14. Badan Usaha Niaga wajib melaporkan penunjukan penyalurnya kepada Ditjen Migas			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Niaga hanya dapat melakukan *blending* dengan komoditas hasil blending yang tercantum dalam Izin Usaha g. Surat Persetujuan Penggunaan Permukaan Perairan untuk Lokasi Penyimpanan (penetapan Titik Koordinat)					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dari instansi yang berwenang, untuk fasilitas penyimpanan di perairan h. SK Izin Usaha Sementara dan/atau Izin Usaha/Penyesuaian/Perpanjangan (apabila ada) i. Jaminan kecukupan pendanaan, yang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dibuktikan dengan : 1) Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang sudah diaudit 2) Dokumen kesepakatan dengan pihak lain untuk pendanaan (mencantumkan no-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							minal ter-tentu) atau 3) Surat keterangan dari bank umum yang berkedudukan di Indonesia, yang menerangkan bahwa Badan Usaha memili-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ki kemampuan pendanaan dengan nominal tertentu 3. Persyaratan Teknis (Izin Usaha/ Perpanjangan Izin Usaha) a. Studi Kelayakan paling sedikit memuat lokasi, sarana dan fasilitas, skema usaha, pasokan, komoditas (untuk 1					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							komoditas wajib memiliki/ menguasai 1 fasilitas penyimpa-nan), Peng-gunaan Tenaga Kerja Asing dan Tenaga Kerja Lokal, realisasi kegiatan usaha Niaga Migas yang pernah dijalani se-belumnya (apabila ada) dan analisis keuangan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(biaya investasi, harga jual, dan indikator kelayakan usaha) b. Kontrak perjanjian jual beli dengan pemasok untuk kegiatan Niaga Minyak Bumi dan/atau Niaga umum Hasil Olahan c. Berita Acara Pemeriksaan Keselamat-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							an Instalasi dan Peralatan terkait Fasilitas dan/atau Sarana yang ditan-datangani oleh Petugas Direktorat Teknik dan Lingku-ngan Migas /PLO yang masih berlaku/ sesuai ketentuan peraturan perundang -undangan d. Daftar sarana dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							fasilitas niaga yang digunakan termasuk fasilitas penyimpanan dan fasilitas pendukung beserta bukti kepemilikan atau kontrak perjanjian sewa menyewa apabila terdapat fasilitas niaga untuk kegiatan Niaga Minyak Bumi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan/atau Niaga Umum Hasil Olahan e. Daftar sarana dan fasilitas niaga yang digunakan termasuk kepemilik-an sarana dan fasilitas pe-nyimpanan dengan jumlah ke-seluruhan paling sedikit 1500 KL (seribu lima ratus kiloliter) dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kebutuhan fasilitas penyim-panan se-lanjutnya dapat menguasai /sewa Sarana Fasilitas Penyimpan an BBM dimaksud dapat berupa tangki darat, floating storage, tangki penyimpan an BBM di Fasilitas Sarana Pengisian Bahan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Bakar untuk Transportasi Darat, Laut, dan Udara dan fasilitas penyimpanan lain sesuai ketentuan peraturan lainnya f. Terhadap kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, Niaga umum Bahan Bakar Minyak atau Niaga Hasil					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Olahan yang: 1) Memiliki fasilitas penyimpanan laut, agar melampirkan: i. Dokumen kepemilikan berupa gross akta dan ii. *Ship particulars* 2) Memiliki dan/atau me-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nguasai fasilitas pengangkutan dengan moda angkutan darat, agar melampirkan STNK atau BPKB 3) Memiliki dan/atau menguasai fasilitas pengangkutan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dengan moda angkut-an laut, agar me-lampir-kan: gross akta atau surat per-Janjian pengua sa-an fasilitas g. Data titik koor-dinat fasilitas penyimpan an yang digunakan berupa Data *Georefe-*					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							rence Standard Datum WGS84 h. Bukti pelaporan kegiatan usaha Niaga Migas (apabila telah memiliki Izin Usaha Niaga Migas) i. Seluruh Salinan Surat Keputusan Izin Usaha Niaga Migas yang dimiliki dan masih berlaku					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							j. Dokumen bukti pendaftaran merek dagang yang akan digunakan, sertifikat merek dagang atau perjanjian lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan k. Menyampaikan spesifikasi produk yang diniagakan:					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1) Spesifikasi Bahan Bakar Minyak untuk kegiatan Niaga umum Bahan Bakar Minyak 2) Laporan hasil uji laboratorium untuk kegiatan Niaga Umum Hasil Olahan B. **Izin Usaha**					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.D.140

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk Kegiatan Niaga Terbatas Bahan Bakar Minyak, dan/atau Niaga Terbatas Hasil Olahan: 1. Persyaratan Administrasi a. Surat Permohonan b. Daftar Penerima Manfaat (*Beneficial Ownership*) c. Identitas dan Surat Kuasa					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Nara-hubung d. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai: 1) Kesang-gupan meme-nuhi aspek keselam atan, ke-sehatan kerja dan pe-ngelola-an ling-kungan hidup 2) Kesang-gupan meme-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nuhi kewajiban badan usaha 3) Kesediaan dilakukan audit kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan 4) Kesanggupan badan usaha menjamin					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan bertanggung jawab bahwa sarana dan fasilitas yang dimiliki/dikuasai layak beroperasi dan mampu dijalankan sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							selama masa operasi 5) Badan usaha bebas dari konflik atau per-masa-lahan hukum lainnya dengan pihak lain 6) Doku-men persya-ratan dan kete-ra-ngan/ pernya-taan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang diberikan adalah benar adanya dan apabila dikemudian hari terbukti tidak benar akan dicabut izin usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							7) Kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri untuk melaksanakan penyimpanan dalam rangka penyediaan cadangan penyangga energi atau cadang-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							an operasional dan pemenuhan kebutuhan minyak bumi di dalam negeri pada fasilitas dan sarana penyimpanan miliknya (untuk kegiatan usaha niaga minyak					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bumi) 8) Kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri untuk melaksanakan penyimpanan dalam rangka penyediaan cadangan penyangga energi atau					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							cadangan operasional dan pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak di dalam negeri pada fasilitas dan sarana penyimpanan miliknya (untuk kegiatan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							usaha niaga bahan bakar minyak) 2. Persyaratan Teknis (Izin Usaha/Perpanjangan Izin Usaha) a. Studi Kelayakan paling sedikit memuat lokasi, sarana dan fasilitas, skema usaha, pasokan, komoditas, penggunaan Tenaga					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Kerja Asing dan Tenaga Kerja Lokal, realisasi kegiatan usaha Niaga Migas yang pernah dijalani sebelumnya (apabila ada) dan analisis keuangan (biaya investasi, harga jual, dan perhitungan analisis kelayakan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							usaha) serta hasil uji laboratorium untuk komoditas yang akan diniagakan b. Jaminan kecukupan pendanaan, yang dibuktikan dengan : 1) Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang sudah diaudit 2) Doku-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							men kesepakatan dengan pihak lain untuk pendanaan (mencantumkan nominal tertentu) atau 3) Surat keterangan dari bank umum yang berkeduduk-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							an di Indonesia, yang menerangkan bahwa Badan Usaha memiliki kemampuan pendanaan dengan nominal tertentu c. Kontrak perjanjian jual beli dengan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pemasok d. Kontrak perjanjian dengan konsumen pengguna yang memiliki/ menguasai fasilitas penyimpa-nan dengan kapasitas paling sedikit 1.500 kilo liter yang terintegrasi dengan *receiving*					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							terminal/ dermaga/ *jetty* untuk kegiatan niaga terbatas Bahan Bakar Minyak dan volume penjualan sebesar minimum 5000 KL per bulan e. Kontrak perjanjian dengan konsumen pengguna					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang memiliki/ menguasai fasilitas pe-nyimpanan yang terintegrasi dengan *receiving terminal*/ dermaga/ jetty untuk kegiatan Niaga terbatas hasil olahan f. Dokumen sarana dan fasilitas					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang dimiliki/ dikuasai oleh konsumen beserta data titik koordinat berupa Data *Geo-reference Standard Datum WGS84* g. Bukti pelaporan kegiatan usaha Niaga Migas (apabila					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							telah memiliki Izin Usaha Niaga Migas) h. Seluruh Salinan Surat Keputusan Izin Usaha Niaga Migas yang dimiliki dan masih berlaku dan i. Menyam-paikan laporan hasil uji laboratori-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							um produk yang diniagakan C. **Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk Kegiatan Niaga LPG, LNG, BBG dan/atau CNG** 1. Persyaratan Administrasi a. Surat Permohonan b. Daftar Penerima Manfaat/ Benefecial Ownership c. Persetujuan Kese-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							suaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau Persetujuan Pemerintah/ instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku atau pengelola kawasan yang berwenang mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan sarana Dalam hal fasilitas berupa *floating Storage* diperlukan Surat Persetujuan Penggunaan Permukaan Perairan untuk Lokasi Penyimpanan (penetapan Titik Koordinat) dari instansi yang berwenang d. Surat pernyataan tertulis di					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							atas materai mengenai: 1) Kesanggupan memenuhi aspek keselamatan, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup 2) Kesanggupan memenuhi kewajiban badan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							usaha 3) Kesediaan dilakukan audit kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan 4) Kesanggupan badan usaha menjamin dan bertanggung					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jawab bahwa sarana dan fasilitas yang di-miliki/ di-kuasai layak ber-operasi dan mampu dijalan-kan sesuai dengan kaidah keteknik-kan yang baik selama masa operasi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5) Badan usaha bebas dari konflik atau permasalahan hukum lainnya dengan pihak lain 6) Dokumen persyaratan dan keterangan/pernyataan yang diberikan adalah benar					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							adanya dan apabila dikemudian hari terbukti tidak benar akan dicabut izin usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan 7) Kesanggupan menerima pe-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nunjukan dan penugasan dari Menteri untuk melaksanakan penyimpanan dalam rangka penyediaan cadangan penyangga energi dan pemenuhan kebutuhan minyak					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bumi di dalam negeri pada fasilitas dan sarana penyimpanan miliknya (untuk kegiatan usaha niaga minyak bumi) 8) Kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.D.170

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Menteri untuk melaksanakan penyimpanan dalam rangka penyediaan cadangan penyangga energi dan pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak di dalam					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							negeri pada fasilitas dan sarana penyimpanan miliknya (untuk kegiatan usaha niaga bahan bakar minyak) 9) Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesang-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							gupan badan usaha menerima penugasan dari Menteri untuk pemanfaatan secara bersama dengan pihak lain atas fasilitas yang dimiliki (untuk kegiatan usaha niaga					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							gas bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi) 10) Kesanggupan badan usaha menyediakan cadangan LPG minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perun-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dang-undangan yang besarnya dihitung dari rencana volume penjualan harian rata-rata (untuk kegiatan usaha niaga LPG) 11) Kesanggupan badan usaha menerima					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penugasan dari Menteri untuk penyediaan dan pendistribusian LPG (untuk kegiatan usaha niaga LPG) 12) Kesanggupan badan usaha menerima penugasan dari Menteri					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk pemanfaatan secara bersama dengan pihak lain atas fasilitas penyimpanan dan/atau pengangkutan LPG yang dimiliki dan/atau dikuasai termasuk					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penya-lurnya secara ber-sama dengan pihak lain (untuk kegiat-an usaha niaga LPG) dan/ atau 13) Kesang-gupan badan usaha menye-diakan cadang-an operasi-onal					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							LPG sesuai ketentuan peraturan yang berlaku (untuk kegiatan usaha niaga LPG 2. Persyaratan Teknis (Sementara) a. Analisis kelayakan usaha paling sedikit memuat rencana sumber pasokan,					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							calon konsumen, spesifikasi komoditas, lokasi, sarana dan fasilitas, skema usaha, Penggunan Tenaga Kerja Asing dan Tenaga Kerja Lokal, komitmen TKDN dan dokumen analisis keuangan meliputi rencana biaya investasi, harga beli,					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Komponen dan besaran LPG, LNG, BBG, dan/atau CNG, serta perhitung-an ke-ekonomian b. Kesepakat-an jual beli (MoU) Gas Bumi/ LNG/ CNG/LPG dengan pemasok yang telah memiliki perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Kesepakatan jual beli dengan konsumen yang telah memiliki perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan d. Rencana pemanfaatan atau pembangunan sarana dan fasilitas Niaga LPG, LNG, BBG, dan/atau CNG yang meliputi antara lain					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							teknologi yang digunakan, dimensi, kapasitas, serta sarana dan fasilitas dan data titik koordinat berupa Data *Geo-reference Standard Datum WGS84* e. Rencana merek dagang dan logo untuk kegiatan niaga LPG, BBG, CNG dan/atau					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							LNG retail f. Jaminan kecukupan pendanaan, yang dibuktikan dengan: 1) Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir 2) Dokumen kesepakatan dengan pihak lain untuk nominal tertentu atau 3) Surat ketera-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ngan dari bank umum yang berkedudukan di Indonesia, yang menerangkan bahwa Badan Usaha memiliki kemampuan pendanaan dengan nominal tertentu					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							g. SK Izin Usaha Sementara awal untuk permohonan perpanjangan Izin Usaha Sementara (apabila ada) 3. Persyaratan Teknis (Izin Usaha/ Perpanjangan Izin Usaha) a. Analisis kelayakan usaha paling sedikit memuat: 1) Sumber paso-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kan dan calon konsumen 2) Neraca Gas 3) Spesifikasi komoditas 4) Lokasi kegiatan usaha beserta data teknis sarana dan fasilitas beserta data titik koordinat berupa Data *Geore-*					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ference Standard Datum WGS84 5) Skema usaha dan rencana pengembangan usaha 6) Penggunan tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal dan 7) Dokumen analisis					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ke-uangan meliputi rincian biaya in-vestasi, kompo-nen dan besaran Harga Jual LPG, BBG, LNG dan/ atau CNG b. Dokumen pasokan berupa Penetapan alokasi gas bumi/LNG dari					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Menteri atau Perjanjan Jual Beli gas bumi/ LNG/CNG/ LPG dengan pemasok yang bukan kontraktor kontrak kerja sama hulu migas (Badan Usaha) yang telah memiliki perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							-undangan c. Dokumen kontrak jual beli LNG / CNG / LPG dengan konsumen akhir atau konsumen yang telah memiliki perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan d. Berita Acara Pemeriksaan Keselamatan Instalasi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan Peralatan terkait Fasilitas dan/atau Sarana yang ditandatangani oleh Petugas Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas/ PLO / COI yang masih berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan e. Bukti ke-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pemilikan/ penguasa-an atau kontrak sewa menyewa sarana dan fasilitas Untuk moda angkutan darat berupa stnk/bpkb Untuk moda ang-kutan/pe-nyimpanan laut berupa gross akta kapal Untuk fasilitas					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berupa tangki, pipa dokumen kepemilik-an berupa Surat pernyataan dari Direktur yang berwenang f. Bukti pen-daftaran atau sertifikat merek dagang dan logo LPG, BBG, CNG dan/atau LNG retail pada					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							instansi yang berwenang g. SK lzin Usaha Sementara dan/atau Izin Usaha/ Penyesuaian/ Perpanjangannya (apabila ada)					
22	46620	Perdagangan Besar Logam dan Bijih Logam	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin (Izin Pengangkutan dan Penjualan Minerba)	**Permohonan Baru** 1. Surat Permohonan 2. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan	14 Hari	1. Melaksanakan kegiatan pengangkutan dan penjualan mineral sesuai ketentuan tata cara pengangkutan dan penjualan termasuk menggunakan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan 3. Sumber pasokan batubara yang dibuktikan dengan salinan nota kesepahaman atau perjanjian kerjasama pengangkutan dan penjualan mineral yang masih berlaku dengan pemegang: a. IUP b. IUPK c. IUPK sebagai		sistem informasi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampaikan laporan kegiatan pengangkutan dan penjualan kepada Menteri sesuai dengan tata cara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Mengangkut dan menjual komoditas mineral atau batubara yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kelanjutan operasi kontrak/perjanjian d. KK e. IPR f. Izin Pengangkutan dan Penjualan mineral lainnya **Permohonan Perpanjangan** 1. Surat Permohonan 2. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha,		berasal dari pemegang izin yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Koperasi, atau perusahaan perseorangan 3. Sumber pasokan batubara yang dibuktikan dengan salinan nota kesepahaman atau perjanjian kerjasama pengangkutan dan penjualan mineral yang masih berlaku dengan pemegang: a. IUP b. IUPK c. IUPK sebagai kelanjutan operasi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kontrak/perjanjian d. KK e. IPR f. Izin Pengangkutan dan Penjualan mineral lainnya 4. Laporan akhir kegiatan pengangkutan dan penjualan					
23	46641	Perdagangan Besar Mineral Bukan Logam	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menenga - Besar	Tinggi	NIB dan Izin (Izin Pengangkutan dan Penjualan Minerba)	**Permohonan Baru** 1. Surat Permohonan 2. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik	14 Hari	1. Melaksanakan kegiatan pengangkutan dan penjualan mineral sesuai ketentuan tata cara pengangkutan dan penjualan termasuk menggunakan	Penetapan Pusat Penyedia Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong	Ruang lingkup pengangkutan dan penjualan lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan
											Ruang lingkup pengangkutan dan	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							manfaat dari Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan 3. Sumber pasokan mineral yang dibuktikan dengan salinan nota kesepahaman atau perjanjian kerjasama pengangkutan dan penjualan yang masih berlaku dengan pemegang: a. IUP b. KK c. IPR d. Izin Pengangku		sistem informasi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampai-kan laporan kegiatan pengangkutan dan penjualan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangann ya sesuai dengan tata cara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan		penjualan dalam 1 provinsi	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tan dan Penjualan mineral lainnya **Permohonan Perpanjangan** 1. Surat Permohonan 2. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan 3. Sumber pasokan mineral yang dibuktikan dengan		3. Mengangkut dan menjual komoditas mineral yang berasal dari pemegang izin yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							salinan nota kesepahaman atau perjanjian kerjasama pengangkutan dan penjualan mineral yang masih berlaku dengan pemegang: a. IUP b. KK c. IPR d. Izin Pengangkutan dan Penjualan mineral lainnya 4. Laporan akhir kegiatan pengangkutan dan penjualan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
24	05100	Pertambangan Batubara	Kelompok ini mencakup usaha operasi pertambangan, pengeboran berbagai kualitas batu bara seperti antrasit, bituminous dan subbitominous baik pertambangan di permukaan tanah atau bawah tanah, termasuk pertambangan dengan	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	**IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan 2. NIB dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi, atau Perusahaan perseorangan dalam hal terjadi Pemutakhiran data	1. IUP/IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi : 14 Hari 2. IUP/ IUPK Tahap Kegiatan Operasi Produksi : 14 Hari 3. Perpanjangan IUP/ IUPK : 14 Hari 4. IUPK sebagai ke-	1. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Laporan Akhir Eksplorasi 3. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan akhir Laporan Studi Kelayakan	Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			cara pencairan *(liquefaction)*. Operasi pertambangan tersebut meliputi penggalian, penghancuran, pencucian, penyaringan dan pencampuran serta pemadatan untuk meningkatkan kualitas atau memudahkan pengangkutan dan				4. Surat pernyataan dari ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun 5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	lanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian 14 Hari 5. Perpanjangan IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak /Perjanjian: 14 Hari	4. Mendapatkan persetujuan Izin Lingkungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Menyelesaikan Hak Atas Tanah sebelum melakukan Kegiatan Operasi pertambangan 6. Menyampaikan dan melaksanakan sesuai Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			penyimpanan/penampungan. Termasuk pencarian batu bara dari kumpulan tepung bara (*culm bank*)				6. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi 7. Bukti Pembayaran nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP Batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang 8. Surat keterangan Fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-		Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 7. Menyampaikan, mendapatkan persetujuan, dan melaksanakan sesuai Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca tambang serta penempatan jaminannya 8. Melaksanakan pemasangan, pemeliharaan dan perawatan tanda batas			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							undangan di bidang perpajakan **IUPK Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan 2. NIB dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta dalam hal terjadi		WIUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 9. Menyampai-kan Laporan Akhir Operasi Produksi dalam rangka permohonan perpanjangan IUP tahap Kegiatan Operasi Produksi 10. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala sesuai tahap kegiatan IUP kepada Direktur Jenderal			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pemutakhiran data 4. Surat Pernyataan dari ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun 5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan		11. Memenuhi kebutuhan batubara dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 12. Memenuhi kewajiban penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 13. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Menteri atau Gubernur sesuai kewenangann			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lingkungan hidup 6. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi 7. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan 8. Bukti pembayaran nilai kompensasi data informasi		ya atas perubahan pemegang saham badan usaha perseroan terbatas 14. Melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 15. Menyampaikan, mendapatkan persetujuan, dan melaksanakan sesuai Rencana Pengembangan Mikro, Kecil,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Perpanjangan IUP/IUPK Tahap Kegiatan Eksplorasi 1. Surat Permohonan 2. Kajian kendala berdasarkan kriteria teknis yang ditentukan 3. Rencana kegiatan dan anggaran biaya Eksplorasi jangka panjang yang dijabarkan dalam tiap semester selama jangka waktu		Menengah, Besar Wilayah serta Rencana Pengembangan dan/atau Pemanfaatan Batubara khusus bagi pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian dan 16. Melaksanakan Kewajiban lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							permohonan perpanjangan 4. Menempatkan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi pada bank pemerintah **IUP/IUPK Tahap Kegiatan Operasi Produksi** 1. Surat Permohonan Peningkatan Tahap 2. Nomor induk berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Peta usulan WIUP tahap Kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional 5. Laporan lengkap tahap Kegiatan Eksplorasi 6. Laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui oleh Menteri 7. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan 8. Dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pasca tambang 9. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 10. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							undangan di bidang perpajakan 11. Bukti pelunasan iuran tetap tahap Kegiatan Eksplorasi tahun terakhir **Perpanjangan IUP/IUPK tahap Kegiatan Operasi Produksi** Paling sedikit meliputi: 1. Surat Permohonan Perpanjangan 2. Peta dan batas koordinat wilayah					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah 3 (tiga) tahun terakhir: 4. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 5. Rencana kerja selama masa perpanjangan 6. Laporan akhir Kegiatan Operasi Produksi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							7. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan Reklamasi 8. Neraca Sumber Daya dan Cadangan **IUPK Sebagai Kelanjutan Kontrak/ Perjanjian** 1. Surat Permohonan 2. NIB dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							manfaat Badan Usaha dari pemegang PKP2B 4. Rencana pengembang-an Seluruh wilayah yang telah disetujui yang memuat paling sedikit peta dan batas koordinat wilayah 5. Neraca Sumber Daya dan Cadangan 6. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang Kegiatan Operasi Produksi yang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berada dalam WIUPK atau di luar WIUPK 7. Persetujuan dokumen lingkungan hidup yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 8. Dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pasca tambang 9. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							telah diaudit oleh akuntan publik 10. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir 11. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **Perpanjangan IUPK sebagai Kelanjutan Kontrak/ Perjanjian**					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.D.219

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1. Surat Permohonan 2. Peta dan batas koordinat wilayah 3. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir 4. Laporan akhir Kegiatan Operasi Produksi 5. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan 6. RKAB 7. Neraca Sumber Daya dan Cadangan					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.D.220

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
25	07101	Pertambangan Pasir Besi	Kelompok ini mencakup usaha pertambangan pasir besi. Termasuk kegiatan sortasi, pemisahan, dan pembersihannya	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	**IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan 2. NIB dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi, atau Perusahaan perseorangan dalam hal terjadi	1. IUP/ IUPK Tahap Kegiatan Eksplorasi : 14 Hari 2. Perpanjangan IUP/ IUPK Tahap Kegiatan Eksplorasi : 14 Hari 3. IUP/ IUPK Tahap Kegia-	**Kewajiban IUP/IUPK/IUPK Kelanjutan Perjanjian/ Kontrak** 1. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sesuai tahap kegiatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan	Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama	IUP IUPK IUPK Kelanjutan Kontrak dan Perjanjian	Menteri/ Kepala Badan
											Izin Pertambangan Rakyat	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Pemutakhiran data 4. Surat pernyataan dari ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun 5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan	tan Operasi Produksi : 14 Hari 4. Perpanjangan IUP/ IUPK : 14 Hari 5. IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak /Perjanjian : 14 Hari 6. Perpanjangan IUPK sebagai	Laporan Akhir Eksplorasi 3. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan akhir Laporan Studi Kelayakan 4. Mendapatkan persetujuan Izin Lingkungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Menyelesaikan Hak Atas Tanah sebelum melakukan Kegiatan Operasi pertambangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lingkungan hidup 6. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi 7. Bukti pembayaran nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam sesuai dengan nilai penawaran lelang 8. Surat keterangan fiskal sesuai dengan	kelanjutan Operasi Kontrak /Perjanjian: 14 Hari 7. Izin Pertambangan Rakyat : 14 Hari (jangka waktu tidak termasuk pelaksanaan kunjungan lapangan)	6. Menyampaikan dan melaksanakan sesuai Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 7. Menyampaikan, mendapatkan persetujuan, dan melaksanakan Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca tambang serta			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **IUPK Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor induk berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan		penempatan jaminannya 8. Melaksanakan pemasangan, pemeliharaan dan perawatan tanda batas WIUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 9. Menyampaikan Laporan Akhir Operasi Produksi dalam rangka permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi 10. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala sesuai			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							daftar pemilik manfaat dari BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Surat Pernyataan dari ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun 5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan		tahap kegiatan IUP kepada Direktur Jenderal 11. Memenuhi kebutuhan mineral dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 12. Memenuhi kewajiban penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 13. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 6. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi 7. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang		Menteri atas perubahan pemegang saham badan usaha perseroan terbatas 14. Melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 15. Menyampai-kan, mendapatkan persetujuan, dan melaksanakan sesuai Rencana Pengemba-ngan Seluruh			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perpajakan dan 8. Bukti pembayaran nilai kompen-sasi data informasi **Perpanjangan IUP/IUPK Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan 2. Kajian kendala berdasarkan kriteria teknis yang ditentukan 3. Rencana kegiatan dan		Wilayah khusus bagi pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian 16. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **Kewajiban IPR** 1. Melakukan kegiatan Penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							anggaran biaya eksplorasi jangka panjang yang dijabarkan dalam tiap semester selama jangka waktu permohonan perpanjangan dan 4. Menempatkan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi pada bank pemerintah **IUP/IUPK Tahap Kegiatan Operasi Produksi**		2. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan Pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku 3. Mengelola lingkungan hidup bersama Gubernur 4. Membayar iuran Pertambangan rakyat dan 5. Menyampai-kan laporan pelaksanaan kegiatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1. Surat Permohonan 2. Nomor induk berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data		Usaha Pertambangan rakyat secara berkala kepada Gubernur 6. Wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan 7. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Peta usulan WIUP tahap Kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional 5. Laporan lengkap tahap Kegiatan Eksplorasi 6. Laporan Studi Kelayakan yang telah					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							disetujui oleh menteri 7. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan 8. Dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pasca tambang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							9. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 10. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 11. Bukti pelunasan iuran tetap tahap Kegiatan Eksplorasi tahun terakhir					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Perpanjangan IUP/IUPK tahap Kegiatan Operasi Produksi Paling sedikit harus dilengkapi: 1. Surat Permohonan 2. Peta dan batas koordinat wilayah 3. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah 3 (tiga) tahun terakhir 4. Surat keterangan fiskal sesuai						

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 5. Rencana kerja selama masa perpanjangan 6. Laporan akhir Kegiatan Operasi Produksi 7. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan Reklamasi 8. Neraca Sumber Daya dan Cadangan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							IUPK Sebagai Kelanjutan Kontrak/ Perjanjian 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat badan usaha dari pemegang KK 4. Rencana pengembangan seluruh wilayah yang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							telah disetujui yang memuat paling sedikit peta dan batas koordinat wilayah 5. Neraca Sumber Daya dan Cadangan 6. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang Kegiatan Operasi Produksi yang berada dalam WIUPK atau di luar WIUPK 7. Persetujuan dokumen lingkungan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hidup yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 8. Dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pasca tambang 9. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							10. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir 11. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **Perpanjangan IUPK sebagai Kelanjutan Kontrak/ Perjanjian**					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.D.238

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1. Surat Permohonan 2. Peta dan batas koordinat wilayah 3. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir 4. Laporan akhir Kegiatan Operasi Produksi 5. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan 6. RKAB					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							7. Neraca Sumber Daya dan Cadangan **Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk d. Surat keterangan dari					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kelurahan/ desa setempat yang menyata-kan pemohon merupakan penduduk setempat dan melakukan kegiatan per-tambangan rakyat e. Surat per-nyataan kesang-gupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							-undangan di bidang perlindu-ngan dan pengelola-an lingkungan hidup serta keselama-tan per-tambangan f. Surat kete-rangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Koperasi a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk pengurus koperasi dilengkapi dengan salinan kartu tanda penduduk anggota koperasi d. Surat keterangan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dari kelurahan/ desa setempat yang menyata-kan seluruh pengurus dan anggota koperasi merupakan penduduk setempat dan anggota koperasi merupakan penam-bang rakyat e. Surat pernyataan kesanggu-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta keselamatan pertambangan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							di bidang perpajakan **Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. Surat Permohonan b. Peta dan batas koordinat wilayah c. Bukti pelunasan iuran pertambangan rakyat					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. Laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) dan e. Rencana penambangan selama perpanjangan 2. Koperasi a. Surat Permohonan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Peta dan batas koordinat wilayah c. Bukti pelunasan iuran pertambangan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. Laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan)					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							e. Rencana penambangan selama perpanjangan dan f. Susunan pengurus					
26	07102	Pertambangan Bijih Besi	Kelompok ini mencakup usaha pertambangan bijih besi termasuk kegiatan peningkatan mutu dan aglomerasi bijih besi serta	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	**IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan	1 IUP/ IUPK Tahap Kegiatan Eksplorasi : 14 Hari 2 Perpanjangan IUP/ IUPK Tahap Kegiatan Eksplo-	**Kewajiban IUP/IUPK/IUPK Kelanjutan Perjanjian/ Kontrak** 1. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sesuai tahap kegiatan, sesuai ketentuan	Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama	IUP IUPK	Menteri/ Kepala Badan
											Izin Pertambangan Rakyat	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			konsentrat nya.				daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi, atau Perusahaan perseorangan dalam hal terjadi Pemutakhiran data 4. Surat pernyataan dari ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengala-man paling singkat 3 (tiga) tahun 5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan	rasi : 14 Hari 3 IUP/ IUPK Tahap Kegia-tan Operasi Produk-si : 14 Hari 4 Perpan-jangan IUP/ IUPK : 14 Hari 5 Izin Pertam-bangan Rakyat : 14 Hari (jangka waktu	peraturan perundang-undangan 2. Menyampai-kan dan mendapatkan persetujuan Laporan Akhir Eksplorasi 3. Menyampai-kan dan mendapatkan persetujuan akhir Laporan Studi Kelayakan 4. Mendapatkan persetujuan Izin Lingkungan, sesuai ketentuan peraturan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 6. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi 7. Bukti Pembayaran nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP Mineral logam sesuai dengan nilai	tidak termasuk pelaksanaan kunjungan lapangan)	perundang-undangan 5. Menyelesaikan Hak Atas Tanah sebelum melakukan Kegiatan Operasi pertambangan 6. Menyampaikan dan melaksanakan sesuai Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai ketentuan peraturan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penawaran lelang 8. Surat keterangan Fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **IUPK Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data		perundang-undangan 7. Menyampaikan, mendapatkan persetujuan, dan melaksanakan Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca tambang serta penempatan jaminannya 8. Melaksanakan pemasangan, pemeliharaan dan perawatan tanda batas WIUP sesuai ketentuan peraturan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Surat pernyataan dari ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun 5. Surat pernyataan		perundang-undangan 9. Menyampaikan Laporan Akhir Operasi Produksi dalam rangka permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi 10. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala sesuai tahap kegiatan IUP kepada Direktur Jenderal 11. Memenuhi kebutuhan mineral dalam negeri sesuai			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 6. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi 7. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan		ketentuan peraturan perundang-undangan 12. Memenuhi kewajiban penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 13. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Menteri atas perubahan pemegang saham badan usaha perseroan terbatas			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perundang-undangan di bidang perpajakan dan 8. Bukti pembayaran nilai kompensasi data informasi **Perpanjangan IUP/IUPK Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan 2. Kajian kendala berdasarkan kriteria teknis yang ditentukan 3. Rencana kegiatan dan		14. Melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 15. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **Kewajiban IPR** 1. Melakukan kegiatan Penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							anggaran biaya eksplorasi jangka panjang yang dijabarkan dalam tiap semester selama jangka waktu oermohonan perpanjangan dan 4. Menempatkan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi pada bank pemerintah **IUP/IUPK Tahap Kegiatan**		setelah IPR diterbitkan 2. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan Pertambang-an, penge-lolaan lingku-ngan, dan memenuhi standar yang berlaku 3. Mengelola lingkungan hidup bersama Gubernur 4. Membayar iuran			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Operasi Produksi 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi		Pertambangan rakyat dan 5. Menyampai-kan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat secara berkala kepada Gubernur 6. Wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan 7. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pemutakhiran data 4. Peta usulan WIUP tahap Kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional 5. Laporan lengkap tahap Kegiatan Eksplorasi 6. Laporan Studi Kelayakan		perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang telah disetujui oleh menteri 7. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 8. Dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pasca tambang 9. Laporan keuangan 3					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 10. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 11. Bukti pelunasan iuran tetap tahap Kegiatan Eksplorasi tahun terakhir **Perpanjangan IUP/IUPK tahap**					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Kegiatan Operasi Produksi Paling sedikit harus dilengkapi: 1. Surat Permohonan 2. Peta dan batas koordinat wilayah 3. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah 3 (tiga) tahun terakhir: 4. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perundang-undangan di bidang perpajakan 5. Rencana kerja selama masa perpanjangan 6. Laporan akhir Kegiatan Operasi Produksi 7. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan Reklamasi 8. Neraca Sumber Daya dan Cadangan **Izin Pertambangan Rakyat**					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.D.262

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1. Orang Perorangan a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk d. Surat keterangan dari kelurahan/ desa setempat yang menyatakan pemohon merupakan penduduk					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							setempat dan melakukan kegiatan pertambangan rakyat e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pertambangan dan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 2. Koperasi a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penduduk pengurus koperasi dilengkapi dengan salinan kartu tanda penduduk anggota koperasi d. Surat keterangan dari kelurahan/ desa setempat yang menyata-kan seluruh pengurus dan anggota					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							koperasi merupakan penduduk setempat dan anggota koperasi merupakan penambang rakyat e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lingkungan serta keselamatan pertambangan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Surat Permohonan b. Peta dan batas koordinat wilayah c. Bukti pelunasan iuran pertambangan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. Laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lingkungan) dan e. Rencana penambangan selama perpanjangan 2. Koperasi a. Surat Permohonan b. Surat permohonan c. Peta dan batas koordinat wilayah d. Bukti pelunasan iuran pertamba-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ngan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir e. Laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelola-an lingku-ngan) f. Rencana penamba-ngan selama perpanja-ngan dan g. Susunan pengurus					
27	07291	Pertam-bangan	Kelompok ini mencakup	- Mikro - Kecil	Tinggi	NIB dan Izin		1. IUP/IUP Tahap Kegiatan	**Kewajiban IUP/IUPK**	Penyim-panan Mineral	IUP IUPK	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.D.271

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Bijih Timah	usaha pertambangan bijih timah.	- Menengah - Besar			**IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat . Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi, atau Perusahaan perseorangan dalam hal terjadi	Eksplorasi : 14 Hari 2. Perpanjangan IUP/ IUPK Tahap Kegiatan Eksplorasi : 14 Hari 3. IUP/ IUPK Tahap Kegiatan Operasi Produksi : 14 Hari 4. Perpanjangan IUP/	1. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sesuai tahap kegiatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Laporan Akhir Eksplorasi 3. Menyampaikan data sumberdaya dan cadangan yang terverifikasi	Ikutan Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama	Izin Pertambangan Rakyat	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Pemutakhiran data 4. Surat pernyataan dari ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun 5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan	IUPK : 14 Hari 5. Izin Pertambangan Rakyat : 14 Hari (jangka waktu tidak termasuk pelaksanaan kunjungan lapangan)	oleh competent person 4. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan akhir Laporan Studi Kelayakan 5. Mendapatkan persetujuan Izin Lingkungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Menyelesaikan Hak Atas Tanah sebelum melakukan Kegiatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lingkungan hidup 6. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi 7. Bukti Pembayaran nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP Mineral logam sesuai dengan nilai penawaran lelang 8. Surat keterangan Fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan		Operasi pertambangan 7. Menyampai-kan dan melaksanakan sesuai Rencana Induk Pengemba-ngan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 8. Menyampai-kan, mendapatkan persetujuan, dan melaksanakan Rencana Reklamasi dan Rencana			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perundang-undangan di bidang perpajakan **IUPK Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pernegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari BUMN, BUMD, atau		Pasca tambang serta penempatan jaminannya 9. Melaksanakan pemasangan, pemeliharaan dan perawatan tanda batas WIUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 10. Menyampai-kan Laporan Akhir Operasi Produksi dalam rangka permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi 11. Melaporkan kegiatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							badan usaha swasta dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Surat pernyataan dari ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun 5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan		usaha secara berkala sesuai tahap kegiatan IUP kepada Direktur Jenderal 12. Memenuhi kebutuhan mineral dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 13. Memenuhi kewajiban penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 14. Menyampaikan dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan pengelolaan lingkungan hidup 6. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi 7. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan 8. Bukti pembayaran nilai		mendapatkan persetujuan Menteri atas perubahan pemegang saham badan usaha perseroan terbatas 15. Melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 16. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kompensasi data informasi **Perpanjangan IUP/IUPK Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan 2. Kajian kendala berdasarkan kriteria teknis yang ditentukan 3. Rencana kegiatan dan anggaran biaya eksplorasi jangka panjang yang dijabarkan dalam tiap semester		**Kewajiban IPR** 1. Melakukan kegiatan Penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan 2. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan Pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku 3. Mengelola lingkungan hidup			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							selama jangka waktu oermohonan perpanjangan dan 4. Menempatkan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi pada bank pemerintah **IUP/IUPK Tahap Kegiatan Operasi Produksi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi		bersama Gubernur 4. Membayar iuran Pertambangan rakyat dan 5. Menyampai-kan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat secara berkala kepada Gubernur 6. Wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan 7. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan 4. Peta usulan WIUP tahap Kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan		peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional 5. Laporan lengkap tahap Kegiatan Eksplorasi 6. Laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui oleh menteri 7. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ketentuan peraturan perundang undangan 8. Dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pasca tambang 9. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 10. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bidang perpajakan 11. Bukti pelunasan iuran tetap tahap Kegiatan Eksplorasi tahun terakhir **Perpanjangan IUP/IUPK Tahap Kegiatan Operasi Produksi** Paling sedikit harus dilengkapi: 1. Surat Permohonan 2. Peta dan batas koordinat wilayah					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah 3 (tiga) tahun terakhir: 4. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 5. Rencana kerja selama masa perpanjangan 6. Laporan akhir Kegiatan Operasi Produksi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							7. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan Reklamasi 8. Neraca Sumber Daya dan Cadangan **Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. Surat Permoho-nan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tanda penduduk d. Surat keterangan dari kelurahan/ desa setempat yang menyata-kan pemohon merupakan penduduk setempat dan melakukan kegiatan pertamba-ngan rakyat e. Surat pernyataan kesanggu-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan pertambangan dan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perundang-undangan di bidang perpajakan 2. Koperasi a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk pengurus koperasi dilengkapi dengan salinan kartu tanda penduduk					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							anggota koperasi d. Surat keterangan dari kelurahan/ desa setempat yang menyata-kan seluruh pengurus dan anggota koperasi merupakan penduduk setempat dan anggota koperasi merupakan penam-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bang rakyat e. Surat pernyataan kesanggu-pan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindu-ngan dan pengelola-an lingkungan serta keselama-tan pertamba-ngan f. Surat keterangan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. Surat Permohonan b. Peta dan batas koordinat wilayah					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Bukti pelunasan iuran pertambangan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. Laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) dan e. Rencana penambangan selama perpanjangan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Koperasi a. Surat Permohonan b. Peta dan batas koordinat wilayah c. Bukti pelunasan iuran pertambangan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. Laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelola-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							an lingkungan) e. Rencana penambangan selama perpanjangan dan f. Susunan pengurus					
28	07292	Pertambangan Bijih Timah Hitam	Kelompok ini mencakup usaha pertambangan bijih timah hitam.	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	**IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar	1. IUP/IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi : 14 Hari 2. Perpanjangan IUP/ IUPK Tahap Kegiatan Eksplo-	**Kewajiban IUP/IUPK/IUPK Kelanjutan Perjanjian/ Kontrak** 1. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sesuai tahap kegiatan,	Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama	IUP IUPK IUPK Kelanjutan Kontrak dan Perjanjian	Menteri/ Kepala Badan
											Izin Pertambangan Rakyat	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi, atau Perusahaan perseorangan dalam hal terjadi Pemutakhiran data 4. Surat pernyataan dari ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun 5. Surat pernyataan kesanggupan untuk	rasi : 14 Hari 3. IUP/ IUPK Tahap Kegiatan Operasi Produksi : 14 Hari 4. Perpanjangan IUP/ IUPK : 14 Hari 5. IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak / Per-	sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Laporan Akhir Eksplorasi 3. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan akhir Laporan Studi Kelayakan 4. Mendapatkan persetujuan Izin Lingkungan, sesuai ketentuan peraturan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 6. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi 7. Bukti Pembayaran nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP Mineral logam sesuai	janjian : 14 Hari 6. Perpanjangan IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak /Perjanjian: 14 hari 7. Izin Pertambangan Rakyat : 14 Hari (jangka waktu tidak termasuk pelaksa-	perundang-undangan 5. Menyelesaikan Hak Atas Tanah sebelum melakukan Kegiatan Operasi pertambangan 6. Menyampaikan dan melaksanakan sesuai Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dengan nilai penawaran lelang 8. Surat keterangan Fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **IUPK Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data	naan kunjungan lapangan)	7. Menyampaikan, mendapatkan persetujuan, dan melaksanakan Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca tambang serta penempatan jaminannya 8. Melaksanakan pemasangan, pemeliharaan dan perawatan tanda batas WIUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 9. Menyampaikan Laporan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Susunan pengurus, daftar pernegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari bumn, BUMD, atau badan usaha swasta dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Surat pernyataan dari ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengala-man paling singkat 3 (tiga) tahun 5. Surat pernyataan		Akhir Operasi Produksi dalam rangka permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi 10. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala sesuai tahap kegiatan IUP kepada Direktur Jenderal 11. Memenuhi kebutuhan mineral dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 12. Memenuhi kewajiban			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 6. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi 7. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan		penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 13. Menyampai-kan dan mendapatkan persetujuan Menteri atas perubahan pemegang saham badan usaha perseroan terbatas 14. Melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar sesuai ketentuan peraturan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perundang-undangan di bidang perpajakan dan 8. Bukti pembayaran nilai kompensasi data informasi **Perpanjangan IUP/IUPK Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan 2. Kajian kendala berdasarkan kriteria teknis yang ditentukan 3. Rencana kegiatan dan		perundang-undangan 15. Menyampaikan, mendapatkan persetujuan, dan melaksanakan sesuai Rencana Pengembangan Seluruh Wilayah khusus bagi pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian 16. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							anggaran biaya eksplorasi jangka panjang yang dijabarkan dalam tiap semester selama jangka waktu permohonan perpanjangan dan 4. Menempatkan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi pada bank pemerintah **IUP/IUPK Tahap Kegiatan**		perundang-undangan **Kewajiban IPR** 1. Melakukan kegiatan Penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan 2. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan Pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.D.301

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Operasi Produksi 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi		3. mengelola lingkungan hidup bersama Gubernur 4. membayar iuran Pertambangan rakyat dan 5. menyampai-kan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat secara berkala kepada Gubernur 6. Wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan 7. Melaksanakan kewajiban			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pemutakhiran data 4. Peta usulan WIUP tahap Kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional 5. Laporan lengkap tahap Kegiatan Eksplorasi 6. Laporan Studi Kelayakan		lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang telah disetujui oleh menteri 7. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan 8. Dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pasca tambang 9. Laporan keuangan 3					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 10. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 11. Bukti pelunasan iuran tetap tahap Kegiatan Eksplorasi tahun terakhir **Perpanjangan IUP/IUPK Tahap**					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Kegiatan Operasi Produksi Paling sedikit harus dilengkapi: 1. Surat Permohonan 2. Peta dan batas koordinat wilayah 3. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah 3 (tiga) tahun terakhir 4. Surat keterangan fiskal sesuai dengan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 5. Rencana kerja selama masa perpanjangan 6. Laporan akhir Kegiatan Operasi Produksi 7. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan Reklamasi 8. Neraca Sumber Daya dan Cadangan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							IUPK Sebagai Kelanjutan Kontrak/ Perjanjian 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat badan usaha dari pemegang kk 4. Rencana pengembangan seluruh wilayah yang telah disetujui yang memuat					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							paling sedikit peta dan batas koordinat wilayah 5. Neraca Sumber Daya dan Cadangan 6. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang Kegiatan Operasi Produksi yang berada dalam WIUPK atau di luar WIUPK 7. Persetujuan dokumen lingkungan hidup yang diterbitkan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 8. Dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pasca tambang 9. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 10. Bukti pelunasan iuran tetap					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir 11. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **Perpanjangan IUPK sebagai Kelanjutan Kontrak/ Perjanjian** Paling sedikit harus dilengkapi:					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.D.311

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1. Surat Permohonan 2. Peta dan batas koordinat wilayah 3. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah 3 (tiga) tahun terakhir 4. Laporan akhir Kegiatan Operasi Produksi 5. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan 6. RKAB					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							7. Neraca Sumber Daya dan Cadangan **Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. Surat Permoho-nan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk d. Surat keterangan dari kelurahan/					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							desa setempat yang menyata-kan pemohon merupakan penduduk setempat dan melakukan kegiatan pertamba-ngan rakyat e. Surat pernyataan kesanggu-pan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							di bidang perlindu-ngan dan pengelola-an lingkungan hidup serta keselama-tan pertamban gan dan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan di bidang perpajakan 2. Koperasi					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.D.315

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk pengurus koperasi dilengkapi dengan salinan kartu tanda penduduk anggota koperasi d. Surat keterangan dari kelurahan/					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							desa setempat yang menyata-kan seluruh pengurus dan anggota koperasi merupakan penduduk setempat dan anggota koperasi merupakan penamba-ng rakyat e. Surat pernyataan kesanggu-pan untuk mematuhi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta keselamatan pertambangan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							di bidang perpajakan **Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. Surat Permohonan b. Peta dan batas koordinat wilayah c. Bukti pelunasan iuran pertambangan rakyat					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. Laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelola-an lingkung-an) dan e. Rencana penamba-ngan selama perpanja-ngan 2. Koperasi a. Surat Permoho-nan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Peta dan batas koordinat wilayah c. Bukti pelunasan iuran pertambangan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. Laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) e. Rencana penambangan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							selama perpanjangan dan f. Susunan pengurus					
29	07293	Pertambangan Bijih Bauksit	Kelompok ini mencakup usaha pertambangan dan penampungan bijih bauksit	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan izin	**IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha,	1. IUP/IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi : 14 Hari 2. Perpanjangan IUP/ IUPK Tahap Kegiatan Eksplorasi : 14 Hari	**Kewajiban IUP/IUPK** 1. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sesuai tahap kegiatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampaikan dan mendapatkan	Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama	IUP IUPK	Menteri/ Kepala Badan
											Izin Pertambangan Rakyat	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Koperasi, atau Perusahaan perseorangan dalam hal terjadi Pemutakhiran data 4. Surat pernyataan dari ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun 5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di	3. IUP/ IUPK Tahap Kegiatan Operasi Produksi : 14 Hari 4. Perpanjangan IUP/ IUPK : 14 Hari 5. Izin Pertambangan Rakyat : 14 Hari (jangka waktu tidak termasuk	persetujuan Laporan Akhir Eksplorasi 3. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan akhir Laporan Studi Kelayakan 4. Mendapatkan persetujuan Izin Lingkungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Menyelesaikan Hak Atas Tanah sebelum melakukan Kegiatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 6. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi 7. Bukti Pembayaran nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP Mineral logam sesuai dengan nilai penawaran lelang 8. Surat keterangan	pelaksanaan kunjungan lapangan)	Operasi pertambangan 6. Menyampaikan dan melaksanakan sesuai Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 7. Menyampaikan, mendapatkan persetujuan, dan melaksanakan Rencana Reklamasi dan Rencana			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **IUPK Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan 2. Susunan pengurus, daftar pernegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta dalam		Pasca tambang serta penempatan jaminannya 8. Melaksanakan pemasangan, pemeliharaan dan perawatan tanda batas WIUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 9. Menyampai-kan Laporan Akhir Operasi Produksi dalam rangka permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi 10. Melaporkan kegiatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hal terjadi pemutakhiran data 3. Surat pernyataan dari ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengala-man paling singkat 3 (tiga) tahun 4. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan		usaha secara berkala sesuai tahap kegiatan IUP kepada Direktur Jenderal 11. Memenuhi kebutuhan mineral dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 12. Memenuhi kewajiban penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 13. Menyampai-kan dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lingkungan hidup 5. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi 6. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan 7. Bukti pembayaran nilai kompensasi data informasi		mendapatkan persetujuan Menteri atas perubahan pemegang saham badan usaha perseroan terbatas 14. Melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 15. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Perpanjangan IUP/IUPK Tahap Kegiatan Eksplorasi 1. Surat Permohonan 2. Kajian kendala berdasarkan kriteria teknis yang ditentukan 3. Rencana kegiatan dan anggaran biaya eksplorasi jangka panjang yang dijabarkan dalam tiap semester selama jangka waktu		perundang-undangan **Kewajiban IPR** 1. Melakukan kegiatan Penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan 2. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan Pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku 3. Mengelola lingkungan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							oermohonan perpanjangan dan 4. Menempatkan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi pada bank pemerintah **IUP/IUPK Tahap Kegiatan Operasi Produksi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data		hidup bersama Gubernur 4. Membayar iuran Pertambangan rakyat dan 5. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat secara berkala kepada Gubernur 6. Wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan 7. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Peta usulan WIUP tahap Kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan		ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional 5. Laporan lengkap tahap Kegiatan Eksplorasi 6. Laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui oleh menteri 7. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan 8. Dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pasca tambang 9. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 10. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							undangan di bidang perpajakan 11. Bukti pelunasan iuran tetap tahap Kegiatan Eksplorasi tahun terakhir **Perpanjangan IUP/IUPK Tahap Kegiatan Operasi Produksi** Paling sedikit harus dilengkapi: 1. Surat Permohonan 2. Peta dan batas koordinat wilayah					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah 3 (tiga) tahun terakhir: 4. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 5. Rencana kerja selama masa perpanjangan 6. Laporan akhir Kegiatan Operasi Produksi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							7. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan Reklamasi 8. Neraca Sumber Daya dan Cadangan **Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tanda penduduk d. Surat keterangan dari kelurahan/ desa setempat yang menyata-kan pemohon merupakan penduduk setempat dan melakukan kegiatan pertamban gan rakyat e. Surat pernyataan kesanggu-pan untuk					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindung-an dan pengelola-an lingkungan hidup serta keselama-tan pertamba-ngan dan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							-undangan di bidang perpajakan 2. Koperasi a. Surat Permoho-nan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk pengurus koperasi dilengkapi dengan salinan kartu tanda penduduk					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							anggota koperasi d. Surat keterangan dari kelurahan/ desa setempat yang menyata-kan seluruh pengurus dan anggota koperasi merupakan penduduk setempat dan anggota koperasi merupakan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penambang rakyat e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta keselamatan pertambangan f. Surat keterangan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. Surat Permohonan b. Peta dan batas koordinat wilayah					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Bukti pelunasan iuran pertambangan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. Laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) dan e. Rencana penambangan selama perpanjangan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Koperasi a. Surat Permohonan b. Peta dan batas koordinat wilayah c. Bukti pelunasan iuran pertambangan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. Laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lingkungan) e. Rencana penambangan selama perpanjangan dan f. Susunan pengurus					
30	07294	Pertambangan Bijih Tembaga	Kelompok ini mencakup usaha pertambangan bijih tembaga,	- Mikro, - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	**IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha	1. IUP/IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi : 14 Hari	**Kewajiban IUP/IUPK/IUPK Kelanjutan Perjanjian/ Kontrak** 1. Menyampaikan dan	Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif sebagai	IUP IUPK IUPK Kelanjutan Kontrak dan Perjanjian	Menteri

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			yang terdiri dari kalkosit serta batuan berupa campuran monticellit dan skarnyakut				dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi, atau Perusahaan perseorangan dalam hal terjadi Pemutakhiran data 4. Surat pernyataan dari ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengala-	2. Perpan-jangan IUP/ IUPK Tahap Kegiatan Eksplo-rasi : 14 Hari 3. IUP/ IUPK Tahap Kegiatan Operasi Produk-si : 14 Hari 4. Perpan-jangan IUP/ IUPK : 14 Hari	mendapatkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sesuai tahap kegiatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampai-kan dan mendapatkan persetujuan Laporan Akhir Eksplorasi 3. Menyampai-kan dan mendapatkan persetujuan akhir Laporan	Penun-jang Kegiatan Utama	Izin Pertamba-ngan Rakyat	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							man paling singkat 3 (tiga) tahun 5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 6. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi	5. IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak / Perjanjian : 14 Hari 6. Perpanjangan IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak / Perjanjian: 14 Hari 7. Izin Pertambangan	Studi Kelayakan 4. Mendapatkan persetujuan Izin Lingkungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Menyelesaikan Hak Atas Tanah sebelum melakukan Kegiatan Operasi pertambangan 6. Menyampaikan dan melaksanakan sesuai Rencana			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							7. Bukti Pembayaran nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP Mineral logam sesuai dengan nilai penawaran lelang 8. Surat keterangan Fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **IUPK Tahap Kegiatan Eksplorasi**	Rakyat : 14 Hari (jangka waktu tidak termasuk pelaksanaan kunjungan lapangan)	Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 7. Menyampaikan, mendapatkan persetujuan, dan melaksanakan Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca tambang serta penempatan jaminannya 8. Melaksanakan pemasangan,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pernegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Surat pernyataan dari ahli pertambangan		pemeliharaan dan perawatan tanda batas WIUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 9. Menyampaikan Laporan Akhir Operasi Produksi dalam rangka permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi 10. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala sesuai tahap kegiatan IUP kepada			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun 5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 6. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan		Direktur Jenderal 11. Memenuhi kebutuhan mineral dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 12. Memenuhi kewajiban penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 13. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Menteri atas			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Kegiatan Eksplorasi 7. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan penrundang-undangan di bidang perpajakan dan 8. Bukti pembayaran nilai kompensasi data informasi **Perpanjangan IUP/IUPK Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan		perubahan pemegang saham badan usaha perseroan terbatas 14. Melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 15. Menyampai-kan, mendapatkan persetujuan, dan melaksanakan sesuai Rencana Pengemba-ngan Seluruh			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Kajian kendala berdasarkan kriteria teknis yang ditentukan 3. Rencana kegiatan dan anggaran biaya eksplorasi jangka panjang yang dijabarkan dalam tiap semester selama jangka waktu permohonan perpanjangan dan 4. Menempatkan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan		Wilayah khusus bagi pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian 16. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **Kewajiban IPR** 1. Melakukan kegiatan Penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Eksplorasi pada bank pemerintah **IUP/IUPK Tahap Kegiatan Operasi Produksi** 1. Surat permohonan peningkatan tahap kegiatan 2. Nomor induk berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau		setelah IPR diterbitkan 2. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan Pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku 3. Mengelola lingkungan hidup bersama Gubernur 4. Membayar iuran			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							modal, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Peta usulan WIUP tahap Kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang		Pertambangan rakyat dan 5. Menyampai-kan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat secara berkala kepada Gubernur 6. Wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan 7. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berlaku secara nasional 5. Laporan lengkap tahap Kegiatan Eksplorasi 6. Laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui oleh menteri 7. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan		perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perundang undangan 8. Dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pasca tambang 9. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 10. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							11. Bukti pelunasan iuran tetap tahap Kegiatan Eksplorasi tahun terakhir **Perpanjangan IUP/IUPK Tahap Kegiatan Operasi Produksi** Paling sedikit harus dilengkapi: 1. Surat Permohonan 2. Peta dan batas koordinat wilayah 3. Bukti pelunasan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah 3 (tiga) tahun terakhir: 4. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 5. Rencana kerja selama masa perpanjangan 6. Laporan akhir Kegiatan Operasi Produksi 7. Laporan pelaksanaan pengelolaan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lingkungan dan Reklamasi 8. Neraca Sumber Daya dan Cadangan **IUPK Sebagai Kelanjutan Kontrak/ Perjanjian** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat badan usaha					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dari pemegang KK 4. Rencana pengembangan seluruh wilayah yang telah disetujui yang memuat paling sedikit peta dan batas koordinat wilayah 5. Neraca Sumber Daya dan Cadangan 6. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang Kegiatan Operasi Produksi yang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berada dalam WIUPK atau di luar WIUPK 7. Persetujuan dokumen lingkungan hidup yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 8. Dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pasca tambang 9. Laporan keuangan 3					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 10. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir 11. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Perpanjangan IUPK sebagai Kelanjutan Kontrak/ Perjanjian Paling sedikit harus dilengkapi: 1. Surat Permohonan 2. Peta dan batas koordinat wilayah 3. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir 4. Laporan akhir Kegiatan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Operasi Produksi 5. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan 6. RKAB 7. Neraca Sumber Daya dan Cadangan **Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Salinan kartu tanda penduduk d. Surat keterangan dari kelurahan/ desa setempat yang menyata-kan pemohon merupakan penduduk setempat dan melakukan kegiatan pertamba-ngan rakyat					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan pertambangan dan f. Surat keterangan fiskal sesuai					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 2. Koperasi a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk pengurus koperasi dilengkapi dengan salinan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kartu tanda penduduk anggota koperasi d. Surat keterangan dari kelurahan/ desa setempat yang menyata-kan seluruh pengurus dan anggota koperasi merupakan penduduk setempat dan anggota					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							koperasi merupakan penam-bang rakyat e. Surat pernyataan kesanggu-pan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindu-ngan dan pengelola-an lingkungan serta keselama-tan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pertambangan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. Surat Permohonan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Peta dan batas koordinat wilayah c. Bukti pelunasan iuran pertambangan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. Laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) dan e. Rencana penam-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bangan selama perpanja-ngan 2. Koperasi a. Surat Permoho-nan b. Peta dan batas koordinat wilayah c. Bukti pelunasan iuran pertamba-ngan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) e. Rencana penambangan selama perpanjangan dan Susunan pengurus					
31	07295	Pertambangan Bijih Nikel	Kelompok ini mencakup usaha pertambangan bijih Nikel	- Mikro, - Kecil - Menengah Besar	Tinggi	NIB dan Izin	**IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat permohonan 2. nomor induk berusaha dalam hal	1. IUP/IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi : 14 Hari	**Kewajiban IUP/IUPK/IUPK Kelanjutan Perjanjian/ Kontrak** 1. Menyampaikan dan mendapatkan	Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif sebagai Penunjang	IUP IUPK IUPK Kelanjutan Kontrak dan Perjanjian	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							terjadi pemutakhiran data 3. susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi, atau Perusahaan perseorangan dalam hal terjadi Pemutakhiran data 4. surat pernyataan dari ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling	2. Perpanjangan IUP/ IUPK Tahap Kegiatan Eksplorasi : 14 Hari 3. IUP/IUPK Tahap Kegiatan Operasi Produksi : 14 Hari 4. Perpanjangan IUP/ IUPK : 14 Hari	persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sesuai tahap kegiatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Laporan Akhir Eksplorasi 3. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan akhir Laporan Studi Kelayakan 4. Mendapatkan persetujuan	Kegiatan Utama	Izin Pertambangan Rakyat	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							singkat 3 (tiga) tahun 5. surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 6. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan Eksplorasi 7. Bukti Pembayaran	5. IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak / Perjanjian : 14 Hari 6. Perpanjangan IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak / Perjanjian: 14 Hari 7. Izin Pertamb	Izin Lingkungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Menyelesaikan Hak Atas Tanah sebelum melakukan Kegiatan Operasi pertambanga 6. Menyampaikan dan melaksanakan sesuai Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP Mineral logam sesuai dengan nilai penawaran lelang 8. surat keterangan Fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. **IUPK Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. surat permohonan	angan Rakyat : 14 Hari (jangka waktu tidak termasuk pelaksanaan kunjungan lapangan)	ketentuan peraturan perundang-undangan 7. Menyampaikan, mendapatkan persetujuan, dan melaksanakan Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca tambang serta penempatan jaminannya 8. Melaksanakan pemasangan, pemeliharaan dan perawatan tanda batas WIUP sesuai ketentuan peraturan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. nomor induk berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. susunan pengurus, daftar pernegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari BUMN, BLIMD, atau Badan Usaha swasta dalam hal terjadi pemutakhiran data. 4. surat Pernyataan dari ahli Pertambangan dan/atau geologi yang		perundang-undangan 9. Menyampai-kan Laporan Akhir Operasi Produksi dalam rangka permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi 10. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala sesuai tahap kegiatan IUP kepada Direktur Jenderal 11. Memenuhi kebutuhan mineral dalam negeri sesuai ketentuan peraturan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun. 5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 6. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan Eksplorasi		perundang-undangan 12. Memenuhi kewajiban penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 13. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Menteri atas perubahan pemegang saham badan usaha perseroan terbatas 14. Melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							7. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan pen-rndang-undangan di bidang perpajakan dan 8. bukti pembayaran nilai'kompensasi data informasi **IUP/IUPK Tahap Kegiatan Operasi Produksi** 1. surat permohonan peningkatan tahap kegiatan		benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 15. Menyampai-kan, mendapatkan persetujuan, dan melaksanakan sesuai Rencana Pengembang-an Seluruh Wilayah khusus bagi pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian 16. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. peta usulan WIUP tahap kegiatan Operasi		dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **Kewajiban IPR** 1. Melakukan kegiatan Penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan 2. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan Pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional 5. laporan lengkap tahap kegiatan Eksplorasi 6. laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui oleh Menteri 7. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuan		standar yang berlaku 3. Mengelola lingkungan hidup bersama Gubernur 4. Membayar iuran Pertambangan rakyat dan 5. Menyamp-aikan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat secara berkala kepada Gubernur 6. Wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan 8. dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pasca tambang 9. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 10. surat keterangan fiskal sesuai		7. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 11. bukti pelunasan iuran tetap tahap kegiatan Eksplorasi tahun terakhir **Perpanjangan IUP/IUPK tahap kegiatan operasi produksi** Paling sedikit harus dilengkapi: 1. surat permohonan perpanja-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ngan tahap kegiatan 2. peta dan batas koordinat wilayah 3. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah 3 (tiga) tahun terakhir: 4. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. rencana kerja selama masa perpanja-ngan 6. laporan akhir kegiatan Operasi Produksi 7. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan reklamasi 8. Neraca Sumber Daya dan Cadangan **IUPK Sebagai Kelanjutan Kontrak/Perjan-jian** 1. surat permohonan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Nomor Induk Berusaha 3. susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat Badan Usaha dari pemegang KK 4. rencana pengembangan seluruh wilayah yang telah disetujui yang memuat paling sedikit peta dan batas koordinat wilayah					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. neraca sumber daya dan cadangan 6. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan Operasi Produksi yang berada dalam WIUPK atau di luar WIUPK 7. persetujuan dokumen lingkungan hidup yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peraturan perundang-undangan 8. dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pascatam-bang 9. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 10. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							11. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **Perpanjangan IUPK sebagai Kelanjutan Kontrak/Perjanjian** Paling sedikit harus dilengkapi: 1. Surat Permohonan perpanjangan 2. peta dan batas koordinat wilayah					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir 4. laporan akhir kegiatan Operasi Produksi 5. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan 6. RKAB 7. Neraca Sumber Daya dan Cadangan **Izin Pertambangan Rakyat**					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1. Orang Perorangan a. surat permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. salinan kartu tanda penduduk d. surat keterangan dari kelurahani desa setempat yang menyatakan pemohon merupakan penduduk					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							setempat dan melakukan kegiatan pertam-bangan rakyat e. surat pernyataan kesang-gupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindu-ngan dan penge-lolaan lingkungan hidup serta					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							keselamatan Pertambangan dan f. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 2. Koperasi a. surat permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. salinan kartu tanda					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penduduk pengurus Koperasi dilengkapi dengan salinan kartu tanda penduduk anggota koperasi d. surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus dan anggota Koperasi merupakan penduduk setempat					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan anggota koperasi merupakan penambang rakyat e. surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindu-ngan dan pengelolaan lingkungan serta keselamatan Pertam-bangan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							f. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. surat permohonan b. peta dan batas					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							koordinat wilayah c. bukti pelunasan iuran pertambangan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) dan e. rencana penambangan selama perpanjangan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Koperasi a. surat permohonan b. Peta dan batas koordinat wilayah c. bukti pelunasan iuran pertam-bangan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan)					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							e. rencana penambangan selama perpanjangan dan Susunan pengurus					
32	07296	Pertambangan Bijih Mangan	Kelompok ini mencakup usaha pertambangan bijih mangan	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	**IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik	1. IUP/IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi : 14 Hari 2. Perpanjangan IUP/ IUPK Tahap Kegiatan Eksplo-	**Kewajiban IUP/IUPK** 1. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sesuai tahap kegiatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama	IUP IUPK	Menteri/ Kepala Badan
											Izin Pertambangan Rakyat	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							manfaat dari Badan Usaha, Koperasi, atau Perusahaan perseorangan dalam hal terjadi Pemutakhiran data 4. Surat pernyataan dari ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun 5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan	rasi : 14 Hari 3. IUP/ IUPK Tahap Kegiatan Operasi Produksi : 14 Hari 4. Perpanjangan IUP/ IUPK : 14 Hari 5. Izin Pertambangan Rakyat : 14 Hari (jangka waktu	2. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Laporan Akhir Eksplorasi 3. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan akhir Laporan Studi Kelayakan 4. Mendapatkan persetujuan Izin Lingkungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Menyelesaikan Hak Atas Tanah sebelum			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 6. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi 7. Bukti Pembayaran nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP Mineral logam sesuai dengan nilai penawaran lelang	tidak termasuk pelaksanaan kunjungan lapangan)	melakukan Kegiatan Operasi pertambangan 6. Menyampaikan dan melaksanakan sesuai Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 7. Menyampaikan, mendapatkan persetujuan, dan melaksanakan Rencana			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							8. Surat keterangan Fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **IUPK Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar		Reklamasi dan Rencana Pasca tambang serta penempatan jaminannya 8. Melaksanakan pemasangan, pemeliharaan dan perawatan tanda batas WIUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 9. Menyampai-kan Laporan Akhir Operasi Produksi dalam rangka permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Surat pernyataan dari ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun 5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi		10. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala sesuai tahap kegiatan IUP kepada Direktur Jenderal 11. Memenuhi kebutuhan mineral dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 12. Memenuhi kewajiban penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 6. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi 7. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan penrundang-undangan di bidang		13. Menyampai-kan dan mendapatkan persetujuan Menteri atas perubahan pemegang saham badan usaha perseroan terbatas 14. Melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 15. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perpajakan dan 8. Bukti pembayaran nilai kompensasi data informasi **Perpanjangan IUP/IUPK Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan 2. Kajian kendala berdasarkan kriteria teknis yang ditentukan 3. Rencana kegiatan dan anggaran biaya eksplorasi		perundang-undangan **Kewajiban IPR** 1. Melakukan kegiatan Penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan 2. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan Pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jangka panjang yang dijabarkan dalam tiap semester selama jangka waktu oermohonan perpanjangan dan 4. Menempatkan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi pada bank pemerintah **IUP/IUPK Tahap Kegiatan Operasi Produksi**		3. Mengelola lingkungan hidup bersama Gubernur 4. Membayar iuran Pertambangan rakyat dan 5. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat secara berkala kepada Gubernur 6. Wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan 7. Melaksanakan kewajiban			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Peta usulan WIUP tahap		lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional 5. Laporan lengkap tahap Kegiatan Eksplorasi 6. Laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui oleh menteri					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							7. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan 8. Dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pasca tambang 9. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							oleh akuntan publik 10. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 11. Bukti pelunasan iuran tetap tahap Kegiatan Eksplorasi tahun terakhir **Perpanjangan IUP/IUPK Tahap Kegiatan**					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Operasi Produksi Paling sedikit harus dilengkapi: 1. Surat Permohonan 2. Peta dan batas koordinat wilayah 3. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah 3 (tiga) tahun terakhir 4. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							undangan di bidang perpajakan 5. Rencana kerja selama masa perpanjangan 6. Laporan akhir Kegiatan Operasi Produksi 7. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan Reklamasi 8. Neraca Sumber Daya dan Cadangan 9. Salinan bukti penempatan jaminan Reklamasi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Izin Pertambangan Rakyat 1. Orang Perorangan a. Surat Permoho-nan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk d. Surat keterangan dari kelurahan/ desa setempat yang menyata-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kan pemohon merupakan penduduk setempat dan melakukan kegiatan pertambangan rakyat e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelola-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							an lingkungan hidup serta keselamatan pertambangan dan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 2. Koperasi a. Surat Permohonan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk pengurus koperasi dilengkapi dengan salinan kartu tanda penduduk anggota koperasi d. Surat keterangan dari kelurahan/ desa setempat yang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menyata-kan seluruh pengurus dan anggota koperasi merupakan penduduk setempat dan anggota koperasi merupakan penam-bang rakyat e. Surat pernyataan kesanggu-pan untuk mematuhi ketentuan peraturan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta keselamatan pertambangan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat 1. Orang Perorangan a. Surat Permohonan b. Peta dan batas koordinat wilayah c. Bukti pelunasan iuran pertambangan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) dan e. Rencana penambangan selama perpanjangan 2. Koperasi a. Surat Permohonan b. Peta dan batas koordinat wilayah					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Bukti pelunasan iuran pertambangan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. Laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) e. Rencana penambangan selama perpanjangan dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							f. Susunan pengurus					
33	07299	Pertambangan Bahan Galian Lainnya Yang Tidak Mengandung Bijih Besi	Pertambangan Bahan Galian Lainnya yang Tidak Mengandung Bijih Besi	- Mikro, - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	**IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usahà, Koperasi, atau Perusahaan perseorangan dalam hal	1. IUP/IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi : 14 Hari 2. Perpanjangan IUP/ IUPK Tahap Kegiatan Eksplorasi : 14 Hari 3. IUP/ IUPK Tahap Kegiatan Operasi Produk-	**Kewajiban IUP/IUPK/IUPK Kelanjutan Perjanjian/ Kontrak** 1. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sesuai tahap kegiatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan	Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama	IUP IUPK	Menteri/ Kepala Badan
											Izin Pertambangan Rakyat	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							terjadi Pemutakhiran data 4. Surat Pernyataan dari ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun 5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan	si : 14 Hari 4. Perpanjangan IUP/ IUPK : 14 Hari 5. Izin Pertambangan Rakyat : 14 Hari (jangka waktu tidak termasuk pelaksanaan kunjungan lapangan)	Laporan Akhir Eksplorasi 3. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan akhir Laporan Studi Kelayakan 4. Mendapatkan persetujuan Izin Lingkungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Menyelesaikan Hak Atas Tanah sebelum melakukan Kegiatan Operasi pertambangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lingkungan hidup 6. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi 7. Bukti Pembayaran nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP Mineral logam sesuai dengan nilai penawaran lelang 8. Surat keterangan Fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan		6. Menyampai-kan dan melaksanakan sesuai Rencana Induk Pengemba-ngan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 7. Menyampai-kan, mendapatkan persetujuan, dan melaksanakan Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca tambang serta			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perundang-undangan di bidang perpajakan **IUPK Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pernegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari bumn, BUMD, atau badan		penempatan jaminannya 8. Melaksanakan pemasangan, pemeliharaan dan perawatan tanda batas WIUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 9. Menyampai-kan Laporan Akhir Operasi Produksi dalam rangka permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi 10. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala sesuai			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							usaha swasta dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Surat pernyataan dari ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun 5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan		tahap kegiatan IUP kepada Direktur Jenderal 11. Memenuhi kebutuhan mineral dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 12. Memenuhi kewajiban penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 13. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan pengelolaan lingkungan hidup 6. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi 7. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan 8. Bukti pembayaran nilai		Menteri atas perubahan pemegang saham badan usaha perseroan terbatas 14. Melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 15. Menyampaikan, mendapatkan persetujuan, dan melaksanakan sesuai Rencana Pengembangan Seluruh			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kompensasi data informasi **Perpanjangan IUP/IUPK Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan 2. Kajian kendala berdasarkan kriteria teknis yang ditentukan 3. Rencana kegiatan dan anggaran biaya eksplorasi jangka panjang yang dijabarkan dalam tiap semester		Wilayah khusus bagi pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian 16. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **Kewajiban IPR** 1. Melakukan kegiatan Penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							selama jangka waktu permohonan perpanjangan dan 4. Menempatkan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi pada bank pemerintah **IUP/IUPK Tahap Kegiatan Operasi Produksi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi		setelah IPR diterbitkan 2. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan Pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku 3. Mengelola lingkungan hidup bersama Gubernur 4. Membayar iuran Pertambangan rakyat dan 5. Menyampai-kan laporan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Peta usulan WIUP tahap Kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat		pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat secara berkala kepada Gubernur 6. Wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan 7. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional 5. Laporan lengkap tahap Kegiatan Eksplorasi 6. Laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui oleh menteri 7. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan 8. Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca tambang 9. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 10. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 11. Bukti pelunasan iuran tetap tahap Kegiatan Eksplorasi tahun terakhir **Perpanjangan IUP/IUPK Tahap Kegiatan Operasi Produksi** Paling sedikit harus dilengkapi: 1. Surat Permohonan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Peta dan batas koordinat wilayah 3. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah 3 (tiga) tahun terakhir 4. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Rencana kerja selama masa perpanjangan 6. Laporan akhir Kegiatan Operasi Produksi 7. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan Reklamasi 8. Neraca Sumber Daya dan Cadangan **Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.D.434

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk d. Surat keterangan dari kelurahani desa setempat yang menyatakan pemohon merupakan penduduk setempat dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							melakukan kegiatan pertambangan rakyat e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pertambangan dan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 2. Koperasi a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penduduk pengurus koperasi dilengkapi dengan salinan kartu tanda penduduk anggota koperasi d. Surat keterangan dari kelurahan/ desa setempat yang menyata-kan seluruh pengurus dan anggota					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							koperasi merupakan penduduk setempat dan anggota koperasi merupakan penam-bang rakyat e. Surat pernyataan kesanggu-pan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindu-ngan dan pengelola-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							an lingkungan serta keselama-tan pertam-bangan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat**					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1. Orang Perorangan a. Surat Permohonan b. Peta dan batas koordinat wilayah c. Bukti pelunasan iuran pertambangan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. Laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelola-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							an lingkungan) e. Rencana penambangan selama perpanjangan 2. Koperasi a. Surat Permohonan b. Peta dan batas koordinat wilayah c. Bukti pelunasan iuran pertambangan rakyat produksi 3					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(tiga) tahun terakhir d. Laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) e. Rencana penambangan selama perpanjangan dan f. Susunan pengurus					
34	07301	Pertambangan Emas dan Perak	Kelompok ini mencakup usaha pertamban	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	**IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan	1. IUP/IUP Tahap Kegiatan Eksplo-	**Kewajiban IUP/IUPK/IUPK Kelanjutan Perjanjian/ Kontrak**	Penyimpanan Mineral Ikutan Radio-	IUP IUPK IUPK Kelanjutan	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			gan, pembersihan, dan pemisahan bijih emas dan perak				2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi, atau Perusahaan perseorangan dalam hal terjadi Pemutakhiran data 4. Surat Pernyataan dari ahli Pertambangan dan/atau	rasi : 14 Hari 2. Perpanjangan IUP/ IUPK Tahap Kegiatan Eksplorasi : 14 Hari 3. IUP/ IUPK Tahap Kegiatan Operasi Produksi : 14 Hari 4. Perpanjangan	1. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sesuai tahap kegiatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Laporan Akhir Eksplorasi 3. Menyampaikan data sumberdaya dan cadangan yang terverifikasi	aktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama	Kontrak dan Perjanjian	
											Izin Pertambangan Rakyat	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							geologi yang berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun 5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 6. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan	IUP/ IUPK : 14 Hari 5. IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak / Perjanjian : 14 Hari 6. Perpanjangan IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak /Perjanjian: 14 hari	oleh competent person 4. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan akhir Laporan Studi Kelayakan 5. Mendapatkan persetujuan Izin Lingkungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Menyelesaikan Hak Atas Tanah sebelum melakukan Kegiatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Kegiatan Eksplorasi 7. Bukti Pembayaran nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP Mineral logam sesuai dengan nilai penawaran lelang 8. Surat keterangan Fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan	7. Izin Pertambangan Rakyat : 14 Hari (jangka waktu tidak termasuk pelaksanaan kunjungan lapangan)	Operasi pertambangan 7. Menyampaikan dan melaksanakan sesuai Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 8. Menyampaikan, mendapatkan persetujuan, dan melaksanakan Rencana Reklamasi dan Rencana			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							IUPK Tahap Kegiatan Eksplorasi 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pernegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta dalam hal terjadi pemutakhiran data		Pasca tambang serta penempatan jaminannya 9. Melaksanakan pemasangan, pemeliharaan dan perawatan tanda batas WIUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 10. Menyampai-kan Laporan Akhir Operasi Produksi dalam rangka permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi 11. Melaporkan kegiatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Surat pernyataan dari ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun 5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		usaha secara berkala sesuai tahap kegiatan IUP kepada Direktur Jenderal 12. Memenuhi kebutuhan mineral dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 13. Memenuhi kewajiban penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 14. Menyampaikan dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi 7. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan 8. Bukti pembayaran nilai kompensasi data informasi		mendapatkan persetujuan Menteri atas perubahan pemegang saham badan usaha perseroan terbatas 15. Melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 16. Menyampai-kan, mendapatkan persetujuan, dan melaksanakan sesuai Rencana			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Perpanjangan IUP/IUPK Tahap Kegiatan Eksplorasi 1. Surat Permohonan 2. Kajian kendala berdasarkan kriteria teknis yang ditentukan 3. Rencana kegiatan dan anggaran biaya eksplorasi jangka panjang yang dijabarkan dalam tiap semester selama jangka waktu permohonan		Pengembangan Seluruh Wilayah khusus bagi pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian 17. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **Kewajiban IPR** 1. Melakukan kegiatan Penambangan paling lambat			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perpanjangan dan 4. Menempatkan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi pada bank pemerintah **IUP/IUPK Tahap Kegiatan Operasi Produksi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data		3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan 2. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan Pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku 3. Mengelola lingkungan hidup bersama Gubernur 4. Membayar iuran Pertambangan rakyat dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Peta usulan WIUP tahap Kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan		5. Menyampai-kan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat secara berkala kepada Gubernur 6. Wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan 7. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional 5. Laporan lengkap tahap Kegiatan Eksplorasi 6. Laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui oleh menteri 7. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan 8. Dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pasca tambang 9. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 10. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							undangan di bidang perpajakan 11. Bukti pelunasan iuran tetap tahap Kegiatan Eksplorasi tahun terakhir **Perpanjangan IUP/IUPK Tahap Kegiatan Operasi Produksi** Paling sedikit harus dilengkapi: 1. Surat Permohonan 2. Peta dan batas koordinat wilayah					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah 3 (tiga) tahun terakhir 4. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 5. Rencana kerja selama masa perpanjangan 6. Laporan akhir Kegiatan Operasi Produksi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							7. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan Reklamasi 8. Neraca Sumber Daya dan Cadangan **IUPK Sebagai Kelanjutan Kontrak/ Perjanjian** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							manfaat badan usaha dari pemegang KK 4. Rencana pengembangan seluruh wilayah yang telah disetujui yang memuat paling sedikit peta dan batas koordinat wilayah 5. Neraca Sumber Daya dan Cadangan 6. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang Kegiatan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Operasi Produksi yang berada dalam WIUPK atau di luar WIUPK 7. Persetujuan dokumen lingkungan hidup yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 8. Dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pasca tambang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							9. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 10. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir 11. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.D.460

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Perpanjangan IUPK sebagai Kelanjutan Kontrak/ Perjanjian Paling sedikit harus dilengkapi: 1. Surat Permohonan 2. Peta dan batas koordinat wilayah 3. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir 4. Laporan akhir Kegiatan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.D.461

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Operasi Produksi 5. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan 6. RKAB 7. Neraca Sumber Daya dan Cadangan **Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. Surat Permoho-nan b. Nomor Induk Berusaha					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Salinan kartu tanda penduduk d. Surat keterangan dari kelurahan/ desa setempat yang menyata-kan pemohon merupakan penduduk setempat dan melakukan kegiatan pertamba-ngan rakyat					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							e. Surat pernyataan kesanggu-pan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindu-ngan dan pengelola-an lingkungan hidup serta keselama-tan pertamba-ngan dan f. Surat keterangan fiskal sesuai					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 2. Koperasi a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk pengurus koperasi dilengkapi dengan salinan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kartu tanda penduduk anggota koperasi d. Surat keterangan dari kelurahan/ desa setempat yang menyata-kan seluruh pengurus dan anggota koperasi merupakan penduduk setempat dan anggota					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							koperasi merupakan penam-bang rakyat e. Surat pernyataan kesanggu-pan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindu-ngan dan pengelola-an lingkungan serta keselama-tan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pertam-bangan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. Surat Permoho-nan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Peta dan batas koordinat wilayah c. Bukti pelunasan iuran pertambangan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. Laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) e. Rencana penambangan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							selama perpanjangan 2. Koperasi a. Surat Permohonan b. Peta dan batas koordinat wilayah c. Bukti pelunasan iuran pertambangan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. Laporan kegiatan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) e. Rencana penambangan selama perpanjangan dan f. Susunan pengurus					
37	07309	Pertambangan Bijih Logam	Kelompok ini mencakup usaha pertambangan, dan	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan izin	**IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan	1. IUP/IUP Tahap Kegiatan Eksplo-	**Kewajiban IUP/IUPK** 1. Menyampaikan dan mendapatkan	Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif	IUP IUPK	Menteri/Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Mulia Lainnya	pembersihan bijih logam mulia lainnya, selain bijih logam emas dan perak, seperti bijih platina				2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi, atau Perusahaan perseorangan dalam hal terjadi Pemutakhiran data 4. Surat pernyataan dari ahli Pertambangan dan/atau	rasi : 14 Hari 2. Perpanjangan IUP/ IUPK Tahap Kegiatan Eksplorasi : 14 Hari 3. IUP/ IUPK Tahap Kegiatan Operasi Produksi : 14 Hari 4. Perpanjangan	persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sesuai tahap kegiatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Laporan Akhir Eksplorasi 3. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan akhir Laporan Studi Kelayakan 4. Mendapatkan persetujuan	sebagai Penunjang Kegiatan Utama	Izin Pertambangan Rakyat	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							geologi yang berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun 5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 6. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan	IUP/ IUPK : 14 Hari 5. Izin Pertambangan Rakyat : 14 Hari (jangka waktu tidak termasuk pelaksanaan kunjungan lapangan)	Izin Lingkungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Menyelesaikan Hak Atas Tanah sebelum melakukan Kegiatan Operasi pertambangan 6. Menyampaikan dan melaksanakan sesuai Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Kegiatan Eksplorasi 7. Bukti Pembayaran nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP Mineral logam sesuai dengan nilai penawaran lelang 8. Surat keterangan Fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan		ketentuan peraturan perundang-undangan 7. Menyampai-kan, mendapatkan persetujuan, dan melaksanakan Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca tambang serta penempatan jaminannya 8. Melaksanakan pemasangan, pemeliharaan dan perawatan tanda batas WIUP sesuai ketentuan peraturan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							IUPK Tahap Kegiatan Eksplorasi 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pernegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta dalam hal terjadi pemutakhiran data		perundang-undangan 9. Menyampai-kan Laporan Akhir Operasi Produksi dalam rangka permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi 10. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala sesuai tahap kegiatan IUP kepada Direktur Jenderal 11. Memenuhi kebutuhan mineral dalam negeri sesuai ketentuan peraturan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Surat pernyataan dari ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun 5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		perundang-undangan 12. Memenuhi kewajiban penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 13. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Menteri atas perubahan pemegang saham badan usaha perseroan terbatas 14. Melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi 7. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan 8. Bukti pembayaran nilai kompensasi data informasi **Perpanjangan IUP/IUPK Tahap**		benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 15. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **Kewajiban IPR** 1. Melakukan kegiatan Penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan 2. Mematuhi peraturan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Kegiatan Eksplorasi 1. Surat Permohonan 2. Kajian kendala berdasarkan kriteria teknis yang ditentukan 3. Rencana kegiatan dan anggaran biaya eksplorasi jangka panjang yang dijabarkan dalam tiap semester selama jangka waktu oermohonan perpanjangan dan		perundang-undangan di bidang keselamatan Pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku 3. Mengelola lingkungan hidup bersama Gubernur 4. Membayar iuran Pertambangan rakyat dan 5. Menyampai-kan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Menempatkan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi pada bank pemerintah **IUP/IUPK Tahap Kegiatan Operasi Produksi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar		rakyat secara berkala kepada Gubernur 6. Wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan 7. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Peta usulan WIUP tahap Kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							informasi geografis yang berlaku secara nasional 5. Laporan lengkap tahap Kegiatan Eksplorasi 6. Laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui oleh menteri 7. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peraturan perundang undangan 8. Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca tambang 9. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 10. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							11. Bukti pelunasan iuran tetap tahap Kegiatan Eksplorasi tahun terakhir **Perpanjangan IUP/IUPK Tahap Kegiatan Operasi Produksi** Paling sedikit harus dilengkapi: 1. Surat Permohonan 2. Peta dan batas koordinat wilayah 3. Bukti pelunasan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah 3 (tiga) tahun terakhir 4. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 5. Rencana kerja selama masa perpanjangan 6. Laporan akhir Kegiatan Operasi Produksi 7. Laporan pelaksanaan pengelolaan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lingkungan dan Reklamasi 8. Neraca Sumber Daya dan Cadangan **Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. Surat Permoho-nan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk d. Surat keterangan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dari kelurahan/ desa setempat yang menyata-kan pemohon merupakan penduduk setempat dan melakukan kegiatan pertamba-ngan rakyat e. Surat pernyataan kesanggu-pan untuk mematuhi ketentuan peraturan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan pertambangan dan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.D.487

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Koperasi a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk pengurus koperasi dilengkapi dengan salinan kartu tanda penduduk anggota koperasi d. Surat keterangan					

SK No 137307 C

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dari kelurahan/ desa setempat yang menyata-kan seluruh pengurus dan anggota koperasi merupakan penduduk setempat dan anggota koperasi merupakan penam-bang rakyat e. Surat pernyataan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kesanggu-pan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindu-ngan dan pengelola-an lingkungan serta keselama-tan pertam-bangan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. Surat Permohonan b. Peta dan batas koordinat wilayah c. Bukti pelunasan iuran pertamban					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							gan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. Laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) e. Rencana penambangan selama perpanjangan 2. Koperasi a. Surat Permohonan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Peta dan batas koordinat wilayah c. Bukti pelunasan iuran pertambangan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. Laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) e. Rencana penambangan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							selama perpan-jangan f. Susunan pengurus					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
36	08101	Penggalian Batu Hias dan Batu Bangunan	Kelompok ini mencakup usaha penggalian batu hias dan batu bangunan seperti batu pualam atau marmer, batu andesit (batu gajah, base course), paras, obsidian, dan granit. Termasuk disini kegiatan	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	**IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan 2. NIB dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan Pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data	1. IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi : 14 Hari 2. IUP Tahap Kegiatan Operasi Produk-si : 14 Hari 3. Perpanjangan IUP: 14 Hari 4. Izin Pertam-	**Kewajiban IUP** 1. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2. Sesuai tahap kegiatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Laporan Akhir Eksplorasi 4. Menyampaikan dan	-	- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di lintas provinsi - IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di wilayah laut lebih dari 12 mil laut	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			pemecahan, pemisahan dan pembersihannya				4. Surat pernyataan dari ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun 5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 6. Bukti penempatan jaminan kesungguhan	bangan Rakyat 14 Hari (jangka waktu tidak termasuk pelaksanaan kunjungan lapangan)	mendapatkan persetujuan akhir Laporan Studi Kelayakan 5. Mendapatkan persetujuan Izin Lingkungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Menyelesaikan Hak Atas Tanah sebelum melakukan Kegiatan Operasi pertambangan 7. Menyampaikan dan melaksanakan sesuai		- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada dalam satu provinsi - IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di wilayah laut sampai dengan 12 mil laut - IPR	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi 7. Bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP atas permohonan wilayah 8. Surat keterangan Fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan		Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 8. Menyampaikan, mendapatkan persetujuan, dan melaksanakan Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca tambang serta penempatan jaminannya 9. Melaksanakan pemasangan,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi Paling sedikit harus dilengkapi: 1. Surat Permohonan 2. NIB dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data		pemeliharaan dan perawatan tanda batas WIUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 10. Menyampaikan Laporan Akhir Operasi Produksi dalam rangka permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi 11. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala sesuai tahap kegiatan IUP kepada Menteri/			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Peta usulan WIUP tahap Kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional 5. Laporan lengkap tahap Kegiatan Eksplorasi 6. Laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui oleh menteri 7. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang		Gubernur sesuai dengan kewenangan-nya 12. Memenuhi kebutuhan mineral dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 13. Memenuhi kewajiban penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 14. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Menteri/guber			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan 8. Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca tambang 9. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 10. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di		nur sesuai kewenangannya atas perubahan pemegang saham badan usaha perseroan terbatas 15. Melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 16. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bidang perpajakan 11. Bukti pelunasan iuran tetap tahap Kegiatan Eksplorasi tahun terakhir **Perpanjangan IUP tahap Kegiatan Operasi Produksi** Paling sedikit harus dilengkapi: 1. Surat Permohonan 2. Peta dan batas koordinat wilayah 3. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak		perundang-undangan **Kewajiban IPR** 1. Melakukan kegiatan Penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan 2. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan Pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							daerah 3 (tiga) tahun terakhir: 4. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 5. Rencana kerja selama masa perpanjangan 6. Laporan akhir Kegiatan Operasi Produksi 7. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan Reklamasi		3. Mengelola lingkungan hidup bersama Gubernur 4. Membayar iuran Pertambangan rakyat dan 5. Menyampai-kan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat secara berkala kepada Gubernur 6. Wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan 7. Melaksanakan kewajiban			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							8. Neraca Sumber Daya dan Cadangan **Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk d. Surat keterangan dari kelurahani desa setempat yang menyatakan		lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.D.503

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pemohon merupakan penduduk setempat dan melakukan kegiatan pertamba-ngan rakyat e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pertambangan dan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 2. Koperasi a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk pengurus koperasi dilengkapi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dengan salinan kartu tanda penduduk anggota koperasi d. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang menyata-kan seluruh pengurus dan anggota koperasi merupakan penduduk setempat dan anggota koperasi merupakan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penambang rakyat e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta keselamatan pertam-bangan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. Surat Permohonan b. Peta dan batas koordinat wilayah c. Bukti pelunasan iuran pertam-bangan rakyat					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. Laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) e. Rencana penambangan selama perpanjangan 2. Koperasi a. Surat Permohonan b. Peta dan batas koordinat wilayah c. Bukti pelunasan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							iuran pertambangan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. Laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) e. Rencana penambangan selama perpanjangan f. Susunan Pengurus					
35	08102	Penggalian Batu	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah	Tinggi	NIB dan Izin	**IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi**	1. IUP Tahap Kegiatan Eksplo-	**Kewajiban IUP** 1. Menyampaikan dan mendapatkan	-	- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.D.510

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Kapur/ Gamping		- Besar			1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan Pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Surat pernyataan dari ahli Pertambangan dan/atau geologi	rasi : 14 Hari 2. IUP Tahap Kegiatan Operasi Produk-si : 14 Hari 3. Perpan-jangan IUP: 14 Hari 4. Surat Izin Pertam-bangan	persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sesuai tahap kegiatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampai-kan dan mendapatkan persetujuan Laporan Akhir Eksplorasi 3. Menyampai-kan dan mendapatkan persetujuan akhir Laporan Studi Kelayakan		Negeri yang wilayahnya berada di lintas provinsi - IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di wilayah laut lebih dari 12 mil laut	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun 5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 6. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi 7. Bukti pembayaran	batuan 14 Hari 5. Izin Pertambangan Rakyat 14 Hari (jangka waktu tidak termasuk pelaksanaan kunjungan lapangan	4. Mendapatkan persetujuan Izin Lingkungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Menyelesaikan Hak Atas Tanah sebelum melakukan Kegiatan Operasi pertambangan 6. Menyampaikan dan melaksanakan sesuai Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan		- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada dalam satu provinsi - IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di wilayah laut sampai dengan 12 mil laut - SIPB - IPR	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP atas permohonan wilayah 8. Surat keterangan Fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi** 1. Surat Permohonan		Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 7. Menyampai-kan, mendapatkan persetujuan, dan melaksanakan Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca tambang serta penempatan jaminannya 8. Melaksanakan pemasangan, pemeliharaan dan perawatan tanda batas WIUP sesuai			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Peta usulan WIUP tahap Kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan		ketentuan peraturan perundang-undangan 9. Menyampaikan Laporan Akhir Operasi Produksi dalam rangka permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi 10. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala sesuai tahap kegiatan IUP kepada Menteri/ Gubernur sesuai dengan kewenangannya			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional 5. Laporan lengkap tahap Kegiatan Eksplorasi 6. Laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui oleh menteri 7. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan		11. Memenuhi kebutuhan mineral dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 12. Memenuhi kewajiban penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 13. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Menteri/ Gubernur sesuai kewenangannya atas			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							8. Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca tambang 9. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 10. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 11. Bukti pelunasan iuran tetap tahap Kegiatan Eksplorasi tahun terakhir		perubahan pemegang saham badan usaha perseroan terbatas 14. Melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 15. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **Kewajiban IPR**			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.D.516

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Perpanjangan IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi Paling sedikit harus dilengkapi 1. Surat Permohonan 2. Peta dan batas koordinat wilayah 3. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah 3 (tiga) tahun terakhir: 4. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan		1. Melakukan kegiatan Penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan 2. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan Pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku 3. Mengelola lingkungan hidup bersama Gubernur			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perundang-undangan di bidang perpajakan 5. Rencana kerja selama masa perpanjangan 6. Laporan akhir Kegiatan Operasi Produksi 7. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan Reklamasi 8. Neraca Sumber Daya dan Cadangan **Surat Izin Penambangan Batuan** 1. Surat Permohonan		4. Membayar iuran Pertambangan rakyat dan 5. Menyampai-kan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat secara berkala kepada Gubernur 6. Wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan 7. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.D.518

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Nomor Induk Berusaha 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari bumd/badan usaha milik desa, badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, koperasi, atau perusahaan perseorangan 4. Salinan kontrak/perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai		perundang-undangan Kewajiban SIPB 1. Menyusun dan menyampaikan Dokumen Perencanaan Penambangan kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan 2. Melakukan kegiatan penambangan setelah mendapatkan persetujuan Dokumen Perencanaan Penambangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah bagi permohonan SIPB untuk keperluan tertentu 5. Surat pernyataan untuk tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan usaha penambangan 6. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di		sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 4. Menerapkan kaidah Pertambangan yang baik 5. Menyelesai-kan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 7. Laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 8. Koordinat dan luas wilayah batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu yang dimohon **Izin Pertambangan Rakyat**		perundang-undangan 6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan SIPB kepada Gubernur 7. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.D.521

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1. Orang Perorangan a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk d. Surat keterangan dari kelurahan/ desa setempat yang menyata-kan pemohon merupakan penduduk setempat dan melakukan kegiatan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pertambangan rakyat e. Surat pernyataan kesanggu-pan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelola-an lingkungan hidup serta keselama-tan pertambangan dan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 2. Koperasi a. Surat Permohonan b. Salinan kartu tanda penduduk pengurus koperasi dilengkapi dengan salinan kartu tanda penduduk anggota koperasi c. Surat keterangan dari kelu-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							rahan/ desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus dan anggota koperasi merupakan penduduk setempat dan anggota koperasi merupakan penam-bang rakyat d. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							undangan di bidang perlindu-ngan dan pengelolaan lingkungan serta kese-lamatan per-tambangan e. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat**					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.D.526

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1. Orang Perorangan a. surat permohonan b. peta dan batas koordinat wilayah c. bukti pelunasan iuran pertamba-ngan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) dan e. rencana penambangan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							selama perpanjangan 2. Koperasi a. surat permohonan b. Peta dan batas koordinat wilayah c. bukti pelunasan iuran pertambangan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) e. rencana penambangan selama					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perpan-jangan dan f. Susunan pengurus					
38	08103	Penggalian Kerikil/ Sirtu	Kelompok ini mencakup usaha penggalian, pembersihan dan pemisahan kerikil. Hasil dari penggalian kerikil antara lain batu pasir, bongkah keras dan	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	**IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan 2. NIB dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan Pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau	1. IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi : 14 Hari 2. IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi : 14 Hari	**Kewajiban IUP** 1. Memenuhi Komitmen Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha 2. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sesuai tahap kegiatan, sesuai	-	- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di lintas provinsi - IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			pasir kerikil.				perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. surat pernyataan dari ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling	3. Perpanjangan IUP: 14 Hari 4. Surat Izin Pertambangan	ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Menyampaikan dan mendapatkan 4. persetujuan Laporan Akhir Eksplorasi 5. Menyampaikan dan		wilayah laut lebih dari 12 mil laut	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							singkat 1 (satu) tahun 5. surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 6. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi 7. bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan	batuan 14 Hari 5. Izin Pertam-bangan Rakyat 14 Hari (jangka waktu tidak termasuk pelaksanaan kunjungan lapangan)	mendapatkan persetujuan akhir Laporan Studi Kelayakan 6. Mendapatkan persetujuan Izin Lingkungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 7. Menyelesaikan Hak Atas Tanah sebelum melakukan Kegiatan Operasi pertambangan 8. Menyampaikan dan melaksanakan sesuai		- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada dalam satu provinsi - IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di wilayah laut sampai dengan 12 mil laut - SIPB - IPR	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pembayaran pencetakan peta WIUP atas permohonan wilayah 8. surat keterangan Fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data		Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 9. Menyampai-kan, mendapatkan persetujuan, dan melaksanakan Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca tambang serta penempatan jaminannya 10. Melaksanakan pemasangan,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Peta usulan WIUP tahap Kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang		pemeliharaan dan perawatan tanda batas WIUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 11. Menyampaikan Laporan Akhir Operasi Produksi dalam rangka permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi 12. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala sesuai tahap kegiatan IUP kepada Menteri/			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berlaku secara nasional 5. Laporan lengkap tahap Kegiatan Eksplorasi 6. Laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui oleh menteri 7. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan 8. Dokumen Rencana Reklamasi dan		Gubernur sesuai dengan kewenangan-nya 13. Memenuhi kebutuhan mineral dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 14. Memenuhi kewajiban penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 15. Menyampai-kan dan mendapatkan persetujuan Menteri/			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Rencana Pasca tambang 9. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 10. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 11. Bukti pelunasan iuran tetap tahap Kegiatan Eksplorasi tahun terakhir		gubernur sesuai kewenangan-nya atas perubahan pemegang saham badan usaha perseroan terbatas 16. Melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 17. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Perpanjangan IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi Paling sedikit harus dilengkapi 1. Surat Permohonan 2. Peta dan batas koordinat wilayah 3. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah 3 (tiga) tahun terakhir: 4. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di		perundang-undangan **Kewajiban IPR** 1. Melakukan kegiatan Penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan 2. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan Pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bidang perpajakan 5. Rencana kerja selama masa perpanjangan 6. Laporan akhir Kegiatan Operasi Produksi 7. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan Reklamasi 8. Neraca Sumber Daya dan Cadangan **Surat Izin Penambangan Batuan** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha		3. Mengelola lingkungan hidup bersama Gubernur 4. Membayar iuran Pertambangan rakyat dan 5. Menyampai-kan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat secara berkala kepada Gubernur 6. Wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan 7. Melaksanakan kewajiban			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari bumd/badan usaha milik desa, badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, koperasi, atau perusahaan perseorangan 4. Salinan kontrak/ perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah pusat atau		lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **Kewajiban SIPB** 1. Menyusun dan menyampai-kan Dokumen Perencanaan Penambangan kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan 2. Melakukan kegiatan penambangan setelah mendapatkan persetujuan Dokumen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pemerintah daerah bagi permohonan SIPB untuk keperluan tertentu 5. Surat pernyataan untuk tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan usaha penambangan 6. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan		Perencanaan Penambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 4. Menerapkan kaidah Pertambangan yang baik 5. Menyelesai-kan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan pengelolaan lingkungan hidup 7. Laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 8. Koordinat dan luas wilayah batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu yang dimohon **Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan		ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan SIPB kepada Gubernur 7. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.D.540

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk d. Surat keterangan dari kelurahani desa setempat yang me-nyatakan pemohon merupakan penduduk setempat dan melakukan kegiatan pertamba-ngan rakyat					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan pertambangan dan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perundang-undangan di bidang perpajakan 2. Koperasi a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk pengurus koperasi dilengkapi dengan salinan kartu tanda penduduk anggota koperasi d. Surat keterangan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dari kelurahan/desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus dan anggota koperasi merupakan penduduk setempat dan anggota koperasi merupakan penambang rakyat e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta keselamatan pertambangan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat 1. Orang Perorangan a. surat permoho-nan b. peta dan batas koordinat wilayah c. bukti pelunasan iuran pertamba-ngan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan						

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lingkungan) dan e. rencana penambangan selama perpanjangan 2. Koperasi a. surat permohonan b. Peta dan batas koordinat wilayah c. bukti pelunasan iuran pertamba-ngan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. laporan kegiatan (kegiatan tambang,					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengelolaan lingkungan) e. rencana penambangan selama perpanjangan dan f. Susunan pengurus					
39	08104	Penggalian Pasir	Pengambilan pasir di wilayah izin usaha pertambangan Kelompok ini mencakup usaha penggalian,	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	**IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data	1. IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi : 14 Hari 2. IUP Tahap Kegiatan	**Kewajiban IUP** 1. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sesuai tahap kegiatan, sesuai	-	- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di lintas provinsi - IUP dalam rangka	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			pember-sihan dan pemisahan pasir. Hasil dari penggalian pasir berupa pasir				3. Susunan Pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan	Operasi Produk-si : 14 Hari 3. Perpan-jangan	ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampai-kan dan mendapatkan persetujuan		penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di wilayah laut lebih dari 12 mil laut	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			beton, pasir pasang (sedikit mengandung tanah), pasir uruk (banyak mengandung tanah) dan lainnya.				perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Surat pernyataan dari ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun 5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	IUP: 14 Hari 4. Surat Izin Pertambangan batuan 14 Hari 5. Izin Pertambangan Rakyat 14 Hari (jangka waktu tidak termasuk pelaksanaan kunjungan	Laporan Akhir Eksplorasi 3. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan akhir Laporan Studi Kelayakan 4. Mendapatkan persetujuan Izin Lingkungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Menyelesaikan Hak Atas Tanah sebelum melakukan Kegiatan Operasi pertambangan		- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada dalam satu provinsi - IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di wilayah laut sampai dengan 12 mil laut - SIPB - IPR	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi 7. Bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP atas permohonan wilayah 8. Surat keterangan Fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di	lapa-ngan)	6. Menyampai-kan dan melaksanakan sesuai Rencana Induk Pengemba-ngan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 7. Menyampai-kan, mendapatkan persetujuan, dan melaksanakan Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca tambang serta			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bidang perpajakan **IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data		penempatan jaminannya 8. Melaksanakan pemasangan, pemeliharaan dan perawatan tanda batas WIUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 9. Menyampaikan Laporan Akhir Operasi Produksi dalam rangka permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi 10. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala sesuai			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Peta usulan WIUP tahap Kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional 5. Laporan lengkap tahap Kegiatan Eksplorasi 6. Laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui oleh menteri 7. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang		tahap kegiatan IUP kepada Menteri/ Gubernur sesuai dengan kewenangan-nya 11. Memenuhi kebutuhan mineral dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 12. Memenuhi kewajiban penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan 8. Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca tambang 9. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 10. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di		13. Menyampai-kan dan mendapatkan persetujuan Menteri/ gubernur sesuai kewenangan-nya atas perubahan pemegang saham badan usaha perseroan terbatas 14. Melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 15. Melaksanakan kewajiban			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bidang perpajakan 11. Bukti pelunasan iuran tetap tahap Kegiatan Eksplorasi tahun terakhir **Perpanjangan IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi** Paling sedikit harus dilengkapi 1. Surat Permohonan 2. Peta dan batas koordinat wilayah 3. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak		lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **Kewajiban IPR** 1. Melakukan kegiatan Penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan 2. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan Pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							daerah 3 (tiga) tahun terakhir: 4. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 5. Rencana kerja selama masa perpanjangan 6. Laporan akhir Kegiatan Operasi Produksi 7. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan Reklamasi		memenuhi standar yang berlaku 3. Mengelola lingkungan hidup bersama Gubernur 4. Membayar iuran Pertambangan rakyat dan 5. Menyampai-kan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat secara berkala kepada Gubernur 6. Wajib menaati ketentuan persyaratan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							8. Neraca Sumber Daya dan Cadangan **Surat Izin Penambangan Batuan** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari bumd/badan usaha milik desa, badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam		teknis pertambangan 7. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **Kewajiban SIPB** 1. Menyusun dan menyampai-kan Dokumen Perencanaan Penambangan kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan 2. Melakukan kegiatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							negeri, koperasi, atau perusahaan perseorangan 4. Salinan kontrak/perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah bagi permohonan SIPB untuk keperluan tertentu 5. Surat pernyataan untuk tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan		penambangan setelah mendapatkan persetujuan Dokumen Perencanaan Penambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 4. Menerapkan kaidah Pertambangan yang baik			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							usaha penambangan 6. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 7. Laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 8. Koordinat dan luas wilayah		5. Menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan SIPB kepada Gubernur 7. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu yang dimohon **Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk d. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menyata-kan pemohon merupakan penduduk setempat dan melakukan kegiatan pertamba-ngan rakyat e. Surat pernyataan kesanggu-pan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindu-ngan dan pengelolaan lingkungan hidup serta					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							keselamatan pertambangan dan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 2. Koperasi a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk pengurus koperasi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dilengkapi dengan salinan kartu tanda penduduk anggota koperasi d. Surat keterangan dari kelurahan/ desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus dan anggota koperasi merupakan penduduk setempat dan anggota koperasi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							merupakan penambang rakyat e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindu-ngan dan pengelolaan lingkungan serta keselamatan pertam-bangan f. Surat keterangan fiskal sesuai					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. surat permohonan b. peta dan batas koordinat wilayah c. bukti pelunasan iuran pertambanga					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							n rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) dan e. rencana penambangan selama perpanjangan 2. Koperasi a. surat permohonan b. Peta dan batas koordinat wilayah c. bukti pelunasan iuran					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pertambangan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) e. rencana penambangan selama perpanjangan dan f. Susunan pengurus					
40	08105	Penggalian Tanah dan	Kelompok ini mencakup usaha penggalian tanah dan	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	**IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan	1. IUP Tahap Kegiatan Eksplo-	**Kewajiban IUP** 1. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan	-	- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Tanah Liat	tanah liat. Kegiatan pembentukan, penghancuran dan penggilingan tanah dan tanah liat dimasukkan dalam kelompok ini. Hasil dari penggalian tanah dan tanah liat/lempung antara lain kaolin (*china clay*), *ball clay (firing clay)*, abu bumi,				2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan Pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Surat pernyataan dari ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling	rasi : 14 Hari 2. IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi : 14 Hari 3. Perpanjangan IUP: 14 Hari 4. Surat Izin Pertambangan	Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sesuai tahap kegiatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Laporan Akhir Eksplorasi 3. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan akhir Laporan Studi Kelayakan 4. Mendapatkan persetujuan Izin		wilayahnya berada di lintas provinsi - IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di wilayah laut lebih dari 12 mil laut	
											- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			serpih dan tanah urug				singkat 1 (satu) tahun 5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 6. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi 7. Bukti pembayaran biaya pencadangan	batuan 14 Hari 6. Izin Pertambangan Rakyat 14 Hari (jangka waktu tidak termasuk pelaksanaan kunjungan lapangan)	Lingkungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Menyelesaikan Hak Atas Tanah sebelum melakukan Kegiatan Operasi pertambangan 6. Menyampaikan dan melaksanakan sesuai Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai ketentuan		berada dalam satu provinsi - IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di wilayah laut sampai dengan 12 mil laut - SIPB - IPR	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP atas permohonan wilayah 8. Surat keterangan Fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam		peraturan perundang-undangan 7. Menyampai-kan, mendapatkan persetujuan, dan melaksanakan Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca tambang serta penempatan jaminannya 8. Melaksanakan pemasangan, pemeliharaan dan perawatan tanda batas WIUP sesuai ketentuan peraturan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Peta usulan WIUP tahap Kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan		perundang-undangan 9. Menyampaikan Laporan Akhir Operasi Produksi dalam rangka permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi 10. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala sesuai tahap kegiatan IUP kepada Menteri/Gubernur sesuai dengan kewenangannya 11. Memenuhi kebutuhan mineral dalam			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional 5. Laporan lengkap tahap Kegiatan Eksplorasi 6. Laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui oleh menteri 7. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan 8. Dokumen rencana		negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 12. Memenuhi kewajiban penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 13. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Menteri/ gubernur sesuai kewenangannya atas perubahan pemegang saham badan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Reklamasi dan rencana Pasca tambang 9. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 10. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 11. Bukti pelunasan iuran tetap tahap Kegiatan Eksplorasi tahun terakhir		usaha perseroan terbatas 14. Melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 15. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **Kewajiban IPR** 1. Melakukan kegiatan Penambangan paling lambat			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Perpanjangan IUP tahap Kegiatan Operasi Produksi Paling sedikit harus dilengkapi 1. Surat Permohonan 2. Peta dan batas koordinat wilayah 3. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah 3 (tiga) tahun terakhir: 4. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di		3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan 2. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan Pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku 3. Mengelola lingkungan hidup bersama Gubernur 4. Membayar iuran Pertambangan rakyat dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bidang perpajakan 5. Rencana kerja selama masa perpanjangan 6. Laporan akhir Kegiatan Operasi Produksi 7. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan Reklamasi 8. Neraca Sumber Daya dan Cadangan **Surat Izin Penambangan Batuan** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha		5. Menyampai-kan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat secara berkala kepada Gubernur 6. Wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan 7. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Kewajiban SIPB			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari bumd/badan usaha milik desa, badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, koperasi, atau perusahaan perseorangan 4. Salinan kontrak/perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah pusat atau		1. Menyusun dan menyampaikan Dokumen Perencanaan Penambangan kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan 2. Melakukan kegiatan penambangan setelah mendapatkan persetujuan Dokumen Perencanaan Penambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pemerintah daerah bagi permohonan SIPB untuk keperluan tertentu 5. Surat pernyataan untuk tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan usaha penambangan 6. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan		3. Melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 4. Menerapkan kaidah Pertambangan yang baik 5. Menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Menyampaikan laporan pelaksanaan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan pengelolaan lingkungan hidup 7. Laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 8. Koordinat dan luas wilayah batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu yang dimohon **Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan		kegiatan SIPB kepada Gubernur 7. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk d. Surat keterangan dari kelurahan/ desa setempat yang menyata-kan pemohon merupakan penduduk setempat dan melakukan kegiatan pertamba-ngan rakyat e. Surat pernyataan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keselama-tan pertambanga n dan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.D.580

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bidang perpajakan 2. Koperasi a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk pengurus koperasi dilengkapi dengan salinan kartu tanda penduduk anggota koperasi d. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang menyatakan seluruh pengurus dan anggota koperasi merupakan penduduk setempat dan anggota koperasi merupakan penambang rakyat e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta keselamatan pertambangan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. surat permohonan b. peta dan batas koordinat wilayah c. bukti pelunasan iuran pertambangan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) dan e. rencana penambangan selama perpanjangan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Koperasi a. surat permohonan b. Peta dan batas koordinat wilayah c. bukti pelunasan iuran pertamba-ngan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) e. rencana penambangan selama perpanjangan dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							f. Susunan pengurus					
41	08106	Penggalian Gips	Kelompok ini mencakup usaha penggalian gips. Termasuk disini kegiatan pembersihan, dan penghalusannya.	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	**IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan Pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi	1. IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi : 14 Hari 2. IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi : 14 Hari 3. Perpanjangan	**Kewajiban IUP** 1. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sesuai tahap kegiatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Laporan Akhir Eksplorasi	-	- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di lintas provinsi - IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di wilayah laut lebih dari 12 mil laut	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pemutakhiran data 4. Surat pernyataan dari ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun 5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 6. Bukti penempatan	IUP: 14 Hari 4. Izin Pertambangan Rakyat 14 Hari (jangka waktu tidak termasuk pelaksanaan kunjungan lapangan)	3. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan akhir Laporan Studi Kelayakan 4. Mendapatkan persetujuan Izin Lingkungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Menyelesaikan Hak Atas Tanah sebelum melakukan Kegiatan Operasi pertambangan 6. Menyampaikan dan		- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada dalam satu provinsi - IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di wilayah laut sampai dengan 12 mil laut - IPR	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi 7. Bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP atas permohonan wilayah 8. Surat keterangan Fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan		melaksanakan sesuai Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 7. Menyampaikan, mendapatkan persetujuan, dan melaksanakan Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca tambang serta penempatan jaminannya			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data		8. Melaksanakan pemasangan, pemeliharaan dan perawatan tanda batas WIUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 9. Menyampai-kan Laporan Akhir Operasi Produksi dalam rangka permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi 10. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala sesuai tahap kegiatan IUP			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Peta usulan WIUP tahap Kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional 5. Laporan lengkap tahap Kegiatan Eksplorasi 6. Laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui oleh menteri 7. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang		kepada Menteri/Gubernur sesuai dengan kewenangan-nya 11. Memenuhi kebutuhan mineral dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 12. Memenuhi kewajiban penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 13. Menyampai-kan dan mendapatkan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan 8. Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca tambang 9. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 10. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di		persetujuan Menteri/ gubernur sesuai kewenangan-nya atas perubahan pemegang saham badan usaha perseroan terbatas 14. Melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 15. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bidang perpajakan 11. Bukti pelunasan iuran tetap tahap Kegiatan Eksplorasi tahun terakhir **Perpanjangan IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi** Paling sedikit harus dilengkapi 1. Surat Permohonan 2. Peta dan batas koordinat wilayah 3. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak		peraturan perundang-undangan **Kewajiban IPR** 1. Melakukan kegiatan Penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan 2. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan Pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							daerah 3 (tiga) tahun terakhir 4. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 5. Rencana kerja selama masa perpanjangan 6. Laporan akhir Kegiatan Operasi Produksi 7. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan Reklamasi		3. Mengelola lingkungan hidup bersama Gubernur 4. Membayar iuran Pertambangan rakyat dan 5. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat secara berkala kepada Gubernur 6. Wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan 7. Melaksanakan kewajiban			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							8. Neraca Sumber Daya dan Cadangan **Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk d. Surat keterangan dari kelurahan desa setempat yang menyatakan		lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pemohon merupakan penduduk setempat dan melakukan kegiatan pertamba-ngan rakyat e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindu-ngan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pertambangan dan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 2. Koperasi a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk pengurus koperasi dilengkapi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dengan salinan kartu tanda penduduk anggota koperasi d. Surat keterangan dari kelurahan/ desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus dan anggota koperasi merupakan penduduk setempat dan anggota koperasi merupakan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penambang rakyat e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta keselamatan pertambangan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. surat permohonan b. peta dan batas koordinat wilayah c. bukti pelunasan iuran pertamba-ngan rakyat produksi 3					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(tiga) tahun terakhir d. laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) dan e. rencana penambangan selama perpanjangan 2. Koperasi a. surat permohonan b. Peta dan batas koordinat wilayah c. bukti pelunasan iuran pertamba-ngan rakyat					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) e. rencana penambangan selama perpanjangan dan f. Susunan pengurus					
42	08107	Penggalian Tras	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	**IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data	1. IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi : 14 Hari 2. IUP Tahap	**Kewajiban IUP** 1. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sesuai tahap	-	- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Susunan Pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Surat pernyataan dari ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun 5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi	Kegiatan Operasi Produksi : 14 Hari 3. Perpanjangan IUP: 14 Hari 4. Izin Pertambangan Rakyat 14 Hari (jangka waktu tidak termasuk pelaksanaan kunju-	kegiatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Laporan Akhir Eksplorasi 3. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan akhir Laporan Studi Kelayakan 4. Mendapatkan persetujuan Izin Lingkungan, sesuai ketentuan peraturan		- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di wilayah laut lebih dari 12 mil laut	
											- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada dalam satu provinsi - IUP dalam rangka penanaman	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 6. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi 7. Bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP atas permohonan wilayah	ngan lapa-ngan)	perundang-undangan 5. Menyelesai-kan Hak Atas Tanah sebelum melakukan Kegiatan Operasi pertambangan 6. Menyampai-kan dan melaksanakan sesuai Rencana Induk Pengembanga n dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di wilayah laut sampai dengan 12 mil laut - IPR	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							8. Surat keterangan Fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan		7. Menyampai-kan, mendapatkan persetujuan, dan melaksanakan Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca tambang serta penempatan jaminannya 8. Melaksanakan pemasangan, pemeliharaan dan perawatan tanda batas WIUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 9. Menyampai-kan Laporan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Peta usulan WIUP tahap Kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional 5. Laporan lengkap tahap Kegiatan Eksplorasi		Akhir Operasi Produksi dalam rangka permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi 10. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala sesuai tahap kegiatan IUP kepada Menteri/ Gubernur sesuai dengan kewenangan-nya 11. Memenuhi kebutuhan mineral dalam negeri sesuai ketentuan peraturan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui oleh menteri 7. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan 8. Dokumen Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca tambang 9. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah		perundang-undangan 12. Memenuhi kewajiban penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 13. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Menteri/ gubernur sesuai kewenangannya atas perubahan pemegang saham badan usaha perseroan terbatas			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							diaudit oleh akuntan publik 10. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 11. Bukti pelunasan iuran tetap tahap Kegiatan Eksplorasi tahun terakhir **Perpanjangan IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi** Paling sedikit harus dilengkapi 1. Surat Permohonan		14. Melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 15. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **Kewajiban IPR** 1. Melakukan kegiatan Penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Peta dan batas koordinat wilayah 3. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah 3 (tiga) tahun terakhir 4. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 5. Rencana kerja selama masa perpanjangan 6. Laporan akhir Kegiatan Operasi Produksi		setelah IPR diterbitkan 2. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan Pertambang-an, penge-lolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku 3. Mengelola lingkungan hidup bersama Gubernur 4. Membayar iuran Pertambangan rakyat dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							7. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan Reklamasi 8. Neraca Sumber Daya dan Cadangan **Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk d. Surat keterangan		5. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat secara berkala kepada Gubernur 6. Wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan 7. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dari kelurahan/ desa setempat yang menyatakan pemohon merupakan penduduk setempat dan melakukan kegiatan pertambangan rakyat e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan pertambangan dan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 2. Koperasi a. Surat Permohonan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk pengurus koperasi dilengkapi dengan salinan kartu tanda penduduk anggota koperasi d. Surat keterangan dari kelurahan/ desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							anggota koperasi merupakan penduduk setempat dan anggota koperasi merupakan penambang rakyat e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindu-ngan dan pengelolaan lingkungan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							serta keselamatan pertambangan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. surat permohonan b. peta dan batas					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							koordinat wilayah c. bukti pelunasan iuran pertam-bangan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) dan e. rencana penambangan selama perpanjangan 2. Koperasi a. surat permohonan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Peta dan batas koordinat wilayah c. bukti pelunasan iuran pertamba-ngan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) e. rencana penambangan selama perpanjangan dan f. Susunan pengurus					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.D.616

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
43	08108	Penggalian Batu Apung	Kelompok ini mencakup usaha penggalian batu apung (jenis batuan yang berwarna terang, mengandung buih yang terbuat dari gelembung berdinding gelas, dan biasanya disebut juga	- Mikro - Kecil - Menenga - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	**IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan Pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi	1. IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi : 14 Hari 2. IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi : 14 Hari 3. Perpanjangan	**Kewajiban IUP** 1. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sesuai tahap kegiatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Laporan Akhir Eksplorasi	-	- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di lintas provinsi - IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di wilayah laut lebih dari 12 mil laut	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			sebagai batuan gelas vulkanik silikat). Termasuk disini kegiatan pembersihannya.				pemutakhiran data 4. Surat pernyataan dari ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun 5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 6. Bukti penempatan	IUP: 14 Hari 4. Izin Pertambangan Rakyat 14 Hari (jangka waktu tidak termasuk pelaksanaan kunjungan lapangan)	3. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan akhir Laporan Studi Kelayakan 4. Mendapatkan persetujuan Izin Lingkungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Menyelesaikan Hak Atas Tanah sebelum melakukan Kegiatan Operasi pertambangan 6. Menyampaikan dan		- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada dalam satu provinsi - IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di wilayah laut sampai dengan 12 mil laut - IPR	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi 7. Bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP atas permohonan wilayah 8. Surat keterangan Fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan		melaksanakan sesuai Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 7. Menyampaikan, mendapatkan persetujuan, dan melaksanakan Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca tambang serta penempatan jaminannya			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data		8. Melaksanakan pemasangan, pemeliharaan dan perawatan tanda batas WIUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 9. Menyampaikan Laporan Akhir Operasi Produksi dalam rangka permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi 10. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala sesuai tahap kegiatan IUP			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Peta usulan WIUP tahap Kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional 5. Laporan lengkap tahap Kegiatan Eksplorasi 6. Laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui oleh menteri 7. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang		kepada Menteri/Gubernur sesuai dengan kewenangannya 11. Memenuhi kebutuhan mineral dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 12. Memenuhi kewajiban penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 13. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan 8. Dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pasca tambang 9. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 10. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di		Menteri/ gubernur sesuai kewenangannya atas perubahan pemegang saham badan usaha perseroan terbatas 14. Melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 15. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bidang perpajakan 11. Bukti pelunasan iuran tetap tahap Kegiatan Eksplorasi tahun terakhir **Perpanjangan IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi** Paling sedikit harus dilengkapi 1. Surat Permohonan 2. Peta dan batas koordinat wilayah 3. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak		perundang-undangan **Kewajiban IPR** 1. Melakukan kegiatan Penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan 2. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan Pertambang-an, penge-lolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							daerah 3 (tiga) tahun terakhir 4. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 5. Rencana kerja selama masa perpanjangan 6. Laporan akhir Kegiatan Operasi Produksi 7. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan Reklamasi		3. Mengelola lingkungan hidup bersama Gubernur 4. Membayar iuran Pertambangan rakyat dan 5. Menyampaipkan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat secara berkala kepada Gubernur 6. Wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan 7. Melaksanakan kewajiban			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							8. Neraca Sumber Daya dan Cadangan **Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk d. Surat keterangan dari kelurahan/ desa setempat yang menyatakan		lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pemohon merupakan penduduk setempat dan melakukan kegiatan pertam-bangan rakyat e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							keselamatan pertambangan dan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 2. Koperasi a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk pengurus koperasi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dilengkapi dengan salinan kartu tanda penduduk anggota koperasi d. Surat keterangan dari kelurahan/ desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus dan anggota koperasi merupakan penduduk setempat dan anggota koperasi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							merupakan penambang rakyat e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindu-ngan dan pengelolaan lingkungan serta keselamatan pertam-bangan f. Surat keterangan fiskal sesuai					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. surat permohonan b. peta dan batas koordinat wilayah c. bukti pelunasan iuran pertam-bangan rakyat produksi 3					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(tiga) tahun terakhir d. laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) dan e. rencana penambangan selama perpanjangan 2. Koperasi a. surat permohonan b. Peta dan batas koordinat wilayah c. bukti pelunasan iuran pertamba-ngan rakyat					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) e. rencana penambangan selama perpanjanga dan f. Susunan pengurus					
44	08109	Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha penggalian batu, pasir dan tanah liat lainnya, yang tidak	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	**IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi	1. IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi : 14 Hari 2. IUP Tahap	**Kewajiban IUP** 1. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sesuai tahap	-	- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			terklasifikasikan di kelompok 08101 - 08108. Kegiatan penggalian yang masuk dalam kelompok ini seperti penggalian diorit, basalt,				pemutakhiran data 3. Susunan Pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Surat pernyataan dari	Kegiatan Operasi Produksi : 14 Hari 3. Perpanjangan IUP: 14 Hari 4. Surat Izin Pertam-	kegiatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Laporan Akhir Eksplorasi 3. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan akhir Laporan		- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di wilayah laut lebih dari 12 mil laut	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			breksi, dan lainnya.				ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun 5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 6. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan	bangan batuan 14 Hari 5. Izin Pertambangan Rakyat 14 Hari (jangka waktu tidak termasuk pelaksanaan kunjungan lapangan)	Studi Kelayakan 4. Mendapatkan persetujuan Izin Lingkungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Menyelesaikan Hak Atas Tanah sebelum melakukan Kegiatan Operasi pertambangan 6. Menyampaikan dan melaksanakan sesuai Rencana Induk Pengemba-		- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada dalam satu provinsi - IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di wilayah laut sampai dengan 12 mil laut - SIPB - IPR	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Kegiatan Eksplorasi 7. Bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP atas permohonan wilayah 8. Surat keterangan Fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan		ngan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 7. Menyampai-kan, mendapatkan persetujuan, dan melaksanakan Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca tambang serta penempatan jaminannya 8. Melaksanakan pemasangan, pemeliharaan dan perawatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Peta usulan WIUP tahap		tanda batas WIUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 9. Menyampai-kan Laporan Akhir Operasi Produksi dalam rangka permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi 10. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala sesuai tahap kegiatan IUP kepada Menteri/ Gubernur sesuai dengan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional 5. Laporan lengkap tahap Kegiatan Eksplorasi 6. Laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui oleh menteri 7. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang		kewenangan-nya 11. Memenuhi kebutuhan mineral dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 12. Memenuhi kewajiban penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 13. Menyampai-kan dan mendapatkan persetujuan Menteri/ gubernur sesuai			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan 8. Dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pasca tambang 9. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 10. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan		kewenangannya atas perubahan pemegang saham badan usaha perseroan terbatas 14. Melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 15. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							11. Bukti pelunasan iuran tetap tahap Kegiatan Eksplorasi tahun terakhir **Perpanjangan IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi** Paling sedikit harus dilengkapi 1. Surat Permohonan 2. Peta dan batas koordinat wilayah 3. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah 3 (tiga) tahun terakhir 4. Surat keterangan fiskal		**Kewajiban IPR** 1. Melakukan kegiatan Penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan 2. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan Pertambang-an, penge-lolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku 3. Mengelola lingkungan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 5. Rencana kerja selama masa perpanjangan 6. Laporan akhir Kegiatan Operasi Produksi 7. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan Reklamasi 8. Neraca Sumber Daya dan Cadangan		hidup bersama Gubernur 4. Membayar iuran Pertambangan rakyat dan 5. Menyampai-kan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat secara berkala kepada Gubernur 6. Wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan 7. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.D.640

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Surat Izin Penambangan Batuan 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari bumd/badan usaha milik desa, badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, koperasi, atau perusahaan perseorangan		ketentuan peraturan perundang-undangan **Kewajiban SIPB** 1. Menyusun dan menyampai-kan Dokumen Perencanaan Penambangan kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan 2. Melakukan kegiatan penambangan setelah mendapatkan persetujuan Dokumen			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Salinan kontrak/ perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah bagi permohonan SIPB untuk keperluan tertentu 5. Surat pernyataan untuk tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan usaha penambangan 6. Surat pernyataan		Perencanaan Penambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 4. Menerapkan kaidah Pertambangan yang baik 5. Menyelesai-kan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 7. Laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 8. Koordinat dan luas wilayah batuan jenis tertentu atau untuk keperluan		ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan SIPB kepada Gubernur 7. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tertentu yang dimohon **Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk d. Surat keterangan dari kelurahani desa setempat yang me-nyatakan pemohon					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							merupakan penduduk setempat dan melakukan kegiatan pertamba-ngan rakyat e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan					

I.D.645

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pertamba-ngan dan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 2. Koperasi a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk pengurus koperasi dilengkapi dengan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							salinan kartu tanda penduduk anggota koperasi d. Surat keterangan dari kelurahan/ desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus dan anggota koperasi merupakan penduduk setempat dan anggota koperasi merupakan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penambang rakyat e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindu-ngan dan pengelolaan lingkungan serta keselamatan pertam-bangan f. Surat keterangan fiskal sesuai					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. surat permohonan b. peta dan batas koordinat wilayah c. bukti pelunasan iuran pertam-bangan rakyat					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) dan e. rencana penambangan selama perpanjangan 2. Koperasi a. surat permohonan b. Peta dan batas koordinat wilayah c. bukti pelunasan iuran pertamba-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ngan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) e. rencana penambangan selama perpanjangan dan f. Susunan pengurus					
45	08911	Pertam-bangan Belerang	Kelompok ini mencakup usaha pertambangan bijih belerang. Termasuk	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	**IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi	1. IUP Tahap Kegiatan Eksplo-rasi : 14 Hari	**Kewajiban IUP** 1. Menyampai-kan dan mendapatkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB)	-	- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			juga kegiatan penghancuran, dan pembersihan terhadap mineral belerang. Pengolahan lanjutan dari mineral belerang dimasukkan dalam kelompok 20114.				pemutakhiran data 3. Susunan Pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Surat pernyataan dari ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun 5. Surat pernyataan	2. IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi : 14 Hari 3. Perpanjangan IUP: 14 Hari 4. Izin Pertambangan Rakyat 14 Hari (jangka waktu tidak termasuk pelaksanaan kunjungan	sesuai tahap kegiatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Laporan Akhir Eksplorasi 3. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan akhir Laporan Studi Kelayakan 4. Mendapatkan persetujuan Izin Lingkungan, sesuai ketentuan		lintas provinsi - IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di wilayah laut lebih dari 12 mil laut	
											- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada dalam satu provinsi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 6. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi 7. Bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP atas	lapangan)	peraturan perundang-undangan 5. Menyelesaikan Hak Atas Tanah sebelum melakukan Kegiatan Operasi pertambangan 6. Menyampaikan dan melaksanakan sesuai Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di wilayah laut sampai dengan 12 mil laut - IPR	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							permohonan wilayah 8. Surat keterangan Fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi** 1. Surat Permohonan 2. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari		7. Menyampaikan, mendapatkan persetujuan, dan melaksanakan Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca tambang serta penempatan jaminannya 8. Melaksanakan pemasangan, pemeliharaan dan perawatan tanda batas WIUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 9. Menyampaikan Laporan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Peta usulan WIUP tahap Kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional 4. Laporan lengkap tahap Kegiatan Eksplorasi 5. Laporan Studi Kelayakan yang		Akhir Operasi Produksi dalam rangka permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi 10. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala sesuai tahap kegiatan IUP kepada Menteri/ Gubernur sesuai dengan kewenangan-nya 11. Memenuhi kebutuhan mineral dalam negeri sesuai ketentuan peraturan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							telah disetujui oleh menteri 6. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan 7. Dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pasca tambang 8. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik		perundang-undangan 12. Memenuhi kewajiban penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 13. Menyampai-kan dan mendapatkan persetujuan Menteri/ gubernur sesuai kewenangan-nya atas perubahan pemegang saham badan usaha perseroan terbatas			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							9. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 10. Bukti pelunasan iuran tetap tahap Kegiatan Eksplorasi tahun terakhir **Perpanjangan IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi** Paling sedikit harus dilengkapi 1. Surat Permohonan 2. Peta dan batas koordinat wilayah		14. Melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 15. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **Kewajiban IPR** 1. Melakukan kegiatan Penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah 3 (tiga) tahun terakhir: 4. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 5. Rencana kerja selama masa perpanjangan 6. Laporan akhir Kegiatan Operasi Produksi 7. Laporan pelaksanaan pengelolaan		2. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan Pertambang-an, penge-lolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku 3. Mengelola lingkungan hidup bersama Gubernur 4. Membayar iuran Pertambangan rakyat dan 5. Menyampai-kan laporan pelaksanaan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lingkungan dan Reklamasi 8. Neraca Sumber Daya dan Cadangan **Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk d. Surat keterangan dari kelurahan/ desa setempat		kegiatan Usaha Pertambangan rakyat secara berkala kepada Gubernur 6. Wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan 7. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang menyatakan pemohon merupakan penduduk setempat dan melakukan kegiatan pertambangan rakyat e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							hidup serta keselamatan pertam-bangan dan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 2. Koperasi a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk pengurus					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							koperasi dilengkapi dengan salinan kartu tanda penduduk anggota koperasi d. Surat keterangan dari kelurahan/ e. desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus dan anggota koperasi merupakan penduduk setempat dan anggota					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							koperasi merupakan penambang rakyat f. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindu-ngan dan pengelolaan lingkungan serta keselamatan pertam-bangan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							g. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. surat permohonan b. peta dan batas koordinat wilayah c. bukti pelunasan iuran					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pertamba-ngan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) dan e. rencana penambangan selama perpanjangan 2. Koperasi a. surat permohonan b. Peta dan batas koordinat wilayah c. bukti pelunasan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							iuran pertambangan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) e. rencana penambangan selama perpanjangan dan f. Susunan pengurus					
46	08912	Pertambangan Fosfat	Kelompok ini mencakup usaha pertambangan bahan galian	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	**IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan	1. IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi : 14 Hari	**Kewajiban IUP** 1. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Rencana Kerja	Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif sebagai	- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			fosfat. Termasuk disini kegiatan sortasi, penghancuran, pembersihan dan peningkatan kadar bahan galian fosfat.				2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan Pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Surat pernyataan dari ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun	2. IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi : 14 Hari 3. Perpanjangan IUP: 14 Hari 4. Izin Pertambangan Rakyat 14 Hari (jangka waktu tidak termasuk pelaksanaan kunjungan lapangan)	dan Anggaran Biaya (RKAB) sesuai tahap kegiatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Laporan Akhir Eksplorasi 3. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan akhir Laporan Studi Kelayakan 4. Mendapatkan persetujuan Izin Lingkungan,	Penunjang Kegiatan Utama	berada di lintas provinsi - IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di wilayah laut lebih dari 12 mil laut	
											- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 6. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi 7. Bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta		sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Menyelesai-kan Hak Atas Tanah sebelum melakukan Kegiatan Operasi pertambangan 6. Menyampai-kan dan melaksanakan sesuai Rencana Induk Pengemba-ngan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai ketentuan peraturan		berada dalam satu provinsi - IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di wilayah laut sampai dengan 12 mil laut - IPR	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							WIUP atas permohonan wilayah 8. Surat keterangan Fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data		perundang-undangan 7. Menyampai-kan, mendapatkan persetujuan, dan melaksanakan Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca tambang serta penempatan jaminannya 8. Melaksanakan pemasangan, pemeliharaan dan perawatan tanda batas WIUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Peta usulan WIUP tahap Kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang		9. Menyampaikan Laporan Akhir Operasi Produksi dalam rangka permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi 10. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala sesuai tahap kegiatan IUP kepada Menteri/ Gubernur sesuai dengan kewenangannya 11. Memenuhi kebutuhan mineral dalam negeri sesuai ketentuan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berlaku secara nasional 5. Laporan lengkap tahap Kegiatan Eksplorasi 6. Laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui oleh menteri 7. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan 8. Dokumen rencana Reklamasi dan		peraturan perundang-undangan 12. Memenuhi kewajiban penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 13. Menyampai-kan dan mendapatkan persetujuan Menteri/gubernur sesuai kewenangannya atas perubahan pemegang saham badan usaha perseroan terbatas			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.D.671

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							rencana Pasca tambang 9. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 10. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 11. Bukti pelunasan iuran tetap tahap Kegiatan Eksplorasi tahun terakhir		14. Melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 15. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **Kewajiban IPR** 1. Melakukan kegiatan Penambangan paling lambat 3 (tiga)			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Perpanjangan IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi Paling sedikit harus dilengkapi 1. Surat Permohonan 2. Peta dan batas koordinat wilayah 3. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah 3 (tiga) tahun terakhir 4. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di		bulan setelah IPR diterbitkan 2. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan Pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku 3. Mengelola lingkungan hidup bersama Gubernur 4. Membayar iuran Pertamba-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bidang perpajakan 5. Rencana kerja selama masa perpanjangan 6. Laporan akhir Kegiatan Operasi Produksi 7. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan Reklamasi 8. Neraca Sumber Daya dan Cadangan **Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. Surat Permohonan		ngan rakyat dan 5. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat secara berkala kepada Gubernur 6. Wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan 7. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk d. Surat keterangan dari kelurahan/ desa setempat yang menyatakan pemohon merupakan penduduk setempat dan melakukan kegiatan pertamba-ngan rakyat e. Surat pernyataan kesanggupan untuk		perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan pertam-bangan dan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Koperasi a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk pengurus koperasi dilengkapi dengan salinan kartu tanda penduduk anggota koperasi d. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat yang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menyatakan seluruh pengurus dan anggota koperasi merupakan penduduk setempat dan anggota koperasi merupakan penambang rakyat e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindu-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ngan dan pengelolaan lingkungan serta keselamatan pertam-bangan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. surat permohonan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. peta dan batas koordinat wilayah c. bukti pelunasan iuran pertamba-ngan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) dan e. rencana penambangan selama perpanjangan 2. Koperasi					

I.D.680

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. surat permohonan b. Peta dan batas koordinat wilayah c. bukti pelunasan iuran pertam-bangan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) e. rencana penambangan selama perpanjangan dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							f. Susunan pengurus					
47	08913	Pertam-bangan Nitrat	Kelompok ini mencakup usaha pertambangan bahan galian nitrat. Termasuk disini kegiatan pembersihan, pemecahan, dan sortasi dengan cara lain terhadap	- Mikro - Kecil - Menenga - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	**IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan Pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau	1. IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi : 14 Hari 2. IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi : 14 Hari 3. Perpanjangan IUP: 14 Hari 4. Izin Pertambangan	**Kewajiban IUP** 1. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sesuai tahap kegiatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampaikan dan mendapatkan	-	- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di lintas provinsi - IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di wilayah laut	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			bahan galian nitrat				perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Surat pernyataan dari ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun 5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan	Rakyat 14 Hari (jangka waktu tidak termasuk pelaksanaan kunjungan lapangan)	persetujuan Laporan Akhir Eksplorasi 3. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan akhir Laporan Studi Kelayakan 4. Mendapatkan persetujuan Izin Lingkungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		lebih dari 12 mil laut	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 6. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi 7. Bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP atas permohonan wilayah 8. Surat keterangan		5. Menyelesaikan Hak Atas Tanah sebelum melakukan Kegiatan Operasi pertambangan 6. Menyampaikan dan melaksanakan sesuai Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 7. Menyampaikan, mendapatkan		- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada dalam satu provinsi - IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di wilayah laut sampai dengan 12 mil laut - IPR	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik		persetujuan, dan melaksanakan Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca tambang serta penempatan jaminannya 8. Melaksanakan pemasangan, pemeliharaan dan perawatan tanda batas WIUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 9. Menyampai-kan Laporan Akhir Operasi Produksi dalam rangka			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Peta usulan WIUP tahap Kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional 5. Laporan lengkap tahap Kegiatan Eksplorasi		permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi 10. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala sesuai tahap kegiatan IUP kepada Menteri/ Gubernur sesuai dengan kewenangan-nya 11. Memenuhi kebutuhan mineral dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 12. Memenuhi kewajiban			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							6. Laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui oleh menteri 7. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan 8. Dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pasca tambang 9. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah		penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 13. Menyampai-kan dan mendapatkan persetujuan Menteri/ Gubernur sesuai kewenangann ya atas perubahan pemegang saham badan usaha perseroan terbatas 14. Melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							diaudit oleh akuntan publik 10. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 11. Bukti pelunasan iuran tetap tahap Kegiatan Eksplorasi tahun terakhir **Perpanjangan IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi** Paling sedikit harus dilengkapi 1. Surat Permohonan		benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 15. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **Kewajiban IPR** 1. Melakukan kegiatan Penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan 2. Mematuhi peraturan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Peta dan batas koordinat wilayah 3. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah 3 (tiga) tahun terakhir 4. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 5. Rencana kerja selama masa perpanjangan 6. Laporan akhir Kegiatan Operasi Produksi		perundang-undangan di bidang keselamatan Pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku 3. Mengelola lingkungan hidup bersama Gubernur 4. Membayar iuran Pertambangan rakyat dan 5. Menyampai-kan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							7. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan Reklamasi 8. Neraca Sumber Daya dan Cadangan **Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk d. Surat keterangan dari		rakyat secara berkala kepada Gubernur 6. Wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan 7. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kelurahani desa setempat yang menyatakan pemohon merupakan penduduk setempat dan melakukan kegiatan pertamba-ngan rakyat e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindu-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ngan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan pertam-bangan dan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 2. Koperasi a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Salinan kartu tanda penduduk pengurus koperasi dilengkapi dengan salinan kartu tanda penduduk anggota koperasi d. Surat keterangan dari kelurahan/ desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus dan anggota koperasi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							merupakan penduduk setempat dan anggota koperasi merupakan penambang rakyat e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindu-ngan dan pengelolaan lingkungan serta keselamatan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pertam-bangan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. surat permohonan b. peta dan batas koordinat wilayah					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. bukti pelunasan iuran pertamba-ngan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) dan e. rencana penambangan selama perpanjangan 2. Koperasi a. surat permohonan b. Peta dan batas					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							koordinat wilayah c. bukti pelunasan iuran pertamba-ngan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) e. rencana penambangan selama perpanjangan dan f. Susunan pengurus					
48	08914		Kelompok ini mencakup	- Mikro - Kecil	Tinggi	NIB dan Izin		1. IUP Tahap Kegiatan	**Kewajiban IUP**	-	- IUP dalam rangka penanaman	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Pertambangan Yodium	usaha pertambangan ekstraksi air tanah yang mengandung yodium. Termasuk disini kegiatan distilasi dari ekstraksi mineral tersebut.	- Menengah - Besar			**IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan Pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data	Eksplorasi : 14 Hari 2. IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi : 14 Hari 3. Perpanjangan IUP: 14 Hari 4. Izin Pertambangan Rakyat 14 Hari (jangka waktu tidak termasuk pelaksanaan	1. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sesuai tahap kegiatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Laporan Akhir Eksplorasi 3. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan akhir Laporan		Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di lintas provinsi - IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di wilayah laut lebih dari 12 mil laut	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Surat pernyataan dari ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun 5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 6. Bukti penempatan jaminan kesungguhan	kunjungan lapangan)	Studi Kelayakan 4. Mendapatkan persetujuan Izin Lingkungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Menyelesaikan Hak Atas Tanah sebelum melakukan Kegiatan Operasi pertambangan 6. Menyampaikan dan melaksanakan sesuai Rencana Induk Pengemba-		- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada dalam satu provinsi - IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di wilayah laut sampai dengan 12 mil laut - IPR	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi 7. Bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP atas permohonan wilayah 8. Surat keterangan Fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan		ngan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 7. Menyampai-kan, mendapatkan persetujuan, dan melaksanakan Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca tambang serta penempatan jaminannya 8. Melaksanakan pemasangan, pemeliharaan dan perawatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Peta usulan WIUP tahap		tanda batas WIUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 9. Menyampai-kan Laporan Akhir Operasi Produksi dalam rangka permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi 10. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala sesuai tahap kegiatan IUP kepada Menteri/ Gubernur sesuai dengan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional 5. Laporan lengkap tahap Kegiatan Eksplorasi 6. Laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui oleh menteri 7. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang		kewenangan-nya 11. Memenuhi kebutuhan mineral dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 12. Memenuhi kewajiban penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 13. Menyampai-kan dan mendapatkan persetujuan Menteri/ gubernur sesuai			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan 8. Dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pasca tambang 9. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 10. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan		kewenangannya atas perubahan pemegang saham badan usaha perseroan terbatas 14. Melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 15. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							11. Bukti pelunasan iuran tetap tahap Kegiatan Eksplorasi tahun terakhir **Perpanjangan IUP tahap Kegiatan Operasi Produksi** Paling sedikit harus dilengkapi 1. Surat Permohonan 2. Peta dan batas koordinat wilayah 3. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah 3 (tiga) tahun terakhir:		**Kewajiban IPR** 1. Melakukan kegiatan Penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan 2. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan Pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku 3. Mengelola lingkungan hidup			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 5. Rencana kerja selama masa perpanjangan 6. Laporan akhir Kegiatan Operasi Produksi 7. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan Reklamasi 8. Neraca Sumber Daya dan Cadangan		bersama Gubernur 4. Membayar iuran Pertambangan rakyat dan 5. Menyampai-kan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat secara berkala kepada Gubernur 6. Wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan 7. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Izin Pertambangan Rakyat 1. Orang Perorangan a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk d. Surat keterangan dari kelurahan/ desa setempat orang menyatakan pemohon merupakan penduduk setempat		peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan pertambangan dan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perundang-undangan di bidang perpajakan 2. Koperasi a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk pengurus koperasi d. Surat keterangan dari kelurahan/ desa setempat yang menyatakan seluruh					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengurus koperasi merupakan penduduk setempat e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindu-ngan dan pengelolaan lingkungan serta keselamatan pertam-bangan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. surat permohonan b. peta dan batas koordinat wilayah c. bukti pelunasan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							iuran pertambangan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) dan e. rencana penambangan selama perpanjangan 2. Koperasi a. surat permohonan b. Peta dan batas koordinat wilayah					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. bukti pelunasan iuran pertambangan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) e. rencana penambangan selama perpanjangan dan f. Susunan pengurus					
49	08915	Pertambangan Potash (Kalium	Kelompok ini mencakup usaha pertamban	- Mikro - Kecil - Menenga	Tinggi	NIB dan Izin	**IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi**	1. IUP Tahap Kegiatan Eksplo-	**Kewajiban IUP** 1. Menyampaikan dan mendapatkan	-	- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Karbo-nat)	gan potash dalam bentuk garam, feldpar dan leusit analeum. Termasuk disini kegiatan penghancu ran dan pembersiha n terhadap mineral tersebut.	- Besar			1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan Pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Surat pernyataan dari ahli	rasi : 14 Hari 2. IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi : 14 Hari 3. Perpan-jangan IUP: 14 Hari 4. Izin Pertam-bangan Rakyat 14 Hari (jangka waktu tidak terma-suk pelaksa-	persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sesuai tahap kegiatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampai-kan dan mendapatkan persetujuan Laporan Akhir Eksplorasi 3. Menyampai-kan dan mendapatkan persetujuan akhir Laporan		Negeri yang wilayahnya berada di lintas provinsi - IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di wilayah laut lebih dari 12 mil laut	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun 5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 6. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi	naan kunjungan lapangan)	Studi Kelayakan 4. Mendapatkan persetujuan Izin Lingkungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Menyelesaikan Hak Atas Tanah sebelum melakukan Kegiatan Operasi pertambangan 6. Menyampaikan dan melaksanakan sesuai Rencana Induk Pengemba-		- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada dalam satu provinsi - IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di wilayah laut sampai dengan 12 mil laut - IPR	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							7. Bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP atas permohonan wilayah 8. Surat keterangan Fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi**		ngan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 7. Menyampai-kan, mendapatkan persetujuan, dan melaksanakan Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca tambang serta penempatan jaminannya 8. Melaksanakan pemasangan, pemeliharaan dan perawatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Peta usulan WIUP tahap Kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat		tanda batas WIUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 9. Menyampai-kan Laporan Akhir Operasi Produksi dalam rangka permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi 10. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala sesuai tahap kegiatan IUP kepada Menteri/ Gubernur sesuai dengan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional 5. Laporan lengkap tahap Kegiatan Eksplorasi 6. Laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui oleh menteri 7. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan		kewenangan-nya 11. Memenuhi kebutuhan mineral dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 12. Memenuhi kewajiban penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 13. Menyampai-kan dan mendapatkan persetujuan Menteri/ gubernur sesuai			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perundang undangan 8. Dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pasca tambang 9. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 10. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 11. Bukti pelunasan iuran tetap tahap Kegiatan		kewenangan-nya atas perubahan pemegang saham badan usaha perseroan terbatas 14. Melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 15. Melaksana-kan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Eksplorasi tahun terakhir **Perpanjangan IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi** Paling sedikit harus dilengkapi 1. Surat Permohonan 2. Peta dan batas koordinat wilayah 3. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah 3 (tiga) tahun terakhir 4. Surat keterangan fiskal sesuai dengan		**Kewajiban IPR** 1. Melakukan kegiatan Penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan 2. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan Pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku 3. Mengelola lingkungan hidup			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 5. Rencana kerja selama masa perpanjangan 6. Laporan akhir Kegiatan Operasi Produksi 7. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan Reklamasi 8. Neraca Sumber Daya dan Cadangan **Izin Pertambangan Rakyat**		bersama Gubernur 4. Membayar iuran Pertambangan rakyat dan 5. Menyampai-kan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat secara berkala kepada Gubernur 6. Wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan 7. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1. Orang Perorangan a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk d. Surat keterangan dari kelurahan/ desa setempat yang menyatakan pemohon merupakan penduduk setempat dan melakukan kegiatan		peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pertambangan rakyat e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan pertambangan dan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 2. Koperasi a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk pengurus koperasi dilengkapi dengan salinan kartu tanda penduduk anggota koperasi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Surat keterangan dari kelurahan/ desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus dan anggota koperasi merupakan penduduk setempat dan anggota koperasi merupakan penambang rakyat e. Surat pernyataan kesanggupan untuk					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindu-ngan dan pengelolaan lingkungan serta keselamatan pertam-bangan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bidang perpajakan **Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. surat permohonan b. peta dan batas koordinat wilayah c. bukti pelunasan iuran pertambangan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. laporan kegiatan (kegiatan tambang,					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengelolaan lingkungan) dan e. rencana penambangan selama perpanjangan 2. Koperasi a. surat permohonan b. Peta dan batas koordinat wilayah c. bukti pelunasan iuran pertam-bangan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. laporan kegiatan (kegiatan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tambang, pengelolaan lingkungan) e. rencana penambangan selama perpanjangan dan f. Susunan pengurus					
50	08919	Pertambangan Mineral, Bahan Kimia Dan Bahan Pupuk Lainnya	Kelompok ini mencakup usaha pertambangan mineral bahan kimia dan bahan pupuk lainnya yang belum tercakup dalam kelompok	- Mikro - Kecil - Menenga - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	**IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan Pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik	1. IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi : 14 Hari 2. IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi : 14 Hari	**Kewajiban IUP** 1. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sesuai tahap kegiatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	- Pendaftaran Pupuk An-Organik - Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, Pembenah Tanah	- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di lintas provinsi - IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			08911 s.d. 08915. Misalnya pertambangan barium sulfat alam dan karbonat (barite dan witherit), borat alam, magnesium sulfat alam (kiserit), pertambangan earth coulor, flour, bentonite, dolomit, magnesit, phiroplit, tawas, diatomea, dan				manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Surat pernyataan dari ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun 5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang	3. Perpanjangan IUP: 14 Hari 4. Izin Pertambangan Rakyat 14 Hari (jangka waktu tidak termasuk pelaksanaan kunjungan lapangan)	2. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Laporan Akhir Eksplorasi 3. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan akhir Laporan Studi Kelayakan 4. Mendapatkan persetujuan Izin Lingkungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Menyelesaikan Hak Atas Tanah sebelum	- Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama	wilayahnya berada di wilayah laut lebih dari 12 mil laut	
											- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada dalam satu provinsi - IUP dalam rangka penanaman Modal dalam	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			mineral lain yang utamanya sebagai bahan kimia dan pertambangan guano (bahan pupuk dari kotoran burung atau kelelawar). Termasuk disini kegiatan pembersihan, pemisahan dan sortasi.				perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 6. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi 7. Bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP atas permohonan wilayah 8. Surat keterangan Fiskal sesuai dengan ketentuan		melakukan Kegiatan Operasi pertambangan 6. Menyampaikan dan melaksanakan sesuai Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 7. Menyampaikan, mendapatkan persetujuan, dan melaksanakan Rencana		Negeri yang wilayahnya berada di wilayah laut sampai dengan 12 mil laut - IPR	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan		Reklamasi dan Rencana Pasca tambang serta penempatan jaminannya 8. Melaksanakan pemasangan, pemeliharaan dan perawatan tanda batas WIUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 9. Menyampai-kan Laporan Akhir Operasi Produksi dalam rangka permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Peta usulan WIUP tahap Kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional 5. Laporan lengkap tahap Kegiatan Eksplorasi 6. Laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui oleh menteri		10. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala sesuai tahap kegiatan IUP kepada Menteri/ Gubernur sesuai dengan kewenangan-nya 11. Memenuhi kebutuhan mineral dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 12. Memenuhi kewajiban penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							7. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan 8. Dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pasca tambang 9. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 10. Surat keterangan fiskal sesuai		peraturan perundang-undangan 13. Menyampai-kan dan mendapatkan persetujuan Menteri/guber nur sesuai kewenangann ya atas perubahan pemegang saham badan usaha perseroan terbatas 14. Melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 11. Bukti pelunasan iuran tetap tahap Kegiatan Eksplorasi tahun terakhir **Perpanjangan IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi** Paling sedikit harus dilengkapi 1. Surat Permohonan 2. Peta dan batas koordinat wilayah		15. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **Kewajiban IPR** 1. Melakukan kegiatan Penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan 2. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan Pertambangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah 3 (tiga) tahun terakhir 4. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 5. Rencana kerja selama masa perpanjangan 6. Laporan akhir Kegiatan Operasi Produksi 7. Laporan pelaksanaan pengelolaan		, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku 3. Mengelola lingkungan hidup bersama Gubernur 4. Membayar iuran Pertambangan rakyat dan 5. Menyampai-kan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat secara berkala kepada Gubernur			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lingkungan dan Reklamasi 8. Neraca Sumber Daya dan Cadangan **Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk d. Surat keterangan dari kelurahan/ desa setempat yang		6. Wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan 7. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							menyatakan pemohon merupakan penduduk setempat dan melakukan kegiatan pertamba-ngan rakyat e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							keselamatan pertam-bangan dan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 2. Koperasi a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk pengurus koperasi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dilengkapi dengan salinan kartu tanda penduduk anggota koperasi d. Surat keterangan dari kelurahan/ desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus dan anggota koperasi merupakan penduduk setempat dan anggota koperasi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							merupakan penambang rakyat e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta keselamatan pertam-bangan f. Surat keterangan fiskal sesuai					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. surat permohonan b. peta dan batas koordinat wilayah c. bukti pelunasan iuran pertam-bangan rakyat					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) dan e. rencana penambangan selama perpanjangan 2. Koperasi a. surat permohonan b. Peta dan batas koordinat wilayah c. bukti pelunasan iuran pertam-bangan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) e. rencana penambangan selama perpanjangan dan f. Susunan pengurus					
51	08991	Pertambangan Batu Mulia	Kelompok ini mencakup usaha pertambangan mineral bahan	- Mikro - Kecil - Menenga - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	**IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi	1. IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi : 14 Hari	**Kewajiban IUP** 1. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB)	-	- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			kimia dan bahan pupuk lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 08911 s.d. 08915. Misalnya pertambangan barium sulfat alam dan karbonat (barite dan witherit), borat alam, magnesium sulfat alam (kiserit), pertambangan earth coulor,				pemutakhiran data 3. Susunan Pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Surat pernyataan dari ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun	2. IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi : 14 Hari 3. Perpanjangan IUP: 14 Hari 4. Izin Pertambangan Rakyat 14 Hari (jangka waktu tidak termasuk pelak-	Tahunan sesuai tahap kegiatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Laporan Akhir Eksplorasi 3. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan akhir Laporan Studi Kelayakan 4. Mendapatkan persetujuan Izin Lingkungan,		lintas provinsi - IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di wilayah laut lebih dari 12 mil laut - IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			flour, bentonite, dolomit, magnesit, phiroplit, tawas, diatomea, dan mineral lain yang utamanya sebagai bahan kimia dan pertamban gan guano (bahan pupuk dari kotoran burung atau kelelawar). Termasuk disini kegiatan pembersi-				5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 6. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi 7. Bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran	sanaan kunju-ngan lapa-ngan)	sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Menyelesai-kan Hak Atas Tanah sebelum melakukan Kegiatan Operasi pertambangan 6. Menyampai-kan dan melaksanakan sesuai Rencana Induk Pengemba-ngan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai ketentuan peraturan		- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada dalam satu provinsi - IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di wilayah laut sampai dengan 12 mil laut - IPR	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			han, pemisahan dan sortasi.				pencetakan peta WIUP atas permohonan wilayah 8. Surat keterangan Fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi		perundang-undangan 7. Menyampaikan, mendapatkan persetujuan, dan melaksanakan Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca tambang serta penempatan jaminannya 8. Melaksanakan pemasangan, pemeliharaan dan perawatan tanda batas WIUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Peta usulan WIUP tahap Kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi		9. Menyampai-kan Laporan Akhir Operasi Produksi dalam rangka permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi 10. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala sesuai tahap kegiatan IUP kepada Menteri/ Gubernur sesuai dengan kewenangan-nya 11. Memenuhi kebutuhan mineral dalam negeri sesuai ketentuan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							geografis yang berlaku secara nasional 5. Laporan lengkap tahap Kegiatan Eksplorasi 6. Laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui oleh menteri 7. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan 8. Dokumen rencana Reklamasi dan		peraturan perundang-undangan 12. Memenuhi kewajiban penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 13. Menyampai-kan dan mendapatkan persetujuan Menteri/ gubernur sesuai kewenangan-nya atas perubahan pemegang saham badan usaha			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							rencana Pasca tambang 9. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 10. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 11. Bukti pelunasan iuran tetap tahap Kegiatan Eksplorasi tahun terakhir		perseroan terbatas 14. Melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 15. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **Kewajiban IPR** 1. Melakukan kegiatan Penambangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Perpanjangan IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi Paling sedikit harus dilengkapi 1. Surat Permohonan 2. Peta dan batas koordinat wilayah 3. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah 3 (tiga) tahun terakhir 4. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di		paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan 2. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan Pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku 3. Mengelola lingkungan hidup bersama Gubernur 4. Membayar iuran Pertambangan rakyat dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bidang perpajakan 5. Rencana kerja selama masa perpanjangan 6. Laporan akhir Kegiatan Operasi Produksi 7. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan Reklamasi 8. Neraca Sumber Daya dan Cadangan **Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. Surat Permohonan		5. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat secara berkala kepada Gubernur 6. Wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan 7. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk d. Surat keterangan dari kelurahani desa setempat yang menyatakan pemohon merupakan penduduk setempat dan melakukan kegiatan pertamba-ngan rakyat e. Surat pernyataan kesanggupan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan pertambangan dan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bidang perpajakan 2. Koperasi a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk pengurus koperasi dilengkapi dengan salinan kartu tanda penduduk anggota koperasi d. Surat keterangan dari kelurahan/					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus dan anggota koperasi merupakan penduduk setempat dan anggota koperasi merupakan penambang rakyat e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta keselamatan pertam-bangan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat 1. Orang Perorangan a. surat permohonan b. peta dan batas koordinat wilayah c. bukti pelunasan iuran pertamba-ngan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lingkungan) dan e. rencana penambangan selama perpanjangan 2. Koperasi a. surat permohonan b. Peta dan batas koordinat wilayah c. bukti pelunasan iuran pertam-bangan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. laporan kegiatan (kegiatan tambang,					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengelolaan lingkungan) e. rencana penambangan selama perpanjangan dan f. Susunan pengurus **IUPK Sebagai Kelanjutan Kontrak/ Perjanjian** 1. Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat badan usaha dari pemegang KK 2. Rencana pengembangan seluruh wilayah yang telah					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							disetujui yang memuat paling sedikit peta dan batas koordinat wilayah 3. Neraca Sumber Daya dan Cadangan 4. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang Kegiatan Operasi Produksi yang berada dalam WIUPK atau di luar WIUPK 5. Persetujuan dokumen lingkungan hidup yang diterbitkan oleh instansi yang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pasca tambang 7. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 8. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir 9. Surat keterangan fiskal					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **Perpanjangan IUPK sebagai Kelanjutan Kontrak/ Perjanjian** Paling sedikit harus dilengkapi 1. Surat Permohonan 2. Peta dan batas koordinat wilayah 3. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Laporan akhir Kegiatan Operasi Produksi 5. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan 6. RKAB 7. Neraca Sumber Daya dan Cadangan					
52	08992	Penggalian Feldspar dan Kalsit	Kelompok ini mencakup usaha penggalian feldspar dan kalsit, serta batu tulis/sabak. Termasuk disini kegiatan pemecahan,	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	**IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan Pengurus, daftar pemegang	1. IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi : 14 Hari 2. IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi : 14 Hari	**Kewajiban IUP** 1. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sesuai tahap kegiatan, sesuai ketentuan peraturan	-	- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di lintas provinsi - IUP dalam rangka penanaman Modal	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			penghancuran, penyaringan dan penghalusannya.				saham, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Surat pernyataan dari ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun 5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-	3. Perpanjangan IUP: 14 Hari 4. Izin Pertambangan Rakyat 14 Hari (jangka waktu tidak termasuk pelaksanaan kunjungan lapangan)	perundang-undangan 2. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Laporan Akhir Eksplorasi 3. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan akhir Laporan Studi Kelayakan 4. Mendapatkan persetujuan Izin Lingkungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Menyelesaikan Hak Atas		dalam Negeri yang wilayahnya berada di wilayah laut lebih dari 12 mil laut	
											- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada dalam satu provinsi - IUP dalam rangka	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 6. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi 7. Bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP atas permohonan wilayah 8. Surat keterangan Fiskal sesuai		Tanah sebelum melakukan Kegiatan Operasi pertambangan 6. Menyampai-kan dan melaksanakan sesuai Rencana Induk Pengemba-ngan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 7. Menyampai-kan, mendapatkan persetujuan, dan		penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di wilayah laut sampai dengan 12 mil laut - IPR	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari		melaksanakan Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca tambang serta penempatan jaminannya 8. Melaksanakan pemasangan, pemeliharaan dan perawatan tanda batas WIUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 9. Menyampaikan Laporan Akhir Operasi Produksi dalam rangka permohonan perpanjangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Peta usulan WIUP tahap Kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional 5. Laporan lengkap tahap Kegiatan Eksplorasi 6. Laporan Studi Kelayakan yang		IUP Operasi Produksi 10. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala sesuai tahap kegiatan IUP kepada Menteri/ Gubernur sesuai dengan kewenangan-nya 11. Memenuhi kebutuhan mineral dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 12. Memenuhi kewajiban penerimaan negara bukan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							telah disetujui oleh menteri 7. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan 8. Dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pasca tambang 9. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik		pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 13. Menyampai-kan dan mendapatkan persetujuan Menteri/ gubernur sesuai kewenangan-nya atas perubahan pemegang saham badan usaha perseroan terbatas 14. Melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar sesuai ketentuan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							10. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 11. Bukti pelunasan iuran tetap tahap Kegiatan Eksplorasi tahun terakhir **Perpanjangan IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi** Paling sedikit harus dilengkapi 1. Surat Permohonan		peraturan perundang-undangan 15. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **Kewajiban IPR** 1. Melakukan kegiatan Penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan 2. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Peta dan batas koordinat wilayah 3. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah 3 (tiga) tahun terakhir 4. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 5. Rencana kerja selama masa perpanjangan 6. Laporan akhir Kegiatan Operasi Produksi		keselamatan Pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku 3. Mengelola lingkungan hidup bersama Gubernur 4. Membayar iuran Pertambangan rakyat dan 5. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat secara berkala			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							7. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan Reklamasi 8. Neraca Sumber Daya dan Cadangan **Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk d. Surat keterangan dari		kepada Gubernur 6. Wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan 7. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kelurahan/ desa setempat orang yang menyatakan pemohon merupakan penduduk setempat dan melakukan kegiatan pertamba-ngan rakyat e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindu-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ngan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan pertamba-ngan dan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 2. Koperasi a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Salinan kartu tanda penduduk pengurus koperasi dilengkapi dengan salinan kartu tanda penduduk anggota koperasi d. Surat keterangan dari kelurahan/ desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus dan anggota koperasi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							merupakan penduduk setempat dan anggota koperasi merupakan penambang rakyat e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta keselamatan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pertam-bangan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. surat permohonan b. peta dan batas koordinat wilayah					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. bukti pelunasan iuran pertambangan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) dan e. rencana penambangan selama perpanjangan 2. Koperasi a. surat permohonan b. Peta dan batas					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							koordinat wilayah c. bukti pelunasan iuran pertambangan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) e. rencana penambangan selama perpanjangan dan f. Susunan pengurus					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I.D.778

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
53	08993	Pertambangan Aspal Alam	Kelompok ini mencakup usaha pertambangan aspal alam, batu beraspal dan bitumen padat alam. Termasuk disini kegiatan pemisahan dan penuangan terhadap mineral tersebut.	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	**IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi, atau Perusahaan perseorangan dalam hal terjadi Pemutakhiran data 4. Surat pernyataan dari	1. IUP/ IUPK tahap kegiatan eksplorasi : 14 Hari 2. IUP/ IUPK tahap Kegiatan Operasi produksi : 14 Hari 3. Perpanjangan IUP/ IUPK : 14 Hari	1. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Laporan Akhir Eksplorasi 3. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan akhir Laporan Studi Kelayakan	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Ahli Pertambangan dan/atau Geologi yang berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun 5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 6. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan		4. Mendapatkan persetujuan Izin Lingkungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Menyelesai-kan Hak Atas Tanah sebelum melakukan Kegiatan Operasi pertambangan 6. Menyampai-kan dan melaksanakan sesuai Rencana Induk Pengemba-ngan dan Pemberdayaan			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.D.780

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Kegiatan Eksplorasi 7. Bukti Pembayaran nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP Batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang 8. Surat Keterangan Fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan		Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 7. Menyampaikan, mendapatkan persetujuan, dan melaksanakan Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca tambang serta penempatan jaminannya 8. Melaksanakan pemasangan, pemeliharaan dan perawatan tanda batas WIUP sesuai			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							IUPK Tahap Kegiatan Eksplorasi 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pernegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Surat Pernyataan dari Ahli		ketentuan peraturan perundang-undangan 9. Menyampai-kan Laporan Akhir Operasi Produksi dalam rangka permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi 10. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala sesuai tahap kegiatan IUP kepada Direktur Jenderal 11. Memenuhi kebutuhan aspal dalam negeri sesuai			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Pertambangan dan/atau Geologi yang berpengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun 5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 6. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi		ketentuan peraturan perundang-undangan 12. Memenuhi kewajiban penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 13. Menyampai-kan dan mendapatkan persetujuan Menteri atau Gubernur sesuai kewenangan-nya atas perubahan pemegang saham badan usaha			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							7. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan 8. Bukti pembayaran nilai kompensasi data informasi **Perpanjangan IUP/IUPK Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan 2. Kajian kendala berdasarkan kriteria teknis yang ditentukan		perseroan terbatas 14. Melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 15. Kewajiban lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Rencana kegiatan dan anggaran biaya eksplorasi jangka panjang yang dijabarkan dalam tiap semester selama jangka waktu permohonan perpanjangan 4. Menempatkan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi pada bank pemerintah **IUP/IUPK Tahap Kegiatan Operasi Produksi** 1. Surat Permohonan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Peta usulan WIUP tahap Kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional 5. Laporan lengkap tahap Kegiatan Eksplorasi 6. Laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui oleh Menteri 7. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							8. Dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pasca tambang 9. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 10. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 11. Bukti pelunasan iuran tetap tahap Kegiatan Eksplorasi tahun terakhir					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Perpanjangan IUP/IUPK Tahap Kegiatan Operasi Produksi Paling sedikit meliputi: 1. Surat Permohonan 2. Peta dan batas koordinat wilayah 3. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah 3 (tiga) tahun terakhir 4. Surat Keterangan Fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							undangan di bidang perpajakan 5. Rencana kerja selama masa perpanjangan 6. Laporan akhir Kegiatan Operasi Produksi 7. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan Reklamasi 8. Neraca Sumber Daya dan Cadangan					
54	08994	Penggalian Asbes	Kelompok ini mencakup usaha penggalian asbes dalam bentuk	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	**IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi	1. IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi : 14 Hari	**Kewajiban IUP** 1. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB)	-	- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			serabut maupun tidak. Termasuk disini kegiatan pembersihan dan pemisahannya.				pemutakhiran data 3. Susunan Pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Surat pernyataan dari	2. IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi : 14 Hari 3. Perpanjangan IUP: 14 Hari 4. Izin Pertambangan Rakyat 14Hari	sesuai tahap kegiatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Laporan Akhir Eksplorasi 3. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan		lintas provinsi - IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di wilayah laut lebih dari 12 mil laut	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun 5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 6. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan	(jangka waktu tidak termasuk pelaksanaan kunjungan lapangan)	akhir Laporan Studi Kelayakan 4. Mendapatkan persetujuan Izin Lingkungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Menyelesaikan Hak Atas Tanah sebelum melakukan Kegiatan Operasi pertambangan 6. Menyampaikan dan melaksanakan sesuai Rencana Induk		- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada dalam satu provinsi - IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di wilayah laut sampai dengan 12 mil laut - IPR	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Kegiatan Eksplorasi 7. Bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP atas permohonan wilayah 8. Surat keterangan Fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan		Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 7. Menyampaikan, mendapatkan persetujuan, dan melaksanakan Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca tambang serta penempatan jaminannya 8. Melaksanakan pemasangan, pemeliharaan dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Peta usulan WIUP tahap		perawatan tanda batas WIUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 9. Menyampaikan Laporan Akhir Operasi Produksi dalam rangka permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi 10. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala sesuai tahap kegiatan IUP kepada Menteri/Gubernur sesuai dengan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional 5. Laporan lengkap tahap Kegiatan Eksplorasi 6. Laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui oleh menteri 7. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang		kewenangan-nya 11. Memenuhi kebutuhan mineral dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 12. Memenuhi kewajiban penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 13. Menyampai-kan dan mendapatkan persetujuan Menteri/ gubernur sesuai			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan 8. Dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pasca tambang 9. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 10. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan		kewenangan-nya atas perubahan pemegang saham badan usaha perseroan terbatas 14. Melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 15. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							11. Bukti pelunasan iuran tetap tahap Kegiatan Eksplorasi tahun terakhir **Perpanjangan IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi** Paling sedikit harus dilengkapi 1. Surat Permohonan 2. Peta dan batas koordinat wilayah 3. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah 3 (tiga) tahun terakhir		**Kewajiban IPR** 1. Melakukan kegiatan Penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan 2. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan Pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku 3. Mengelola lingkungan hidup			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 5. Rencana kerja selama masa perpanjangan 6. Laporan akhir Kegiatan Operasi Produksi 7. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan Reklamasi 8. Neraca Sumber Daya dan Cadangan		bersama Gubernur 4. Membayar iuran Pertambangan rakyat dan 5. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat secara berkala kepada Gubernur 6. Wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan 7. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Izin Pertambangan Rakyat 1. Orang Perorangan a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk d. Surat keterangan dari kelurahan/ desa setempat orang yang menyatakan pemohon merupakan penduduk setempat dan		peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							melakukan kegiatan pertambangan rakyat e. Surat pernyataan kesanggu-pan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan pertambangan dan f. Surat keterangan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 2. Koperasi a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data c. Salinan kartu tanda penduduk pengurus koperasi dilengkapi					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.D.801

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dengan salinan kartu tanda penduduk anggota koperasi d. Surat keterangan dari kelurahan/ desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus dan anggota koperasi merupakan penduduk setempat dan anggota koperasi merupakan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							penambang rakyat e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta keselamatan pertam-bangan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. surat permohonan b. peta dan batas koordinat wilayah c. bukti pelunasan iuran pertamba-ngan rakyat produksi 3					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							(tiga) tahun terakhir d. laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) dan e. rencana penambangan selama perpanjangan 2. Koperasi a. surat permohonan b. Peta dan batas koordinat wilayah c. bukti pelunasan iuran pertamba-ngan rakyat					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) e. rencana penambangan selama perpanjangan dan f. Susunan pengurus					
55	08995	Penggalian Kuarsa/ Pasir Kuarsa	Kelompok ini mencakup usaha penggalian kuarsa/ pasir kuarsa/	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	**IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi	1. IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi : 14 Hari 2. IUP Tahap Kegiatan Operasi	**Kewajiban IUP** 1. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sesuai tahap	-	- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di lintas provinsi	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			pasir silika. Termasuk disini kegiatan pemecahan, penghancuran, penyaringan dan penghalusannya.				pemutakhiran data 3. Susunan Pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Surat pernyataan dari ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun 5. Surat pernyataan	Produksi : 14 Hari 3. Perpanjangan IUP: 14 Hari 4. Izin Pertambangan Rakyat 14 Hari (jangka waktu tidak termasuk pelaksanaan kunjungan lapangan)	kegiatan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Laporan Akhir Eksplorasi 3. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan akhir Laporan Studi Kelayakan 4. Mendapatkan persetujuan Izin Lingkungan, sesuai ketentuan peraturan		- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di wilayah laut lebih dari 12 mil laut	
											- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 6. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi 7. Bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP atas		perundang-undangan 5. Menyelesai-kan Hak Atas Tanah sebelum melakukan Kegiatan Operasi pertambangan 6. Menyampai-kan dan melaksanakan sesuai Rencana Induk Pengemba-ngan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		dalam satu provinsi - IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di wilayah laut sampai dengan 12 mil laut - IPR	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							permohonan wilayah 8. Surat keterangan Fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data		7. Menyampaikan, mendapatkan persetujuan, dan melaksanakan Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca tambang serta penempatan jaminannya 8. Melaksanakan pemasangan, pemeliharaan dan perawatan tanda batas WIUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 9. Menyampaikan Laporan			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Peta usulan WIUP tahap Kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang		Akhir Operasi Produksi dalam rangka permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi 10. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala sesuai tahap kegiatan IUP kepada Menteri/ Gubernur sesuai dengan kewenangan-nya 11. Memenuhi kebutuhan mineral dalam negeri sesuai ketentuan peraturan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berlaku secara nasional 5. Laporan lengkap tahap Kegiatan Eksplorasi 6. Laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui oleh menteri 7. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan 8. Dokumen rencana Reklamasi dan		perundang-undangan 12. Memenuhi kewajiban penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 13. Menyampai-kan dan mendapatkan persetujuan Menteri/ gubernur sesuai kewenangan-nya atas perubahan pemegang saham badan usaha perseroan terbatas			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							rencana Pasca tambang 9. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 10. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 11. Bukti pelunasan iuran tetap tahap Kegiatan Eksplorasi tahun terakhir		14. Melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 15. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **Kewajiban IPR** 1. Melakukan kegiatan Penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Perpanjangan IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi Paling sedikit harus dilengkapi 1. Surat Permohonan 2. Peta dan batas koordinat wilayah 3. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah 3 (tiga) tahun terakhir 4. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di		setelah IPR diterbitkan 2. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan Pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku 3. Mengelola lingkungan hidup bersama Gubernur 4. Membayar iuran Pertambangan rakyat dan 5. Menyampaikan laporan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bidang perpajakan 5. Rencana kerja selama masa perpanjangan 6. Laporan akhir Kegiatan Operasi Produksi 7. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan Reklamasi 8. Neraca Sumber Daya dan Cadangan **Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. Surat Permohonan		pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat secara berkala kepada Gubernur 6. Wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan 7. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk d. Surat keterangan dari kelurahan/ desa setempat yang menyatakan pemohon merupakan penduduk setempat dan melakukan kegiatan pertamba-ngan rakyat e. Surat pernyataan kesanggupan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindu-ngan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan pertamba-ngan dan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bidang perpajakan 2. Koperasi a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk pengurus koperasi dilengkapi dengan salinan kartu tanda penduduk anggota koperasi d. Surat keterangan dari kelurahan/					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							desa setempat yang menyatakan seluruh pengurus dan anggota koperasi merupakan penduduk setempat dan anggota koperasi merupakan penambang rakyat e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta keselamatan pertam-bangan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat 1. Orang Perorangan a. surat permohonan b. peta dan batas koordinat wilayah c. bukti pelunasan iuran pertamba-ngan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lingkungan) dan e. rencana penambangan selama perpanjangan 2. Koperasi a. surat permohonan b. Peta dan batas koordinat wilayah c. bukti pelunasan iuran pertamba-ngan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. laporan kegiatan (kegiatan tambang,					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengelolaan lingkungan) e. rencana penambangan selama perpanjangan dan f. Susunan pengurus					
56	08999	Pertambangan dan Penggalian Lainnya YTDL	Seluruh, selain Mineral Logam tanah jarang mengikuti ketentuan persyaratan mineral logam di KBLI 07	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	**IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data 3. Susunan Pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari	1. IUP Tahap Kegiatan Eksplorasi : 14 Hari 2. IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi : 14 Hari 3. Perpanjangan IUP: 14 Hari	**Kewajiban IUP/IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian** 1. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sesuai tahap kegiatan,	Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama	- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di lintas provinsi - IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya	Menteri/ Kepala Badan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.D.822

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Surat pernyataan dari ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun	4. Izin Pertambangan Rakyat 14 Hari (jangka waktu tidak termasuk pelaksanaan kunjungan	sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan Laporan Akhir Eksplorasi 3. Menyampaikan dan mendapatkan persetujuan		berada di wilayah laut lebih dari 12 mil laut - IUPK sebagai kelanjutan Kontrak / Perjanjian	

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.D.823

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 6. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan Kegiatan Eksplorasi 7. Bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta	lapangan) 5. IUPK sebagai kelanjutan Kontrak / Perjanjian: 14 Hari 6. Perpanjangan IUPK sebagai kelanjutan Kontrak / Perjanjian: 14 Hari	akhir Laporan Studi Kelayakan 4. Mendapatkan persetujuan Izin Lingkungan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Menyelesaikan Hak Atas Tanah sebelum melakukan Kegiatan Operasi pertambangan 6. Menyampaikan dan melaksanakan sesuai Rencana Induk		- IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada dalam satu provinsi - IUP dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri yang wilayahnya berada di wilayah laut sampai dengan 12 mil laut - IPR	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							WIUP atas permohonan wilayah 8. Surat keterangan Fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data		Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 7. Menyampaikan, mendapatkan persetujuan, dan melaksanakan Rencana Reklamasi dan Rencana Pasca tambang serta penempatan jaminannya 8. Melaksanakan pemasangan, pemeliharaan dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat dari badan usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan dalam hal terjadi pemutakhiran data 4. Peta usulan WIUP tahap Kegiatan Operasi Produksi yang dilengkapi dengan koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang		perawatan tanda batas WIUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 9. Menyampaikan Laporan Akhir Operasi Produksi dalam rangka permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi 10. Melaporkan kegiatan usaha secara berkala sesuai tahap kegiatan IUP kepada Menteri/ Gubernur sesuai dengan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berlaku secara nasional 5. Laporan lengkap tahap Kegiatan Eksplorasi 6. Laporan Studi Kelayakan yang telah disetujui oleh menteri 7. Dokumen lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan 8. Dokumen rencana Reklamasi dan		kewenangan-nya 11. Memenuhi kebutuhan mineral dalam negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 12. Memenuhi kewajiban penerimaan negara bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 13. Menyampai-kan dan mendapatkan persetujuan Menteri/ Gubernur sesuai			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							rencana Pasca tambang 9. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 10. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan 11. Bukti pelunasan iuran tetap tahap Kegiatan Eksplorasi tahun terakhir **Perpanjangan IUP Tahap Kegiatan Operasi Produksi**		kewenangan-nya atas perubahan pemegang saham badan usaha perseroan terbatas 14. Melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 15. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.D.828

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Paling sedikit harus dilengkapi 1. Surat Permohonan 2. Peta dan batas koordinat wilayah 3. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi atau pajak daerah 3 (tiga) tahun terakhir: 4. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan		**Kewajiban IPR** 1. Melakukan kegiatan Penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan 2. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan Pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku 3. Mengelola lingkungan hidup			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Rencana kerja selama masa perpanjangan 6. Laporan akhir Kegiatan Operasi Produksi 7. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan dan Reklamasi 8. Neraca Sumber Daya dan Cadangan **Izin Pertambangan Rakyat** 1. Orang Perorangan a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha		bersama Gubernur 4. Membayar iuran Pertambangan rakyat dan 5. Menyampai-kan laporan pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan rakyat secara berkala kepada Gubernur 6. Wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambangan 7. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Salinan kartu tanda penduduk d. Surat keterangan dari kelurahan/ desa setempat yang menyatakan pemohon merupakan penduduk setempat dan melakukan kegiatan pertam-bangan rakyat e. Surat pernyataan kesanggupan untuk		peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindu-ngan dan pengelolaan lingkungan hidup serta keselamatan pertamba-ngan dan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2. Koperasi a. Surat Permohonan b. Nomor Induk Berusaha c. Salinan kartu tanda penduduk pengurus koperasi dilengkapi dengan salinan kartu tanda penduduk anggota koperasi d. Surat keterangan dari kelurahan/ desa setempat					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang menyatakan seluruh pengurus dan anggota koperasi merupakan penduduk setempat dan anggota koperasi merupakan penambang rakyat e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perlindu-ngan dan pengelolaan lingkungan serta keselamatan pertam-bangan f. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **Perpanjangan Izin Pertambangan Rakyat**					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1. Orang Perorangan a. surat permohonan b. peta dan batas koordinat wilayah c. bukti pelunasan iuran pertam-bangan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) dan e. rencana penambangan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							selama perpanjangan 2. Koperasi a. surat permohonan b. Peta dan batas koordinat wilayah c. bukti pelunasan iuran pertam-bangan rakyat produksi 3 (tiga) tahun terakhir d. laporan kegiatan (kegiatan tambang, pengelolaan lingkungan) e. rencana penambangan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							selama perpanjangan dan f. Susunan pengurus **IUPK Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian** 1. Surat Permohonan 2. Nomor Induk Berusaha 3. Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat badan usaha dari pemegang KK 4. Rencana pengembangan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							seluruh wilayah yang telah disetujui yang memuat paling sedikit peta dan batas koordinat wilayah 5. Neraca Sumber Daya dan Cadangan 6. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang Kegiatan Operasi Produksi yang berada dalam WIUPK atau di luar WIUPK 7. Persetujuan dokumen lingkungan hidup yang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 8. Dokumen rencana Reklamasi dan rencana Pasca tambang 9. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik 10. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							11. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan **Perpanjangan IUPK sebagai Kelanjutan Kontrak/ Perjanjian** 1. Surat Permohonan 2. Peta dan batas koordinat wilayah 3. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4. Laporan akhir Kegiatan Operasi Produksi 5. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan 6. RKAB 7. Neraca Sumber Daya dan Cadangan					
57	09900	Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin (IUJP)	A. Persyaratan Administratif: 1. Surat Permohonan 2. Akta pendirian badan usaha dan perubahannya yang telah menda-	1. Pengajuan IUJP baru: 14 Hari 2. Pengajuan perubahan dan	1. Menyusun dan menyampaikan Laporan Kegiatan kepada Menteri melalui Direktur	- Izin Penetapan Badan Usaha untuk kegiatan Jasa Peledakan ter-	1. IUJP yang proyeknya lintas provinsi 2. IUJP dalam rangka penanaman modal	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							patkan pengesahan dari instansi yang berwenang 3. Mencantumkan maksud dan tujuan di dalam akta pendirian yang menyatakan antara lain: - Bergerak di bidang usaha jasa pertambangan, Kode KBLI 09900, dapat digabung dengan konstruksi, penyewaaan alat/mesin dll	perpanjangan IUJP: 12 Hari	Jenderal atau Gubernur sesuai kewenangannya 2. Wajib mengutamakan penggunaan kontraktor lokal dan tenaga kerja local 3. Melaksanakan kaidah pertambangan yang baik dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 4. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai	masuk juga kegiatan Produksi di lapangan - Izin Usaha Pergudangan Bahan Baku Bahan Peledak dan Bahan Peledak Aksesoris	asing	
											IUJP yang proyeknya dalam 1 provinsi	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							- Tidak dapat digabung dengan: a) Pertam-bangan mineral/batu bara, Kode KBLI: 05xxx, 07xxx, 08xxx b) Perdagangan mineral/ batubara, Kode KBLI: 46610, 46620, 46634, 46641" 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha 5. Daftar susunan		dengan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							direksi dan komisaris atau pengurus yang dilengkapi dengan identitas dan NPWP/Tax ID 6. Daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (*beneficial ownership*) yang dilengkapi jumlah/ persentase saham dan NPWP/Tax ID dan 7. Surat					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pernyataan tertulis di atas materai dan distempel basah (cap perusahaan asli) yang menyatakan bahwa seluruh keterangan yang dilampirkan pada surat permohonan adalah benar B. Persyaratan Teknis: 1. Daftar Tenaga Ahli, dalam bentuk tabel yang meliputi: a. Nama tenaga ahli b. Keahlian					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi atau sertifikat pelatihan c. Kartu tanda penduduk (ktp)/izin mempekerja-kan tenaga kerja asing (imta) d. Ijazah e. *Curriculum vitae* (cv) dan f. Surat pernyataan tenaga ahli yang ditandata-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ngani oleh tenaga ahli yang bersangkutan di atas materai, yang menyatakan bahwa tenaga ahli yang bersangkutan adalah benar sebagai tenaga ahli pada badan usaha pemohon IUJP 2. Daftar peralatan, dalam bentuk tabel yang meliputi: a. Jenis					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Jumlah c. Kondisi kelayakan penggunaan yang dinyatakan dalam persentase dan untuk peralatan angkat, gali, muat dan angkut melampirkan surat pernyataan kelayakan (*mechanical availability*) yang ditandatangani oleh kepala					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bagian mekanik/ permesinan atau orang yang ber-kompeten d. Lokasi ke-beradaan alat e. Status ke-pemilikan: i. Untuk peralatan dengan status sewa, salinan dokumen perjanjian sewa per-alatan harus dilampir-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kan ii. Apabila belum mempunyai peralatan baik milik sendiri maupun sewa, harus melampirkan surat perjanjian kerjasama *(mou)* atau surat dukungan dengan perusahaan yang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							memiliki peralatan iii. Melampirkan surat pernyataan yang ditanda-tangani oleh Direksi diatas materai apabila status kepemilikan peralatan adalah milik badan usaha pe-					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.D.852

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							mohon C. Kelengkapan tambahan persyaratan untuk permohonan IUJP Perpanjangan dan/atau IUJP Perubahan: 1. Bukti penyampaian laporan kegiatan triwulanan kepada Kepala Teknik Tambang atau instansi pemberi izin dan 2. Salinan dokumen IUJP sebelumnya					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.D.853

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							D. Persyaratan Khusus Usaha Tidak memiliki izin lain di bidang pertambangan Mineral dan Batubara antara lain: 1. Izin Usaha Pertambangan (IUP) 2. Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) 3. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian 4. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							5. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan 6. Izin Pengangkutan dan Penjualan					
58	35203	Pengadaan Gas Bio	Kelompok ini mencakup usaha pengolahan bahan bakar gas yang dapat dimanfaatkan secara langsung sebagai bahan bakar yang dihasilkan	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Sumber perolehan Bahan Baku 2. Surat Pernyataan tertulis di atas meterai terkait kesanggupan badan usaha: a. Menyediakan Bahan Bakar Biogas secara berkelanjutan b. Memenuhi aspek ke-	15 Hari	**A. Kewajiban Untuk Seluruh Pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Bahan Bakar Biogas Sebagai Bahan Bakar Lain** 1. Memenuhi dan Mematuhi peraturan	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			dari produk sampingan pertanian, perkebunan, peternakan, atau sampah/ limbah dimana pembuatannya disertai usaha peningkatan mutu gas, seperti pemurnian, pencampuran dan proses lainnya				selamatan dan Kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup c. Memenuhi kewajiban Badan Usaha d. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan e. Dilakukan peninjauan lapangan oleh Direktorat Jenderal EBTKE dan f. Menjamin dokumen persyaratan		perundangan-undangan 2. Memiliki perizinan berusaha untuk kegiatan usaha bahan bakar biogas sebagai bahan bakar lain 3. Menjamin ketersediaan bahan bakar biogas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri 4. Menjamin harga jual bahan bakar biogas yang wajar			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan keterangan/ pernyataan yang diberikan adalah benar adanya dan apabila di kemudian hari terbukti tidak benar akan dicabut izin usaha-nya sesuai dengan peraturan perundang-undangan 3. Studi Kelayakan/ *Feasibility Study* 4. Analisis kelayakan usaha / informasi		5. Memiliki dan/atau menguasai fasilitas dan sarana kegiatan usaha bahan bakar biogas sebagai bahan bakar lain yang meliputi fasilitas penyediaan, pendistribusi-an, dan pemasaran 6. Menjamin dan bertanggung jawab atas penggunaan peralatan, keakuratan, dan sistem alat ukur yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kelayakan usaha yang memuat: a. Sumber pasokan dan calon konsumen b. Lokasi kegiatan usaha beserta data teknis sarana dan fasilitas beserta data titik koordinat c. Komponen TKDN d. Skema usaha dan rencana pengem-bangan usaha e. Penggunaan tenaga kerja		memenuhi standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 7. Menjamin standar dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Biogas sebagai bahan bakar lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 8. Menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							asing dan tenaga kerja lokal f. Dokumen analisis keuangan meliputi rincian biaya investasi, harga beli BBBg, komponen dan besaran harga jual BBBg, serta per-hitungan kelayakan usaha 5. Data Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Biogas (BBBg)		hidup serta pengembang-an masyarakat setempat 9. Melaporkan pelaksanaan kegiatan usaha Pengadaan Gas Bio kepada Menteri melalui Direktur Jenderal EBTKE setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan 10. Melaporkan dan/atau me-			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang akan diniagakan 6. Berita acara pemeriksaan oleh petugas dari Direktorat Jenderal EBTKE Apabila belum dimiliki, agar Pelaku Usaha mengunggah surat pernyataan resmi kop perusahaan bahwa siap dilakukan verifikasi dalam rangka penerbitan Berita Acara Pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal EBTKE		nyampaikan permohonan penyesuaian terhadap Izin usaha apabila terdapat perubahan data administratif dan/atau teknis 11. Bersedia dilakukan inspeksi / peninjauan lapangan oleh petugas Direktorat Jenderal EBTKE sewaktu-waktu apabila diperlukan 12. Memenuhi perizinan yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							7. Dokumen Penerima Manfaat (*Beneficial Ownership*)		ditetapkan oleh Instansi terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan **B. Kewajiban Khusus Untuk Pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Bahan Bakar Biogas Sebagai Bahan Bakar Lain Yang Melaksanakan Pembangunan Fasilitas Dan Sarana**			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									1. Menggunakan barang dan peralatan yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menggunakan kaidah keteknikan yang baik 3. Mengutamakan pemanfaatan barang, peralatan, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bangun dalam negeri 4. Mengutamakan penggunaan tenaga kerja warga negara Indonesia dengan memperhatikan pemanfaatan tenaga kerja setempat sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan 5. Menjamin keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									6. Membantu pengembangan masyarakat setempat **C. Kewajiban Bagi Pelaku Usaha yang melakukan Kegiatan usaha niaga ekspor dan/atau impor bahan bakar biogas sebagai bahan bakar lain:** 1. Mendapatkan rekomendasi dan/atau evaluasi, sebagai salah satu kelengkapan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									persyaratan penetapan neraca komoditas oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan 2. Rekomendasi dan/atau evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan : a. Dengan mem-perhatikan kapasitas produksi dan jaminan pemenuh-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									an kebutuhan bahan bakar biogas sebagai bahan bakar lain b. 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun pelaksanaan ekspor dan/atau impor dan c. Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya permohonan rekomendasi dan/atau			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									evaluasi ekspor dan/atau impor dari Pelaku Usaha 3. Melaporkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral mengenai pelaksanaan ekspor dan/atau impor **D. Ketentuan Lain Bagi Pelaku Usaha**			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.D.867

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									1. Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha bahan bakar biogas sebagai bahan bakar lain dapat meniagakan bahan bakar biogas sebagai bahan bakar lain kepada konsumen akhir (skala besar) dan/atau distributor 2. Terhadap bahan bakar biogas sebagai			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bahan bakar lain yang dicampur dengan bahan bakar gas melalui jaringan pipa gas, hanya dapat diniagakan oleh pemegang izin usaha niaga bahan bakar gas			
59	20115	Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil	Kelompok ini mencakup usaha niaga Bahan Bakar Nabati/ BBN	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Sumber perolehan bahan baku/Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) yang diusahakan 2. Data Standar dan Mutu	10 Hari	**A. Kewajiban Untuk Seluruh Pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Bahan**	- Rekomendasi Pengguna Gas Bumi Tertentu	Kapasitas penyediaan di atas 10.000 ton per tahun	Menteri/ Kepala Badan
											Kapasitas penyediaan di bawah	Gubernur

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Pertanian	(*biofuels*) yang meliputi pengolahan, pembelian, penjualan, ekspor dan/atau impor, pengangkutan, penyimpanan, serta pemasaran BBN, dengan produk *biofuel* cair yang dapat berupa *biodiesel, bioethanol, biohidrokarbon*				(spesifikasi) Bahan Bakar Nabati (Biofuel) yang akan diniagakan 3. Nama dan merek dagang Bahan Bakar Nabati (Biofuel) 4. Informasi Kelayakan Usaha 5. Surat pernyataan tertulis di atas meterai mengenai kemampuan penyediaan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) 6. Surat Pernyataan secara tertulis di		**Bakar Nabati (*Biofuel*)** 1. Menjamin ketersediaan bahan bakar nabati (*biofuel*) untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri secara berkesinambungan 2. Memiliki perizinan berusaha untuk kegiatan usaha niaga bahan bakar nabati (*biofuel*) 3. Menjamin standar dan mutu	- Surat Pendaftaran Bahan Berbahaya - Izin Pendirian Pabrik Badan Usaha Bahan Peledak - Izin Produksi Badan Usaha Bahan Peledak - Izin Pemasaran	10.000 ton per tahun	

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			(minyak diesel nabati, minyak bensin nabati, minyak avtur/*jet fuel nabati*) dan bahan nabati lainnya yang diperuntukan untuk bahan bakar cair				atas meterai mengenai kesanggupan untuk memenuhi aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup 7. Surat pernyataan tertulis di atas meterai mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan 8. Surat pernyataan		(spesifikasi) bahan bakar nabati (*biofuel*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 4. Memanfaatkan dan mengutamakan bahan bakar nabati (*biofuel*) dari produksi dalam negeri 5. Menjamin dan bertanggung jawab sampai ke tingkat penyalur/ konsumen akhir atas	Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan - Izin Usaha Penelitian dan Pengembangan Bahan Baku Bahan Peledak dan Bahan Peledak Aksesoris		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tertulis di atas meterai mengenai kesediaan dilakukan inspeksi lapangan oleh Direktorat Jenderal 9. Dokumen Daftar Penerima Manfaat (*Beneficial Ownership*)		standar dan mutu bahan bakar nabati (*biofuel*) yang diniagakan sesuai standar dan mutu/ spesifikasi yang ditetapkan 6. Menjamin penyediaan fasilitas dan sarana kegiatan usaha niaga bahan bakar nabati (*biofuel*) yang memadai. 7. Menjamin dan bertanggung jawab atas penggunaan	- Izin Usaha Perdagangan Bahan Baku Bahan Peledak dan Bahan - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olaha - Sertifikat Persetujuan Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peralatan, keakuratan, dan sistem alat ukur yang digunakan yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 8. Mempunyai dan menggunakan nama dan merek dagang tertentu bahan bakar nabati (*biofuel*). 9. Mengutamakan peme-	- Pendaftaran Pestisida - Izin Edar Pangan Olahan - Izin Variasi Akun Perusahaan - Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Promosi Pangan Olahan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									nuhan kebutuhan dalam negeri 10. Menyampaikan data dan laporan mengenai pelaksanaan kegiatan usaha niaga bahan bakar nabati (*biofuel*) termasuk harga BBN kepada Menteri melalui Dirjen EBTKE setiap bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan	- Izin Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Bertahap Sarana Produksi UMK Pangan Olahan Risiko Tinggi - Izin Penerapan Program Manajemen		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									11. Menggunakan barang dan peralatan yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 12. Menggunakan kaidah keteknikan yang baik 13. Mengutamakan pemanfaatan barang, peralatan jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang	Risiko (PMR) Sarana Produksi Pangan Olahan - Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinik Pangan Olahan - Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bangun dalam negeri 14. Mengutamakan penggunaan tenaga kerja warga negara Indonesia dengan memperhatikan pemanfaatan tenaga kerja setempat sesuai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan 15. Menjamin keselamatan dan Kesehatan kerja serta lingkungan hidup	- Pertimbangan Teknis Pembebasan Bea Masuk Dalam Rangka Penelitian Dan Pengembangan - Surat Persetujuan Penilaian TKDN Penggunaan Mesin Pro-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									16. Membantu pengembangan Masyarakat setempat 17. Memenuhi persyaratan keberlanjutan dalam penyediaan dan pemanfaatan BBN sesuai dengan peraturan perundang-undangan **B. Kewajiban Khusus Untuk Pemegang Perizinan Berusaha**	duksi Dalam Negeri - Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Untuk Kegiatan Usaha Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) Yang Melaksana-kan Pemba-ngunan Fasilitas Dan Sarana 1. Menggunakan barang dan peralatan yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menggunakan kaidah			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									keteknikan yang baik 3. Mengutamakan pemanfaatan barang, peralatan, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri 4. Mengutamakan penggunaan tenaga kerja warga negara Indonesia dengan memperhatikan pemanfaatan tenaga kerja			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									setempat sesuai dengan standar kompetensi yang diper-syaratkan 5. Menjamin keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan hidup 6. Membantu pengem-bangan masyarakat setempat **C. Kewajiban Bagi Pelaku Usaha yang melakukan Kegiatan usaha niaga**			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									ekspor dan/atau impor bahan bakar nabati (*biofuel*) 1. Mendapatkan rekomendasi dan/atau evaluasi, sebagai salah satu kelengkapan persyaratan penetapan neraca komoditas oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									2. Rekomendasi dan/atau evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan: a. Dengan memenuhi dokumen persyarat-an berupa: 1) SK Izin Usaha Niaga BBN yang masih berlaku 2) *Certifi-cate of Analy-sis* produk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang akan di-lakukan ekspor/ impor 3) *Benefi-cial Owner-ship* dan 4) Surat Perse-tujuan Ekspor dari Ke-menter-ian Perda-gangan periode sebe-lumnya (untuk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang pernah melaksanakan ekspor) b. Dengan memperhatikan kapasitas produksi dan jaminan pemenuhan kebutuhan bahan bakar nabati (*biofuel*) di dalam negeri c. 1 (satu) kali untuk			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									1 (satu) tahun pelaksanaan ekspor dan/atau impor dan d. Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya permohonan rekomendasi dan/atau evaluasi ekspor dan/atau impor dari Pelaku Usaha 3. Melaporkan kepada			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral mengenai pelaksanaan ekspor dan/atau impor **D. Ketentuan Lain Bagi Pelaku Usaha** 1. Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha bahan bakar nabati (*biofuel*) dapat meniagakan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									bahan bakar nabati (*biofuel*) kepada konsumen akhir 2. Terhadap bahan bakar nabati (*biofuel*) yang dicampur dengan bahan bakar minyak hanya dapat diniagakan oleh badan usaha pemegang izin usaha niaga bahan bakar minyak			
60	06202	Pengusa-haan Tenaga	1. Tahap Survei	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Tinggi	NIB dan Izin (Izin Panas Bumi)	1. Salinan surat penetapan pemenang lelang atau surat	14 Hari	1. Memberikan dukungan terhadap kegiatan	- Persetu-juan Studi Kelaya-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Panas Bumi	2. Tahap Eksplo-rasi 3. Tahap Eksploitasi dan/ atau Pemanfaatan	- Besar			penugasan pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung 2. Bukti pemenuhan kewajiban pemenang lelang: a. Pembayaran kompensasi harga dasar data dan/atau harga data dan informasi panas bumi b. Penempatan komitmen eksplorasi bagi pemenang lelang sesuai ketentuan		penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi panas bumi 2. Melakukan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi kegiatan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan fungsi lingkungan hidup 3. Memberikan	kan / *Feasibility Study* (FS) Proyek PLTP - Persetujuan gudang bahan peledak panas bumi - Penyimpanan Mineral Ikutan radioaktif sebagai Penunjang		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perundangan		dukungan terhadap kegiatan penciptaan, pengembangan kompetensi, dan pembinaan sumber daya manusia di bidang panas bumi 4. Menyampaikan laporan tertulis pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung kepada Menteri secara berkala atas:	Kegiatan Utama		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									a. Rencana kerja dan rencana anggaran dan b. Realisasi pelaksana-an rencana kerja dan rencana anggaran 5. Memenuhi kewajiban berupa pendapatan negara dan pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Mengutama-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kan pemanfaatan barang, jasa, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing 7. Melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat 8. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dengan mem-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya 9. Memahami dan menaati peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan memenuhi standar yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									berlaku 10. Mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia 11. Mendorong pengembangan pemanfaatan Langsung panas Bumi pada Wilayah Kerjanya 12. Melaksanakan Eksplorasi, Eksploitasi, dan pemanfaatan sesuai dengan kaidah teknis yang baik dan benar 13. Menyampai-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kan rencana jangka panjang eksplorasi, eksploitasi, dan pemanfa-atan kepada Menteri yang mencakup rencana kegiatan dan rencana anggaran serta me-nyampaikan besarnya cadangan			
61	49300	Angku-tan Melalui Saluran Pipa	Kegiatan Usaha Pengang-kutan Minyak dan Gas	- Kecil - Meneng ah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	**A. Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa** 1. Persyaratan administratif Izin	15 Hari	1. Menjamin dan bertanggung jawab atas penggunaan instalasi peralatan dan	Persetu-juan Layak Operasi Instalasi Minyak	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Bumi Melalui Pipa				Usaha Sementara/ Izin Usaha/ Perpanjangan/ Penyesuaian Izin Usaha: a. Surat Permohonan b. Daftar Penerima Manfaat (*Beneficial Ownership*) c. Identitas dan Surat Kuasa Narahubung d. Surat Pernyataan tertulis diatas materai mengenai: 1) Kesang-gupan Badan Usaha		keakuratan sistem alat ukur yang digunakan yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menjamin mutu produk atau komoditas sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal 3. Menjamin keselamatan dan kesehatan	dan Gas Bumi		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							memenuhi aspek keselamatan, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup 2) Kesanggupan memenuhi kewajiban Badan Usaha 3) Kesanggupan Badan Usaha memenuhi ketentuan		kerja, pengelolaan ligkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat 4. Melaksanakan penugasan Menteri dalam rangka penyediaan cadangan Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas Nasional 5. Melaporkan dan/atau menyampaikan permohonan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peraturan perundang-undangan 4) Kesediaan dilakukan audit kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan 5) Kesanggupan Badan Usaha menjamin dan bertanggung jawab		penyesuaian Izin apabila terdapat perubahan data administratif dan teknis kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi 6. Melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai kegiatannya setiap 1 (satu) bulan sekali			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bahwa sarana dan fasilitas yang dimiliki/ dikuasai layak beroperasi dan mampu dijalankan sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik selama masa operasi 6) Badan Usaha bebas dari konflik		atau sewaktu - waktu apabila diperlukan 7. Memenuhi perizinan yang ditetapkan oleh Instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 8. Melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam Izin Usaha 9. Menjamin keselamatan instalasi dan peralatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							atau permasalahan hukum lainnya dengan pihak lain 7) Dokumen persyaratan dan keterangan/ pernyataan yang diberikan adalah benar adanya dan apabila dikemudian hari terbukti tidak		sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							benar akan dicabut izin usahanya sesuai dengan peraturan perun-dangun-dangan 2. Persyaratan teknis Izin Usaha Sementara/ Perpanjangan Izin Usaha Sementara / Penyesuaian Izin Usaha Sementara a. Studi Kelayakan b. Surat Penetapan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Pemenang Lelang Ruas Transmisi /WJD oleh BPH Migas (jika ada) c. Dokumen Penunjukan pem-bangunan dan/atau surat penugasan dari Pemerintah atas ruas pada wilayah (Kepmen) atas ruas pipa transmisi pada suatu wilayah (jika ada) d. Hak Khusus dari Badan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Pengatur Hilir Migas e. Kesepakatan awal pengang-kutan gas bumi dengan calon shipper (dapat berupa HoA/MoU / *Gas Transport Agreement* (GTA)) f. Rencana pemanfaatan atau pembangu-nan sarana dan fasilitas Pengangku-tan Gas Bumi, yang meliputi antara lain teknologi yang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							digunakan, jalur, dimensi, kapasitas, right of way pipa serta sarana dan fasilitas selain pipa dan data titik koordinat berupa Data *Geo-reference Standard* Datum WGS84 g. SK Izin Usaha Sementara awal untuk permohonan perpan-jangan Izin Usaha Sementara (apabila ada)					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							h. Jaminan kecukupan pendanaan, yang dibuktikan dengan : 1) Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir 2) Dokumen kesepaka-tan dengan pihak lain untuk nominal tertentu atau 3) Surat ketera-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ngan dari bank umum yang berkedu-dukan di Indonesia, yang menerang-kan bahwa Badan Usaha memiliki kemam-puan penda-naan dengan nominal tertentu					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3. Persyaratan teknis Izin Usaha/Perpanjangan/Penyesuaian Izin Usaha: a. Studi Kelayakan b. Berita Acara Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan terkait Fasilitas dan/atau Sarana yang ditandatangani oleh Petugas Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas/ PLO/ COI yang masih					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berlaku/ sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan c. Dokumen Perjanjian antara transporter dengan shipper/ *Gas Transport Agreement* (GTA) d. Bukti kepemilikan pipa Dalam hal pembangunan pipa dilakukan melalui APBN maka persyaratan kepemilikan dapat diganti					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dengan dokumen surat penugasan untuk pembangunan dan/atau pengoperasian pipa dimaksud dan/atau kontrak kerjasama penunjukan mitra dari Badan Usaha atau lembaga yang mendapat penugasan, Berita Acara Serah Terima Barang Negara e. Surat Penetapan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Pemenang Lelang Ruas Transmisi /WJD oleh BPH Migas (jika ada) f. Dokumen Penunjukan pembangu-nan dan/ atau surat penugasan dari Peme-rintah atas ruas pada wilayah (Kepmen) (jika ada) g. Hak Khusus dari Badan Pengatur Hilir Migas **B. Kegiatan Usaha Pengangkutan Minyak**					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.D.909

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Bumi/BBM/ Hasil Olahan Melalui Pipa 1. Persyaratan Administratif a. Surat Permohonan b. Daftar Penerima Manfaat (*Beneficial Ownership*) c. Identitas dan Surat Kuasa Narahubung d. Surat Pernyataan tertulis diatas materai mengenai: 1) Kesanggupan Badan Usaha					

SK No 112398 C

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							memenuhi aspek keselamatan, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup 2) Kesanggupan memenuhi kewajiban Badan Usaha 3) Kesanggupan Badan Usaha memenuhi ketentuan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peraturan perundang-undangan 4) Kesediaan dilakukan audit kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan 5) Kesanggupan Badan Usaha menjamin dan bertanggung jawab bahwa					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sarana dan fasilitas yang dimiliki/ dikuasai layak beroperasi dan mampu dijalankan sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik selama masa operasi 6) Badan Usaha bebas dari konflik atau perma-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							salahan hukum lainnya dengan pihak lain 7) Dokumen persya-ratan dan ketera-ngan/ pernyata-an yang diberikan adalah benar adanya dan apabila dike-mudian hari terbukti tidak benar akan dicabut					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Izin Usahanya sesuai dengan peraturan per-undang-undangan 2. Persyaratan Teknis (Izin Usaha Sementara) a. Studi Kelayakan b. Kesepakatan awal (MoU atau HoA) atas pengangkutan Minyak Bumi/BBM/ Hasil Olahan c. Rencana pemanfaatan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							atau pembangunan sarana dan fasilitas Pengangkutan Minyak Bumi/BBM/ Hasil Olahan, yang meliputi antara lain dimensi (panjang, diameter, kapasitas), jenis komoditas yang diangkut, dan data titik koordinat berupa Data *Geo-reference Standard*					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Datum WGS84 d. SK Izin Usaha Sementara dan/atau Izin Usaha/ Penyesuaian/ Perpanjangan (apabila ada) e. Jaminan kecukupan pendanaan, yang dibuktikan dengan: 1) Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang sudah diaudit					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2) Dokumen kesepakatan dengan pihak lain untuk pendanaan (mencantumkan nominal tertentu) atau 3) Surat keterangan dari bank umum yang berkedudukan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							di Indonesia, yang menerangkan bahwa Badan Usaha memiliki kemampuan pendanaan dengan nominal tertentu 3. Persyaratan Teknis (Izin Usaha/ Perpanjangan/ Penyesuaian) a. Studi Kelayakan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau Persetujuan Pemerintah/ instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku atau pengelola kawasan yang berwenang mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana c. Pemanfaatan atau pemba-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ngunan sarana dan fasilitas Pengang-kutan Minyak Bumi/ BBM/Hasil Olahan yang meliputi antara lain dimensi (panjang, diameter, kapasitas), jenis komoditas yang diangkut, dan data titik koordinat berupa Data *Geo-reference Standard*					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.D.921

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Datum WGS84 d. Persetujuan Lingkungan e. Berita Acara Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan terkait Fasilitas dan/atau Sarana yang ditandata-ngani oleh Petugas Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas/ PLO yang masih berlaku/ sesuai ketentuan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							peraturan perundang-undangan f. Dokumen Perjanjian antara *transporter* dengan *shipper* g. SK Izin Usaha Sementara dan/atau Izin Usaha/ Penyesuaian/Perpanjangan (apabila ada)					
			Kegiatan Usaha Pengangkutan Karbon melalui Pipa	- Besar	Tinggi	NIB dan Izin (Izin Transportasi Karbon Melalui Pipa)	1 Persyaratan administratif berupa Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*)	15 Hari	1. Menjamin dan bertanggung jawab atas penggunaan instalasi dan peralatan	Persetujuan Layak Operasi Instalasi Minyak	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							2 Persyaratan teknis: a. Studi Kelayakan b. Kesepakatan peng-angkutan Karbon, untuk pengang-kutan Karbon selain Karbon milik sendiri c. Berita Acara Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan yang ditanda-tangani oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi		serta keakuratan sistem alat ukur yang digunakan yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menjamin mutu produk atau komoditas sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi	dan Gas Bumi		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		3. Menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, serta pengelolaan lingkungan hidup 4. Melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai kegiatannya setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan 5. Menyediakan asuransi yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									minimal meliputi perlindungan atas kerusakan fasilitas, pekerja, kerusakan lingkungan, pembong-karan akibat kecelakaan dengan *coverage* yang wajar berdasarkan paparan risiko dan biaya 6. Mengutama-kan peman-faatan barang dan jasa yang diproduksi di Indonesia			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.D.926

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									7. Melaksanakan kewajiban penanganan kebocoran dalam transportasi Karbon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 8. Melaporkan dan/atau menyampaikan permohonan penyesuaian izin apabila terdapat perubahan data dan teknis 9. Mematuhi ketentuan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peraturan perundang-undangan			
62	52104	Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi	Seluruh	- Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin	**A. Kegiatan Usaha Penyimpanan LPG/LNG/CNG dan/atau Penyimpanan LPG dengan fasilitas *bottling plant* (SPBE)** 1. Persyaratan administratif Izin Usaha Sementara/ Izin Usaha/ Perpanjangan/ Penyesuaian Izin Usaha: a. Surat Permohonan	15 Hari	1. Menjamin dan bertanggung jawab atas penggunaan peralatan, keakuratan, dan sistem alat ukur yang digunakan yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Menjamin mutu produk	- Persetujuan Layak Operasi Instalasi Minyak dan Gas Bumi - Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif sebagai Penun-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Daftar Penerima Manfaat (*Benefecial Ownership*) c. Surat pernyataan tertulis diatas materai mengenai: 1) Kesanggupan Badan Usaha memenuhi aspek keselamatan, kesehatan kerja dan pengelolaan ling-		atau komoditas sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal 3. Menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat 4. Melaksanakan penugasan Menteri dalam rangka penyediaan	jang Kegiatan Utama		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kungan hidup 2) Kesanggupan memenuhi kewajiban Badan Usaha 3) Kesanggupan Badan Usaha memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan 4) Kesediaan di-		cadangan Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas Nasional 5. Melaporkan dan/atau menyampaikan permohonan penyesuaian Izin Usaha apabila terdapat perubahan data administratif dan teknis 6. Melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Minyak dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lakukan audit kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan 5) Kesanggupan Badan Usaha menjamin dan bertanggung jawab bahwa sarana dan fasilitas		Gas Bumi mengenai kegiatan usahanya setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan 7. Memenuhi perizinan yang ditetapkan oleh Instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 8. Melaksanakan kewajiban yang tercantum			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang dimiliki/ dikuasai layak beroperasi dan mampu dijalankan sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik selama masa operasi 6) Badan Usaha bebas dari konflik atau		dalam Izin Usaha 9. Menjamin keselamatan instalasi dan peralatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							permasalahan hukum lainnya dengan pihak lain 7) Dokumen persyaratan dan keterangan/ pernyataan yang diberikan adalah benar adanya dan apabila dikemudian hari					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							terbukti tidak benar akan dicabut izin usahanya sesuai dengan peraturan perun-dang-undangan 2. Persyaratan teknis Izin Usaha Sementara/ Perpanjangan Izin Usaha Sementara / Penyesuaian Izin					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Usaha Sementara Penyimpanan Minyak dan Gas Bumi: a. Studi Kelayakan b. Kesepakatan awal dengan calon pengguna fasilitas penyim-panan c. SK Izin Usaha Sementara awal untuk permohonan perpan-jangan IU Sementara (apabila ada)					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Jaminan kecukupan pendanaan, yang dibuktikan dengan: 1) Laporan keuang-an 3 (tiga) tahun terakhir atau 2) Dokumen kesepaka-tan dengan pihak lain untuk nominal tertentu atau					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.D.936

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							3) Surat keterangan dari bank umum yang berkedudukan di Indonesia, yang menerangkan bahwa Badan Usaha memiliki kemampuan pendanaan dengan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							nominal tertentu 3. Persyaratan teknis Izin Usaha Tetap/ Perpanjangan/ Penyesuaian: a. Studi Kelayakan b. *BA commi-sioning* atau BA hasil pe-meriksaan keselamatan instalasi dan peralatan yang ditan-datangani oleh Petugas Direktorat Teknik dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Lingkungan Migas atau Persetujuan Layak Operasi (PLO) c. Gross Akta Kapal (jika Milik Sendiri) atau Surat Perjanjian Sewa (jika Sewa) untuk fasilitas penyim-panan di perairan d. Dokumen Kontrak perjanjian penyim-panan dengan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengguna fasilitas penyim-panan LNG/LPG/ CNG (sesuai komoditas yang akan disimpan) e. Bukti kepemilikan /penguasaan / kontrak sewa menyewa sarana dan fasilitas Untuk moda angkutan darat berupa stnk/bpkb Untuk moda					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							angkutan/ penyimpa-nan laut berupa gross akta kapal Untuk fasilitas berupa tangki, pipa dokumen kepemilikan berupa Surat pernyataan dari Direktur B. Kegiatan Usaha Penyimpanan Minyak Bumi/BBM/ Hasil Olahan 1. Persyaratan Administratif					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Surat Permohonan b. Daftar Penerima Manfaat (Beneficial Ownership) c. Identitas dan Surat Kuasa Narahubung d. Surat Pernyataan tertulis diatas materai mengenai: 1) Kesanggupan Badan Usaha memenuhi aspek keselamatan, ke-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup 2) Kesanggupan memenuhi kewajiban Badan Usaha 3) Kesanggupan Badan Usaha memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan 4) Kesediaan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dilakukan audit kepatu-han ter-hadap ke-tentuan peraturan perun-dang-unda-ngan 5) Kesang-gupan Badan Usaha menjamin dan ber-tanggung jawab bahwa sarana dan fasilitas yang di-miliki/ di-kuasai layak ber-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							operasi dan mampu dijalan-kan sesuai dengan kaidah ketek-nikan yang baik selama masa operasi 6) Badan Usaha bebas dari konflik atau perma-salahan hukum lainnya dengan pihak lain 7) Dokumen persya-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ratan dan keterang-an/ pernya-taan yang diberikan adalah benar adanya dan apabila dike-mudian hari ter-bukti tidak benar akan dicabut Izin Usahanya sesuai dengan peraturan per-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							undang-undangan 2. Persyaratan Teknis (Izin Usaha Sementara) a. Studi Kelayakan b. Kesepakatan awal (MoU atau HoA) dengan calon pengguna fasilitas penyim-panan c. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau Persetujuan Pemerintah/ instansi yang berwenang sesuai					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ketentuan yang berlaku atau pengelola kawasan yang berwenang mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana d. Surat Persetujuan Penggunaan Permukaan Perairan untuk Lokasi Penyimpanan (penetapan Titik Koordinat) dari instansi yang berwenang,					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							untuk fasilitas penyim-panan di perairan e. SK Izin Usaha Sementara dan/atau Izın Usaha/ Penyesuai-an/Per-panjangan (apabila ada) f. Jaminan kecukupan pendanaan, yang dibuktikan dengan: 1) Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sudah diaudit 2) Dokumen kesepakatan dengan pihak lain untuk pendanaan (mencantumkan nominal tertentu) atau 3) Surat keterangan dari bank umum yang berkedudukan di Indonesia, yang mene-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							rangkan bahwa Badan Usaha memiliki kemam-puan pen-danaan dengan nominal tertentu 3. Persyaratan Teknis (Izin Usaha/ Per-panjangan/ Penyesuaian) a. Studi Kelayakan b. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau Persetujuan Pemerintah/ instansi yang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berwenang sesuai ketentuan yang berlaku atau pengelola kawasan yang berwenang mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana c. Persetujuan Lingkungan d. Berita Acara Pemeriksaan Keselamat-an Instalasi dan Peralatan terkait Fasilitas dan/atau Sarana yang ditandatangani oleh					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Petugas Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas / PLO yang masih berlaku/ sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan C. Gross Akta Kapal atau Surat Perjanjian Sewa dan Gross Akta pemilik kapal (jika Sewa) untuk fasilitas penyimpanan berupa floating storage					
63	35201	Pengadaan Gas Alam	Kegiatan Usaha Pengola-	- Mikro - Kecil	Tinggi	NIB dan Izin	1. Administrasi (Izin Usaha Sementara/	15 Hari	1. **Izin Usaha**: a. Menjamin dan ber-	- Persetujuan Layak	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		dan Buatan	han Minyak dan Gas Bumi untuk Komoditas Gas Bumi	- Menengah - Besar			Tetap/Perpanjangan/ Penyesuaian) a. Surat Permohonan b. Daftar Penerima Manfaat c. Surat pernyataan tertulis diatas materai mengenai kesanggupan Badan Usaha 2. Teknis (Izin Usaha Sementara) a. Studi Kelayakan b. Kesepakatan Jual Beli Gas Bumi atau Kesepakatan Kerja Sama Pengolahan		tanggung jawab atas penggunaan peralatan, keakuratan, dan sistem alat ukur yang digunakan yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan b. Menjamin mutu produk atau komoditas	Operasi Instalasi Minyak dan Gas Bumi - Penyimpanan Mineral Ikutan Radioaktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Gas Bumi dengan KKKS atau Badan Usaha Minyak dan Gas Bumi yang memiliki Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku c. Kesepakatan awal dengan pengguna akhir atau Badan Usaha Minyak dan Gas Bumi yang memiliki Izin Usaha sesuai peraturan perundang-		sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal c. Menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							undangan yang berlaku d. Jaminan kecukupan pendanaan, yang dibuktikan dengan: 1) Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir 2) Dokumen kesepakatan dengan pihak lain untuk nominal tertentu atau 3) Surat keterangan dari bank umum		d. Melaksanakan penugasan Menteri dalam rangka penyediaan cadangan bahan bakar binyak dan bahan bakar gas nasional e. Melaporkan dan/atau menyampaikan permohonan penyesuaian Izin			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang berkedudukan di Indonesia, yang menerangkan bahwa Badan Usaha memiliki kemampuan pendanaan dengan nominal tertentu e. Rencana pemanfaatan atau pembangunan sarana dan fasilitas Pengolahan Gas Bumi		Usaha apabila terdapat perubahan data administratif dan teknis f. Melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai kegiatan usahanya setiap 1 (satu) bulan sekali atau			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang meliputi antara lain teknologi yang digunakan, dimensi, kapasitas, serta sarana dan fasilitas dan data titik koordinat berupa *Data Geo-reference Standard Datum* WGS84 f. SK Izin Usaha Sementara awal untuk permohonan perpanjangan Izin Usaha Sementara (apabila ada) 3. Teknis (Izin Usaha Tetap/		sewaktu-waktu apabila diperlukan g. Memenuhi perizinan yang ditetapkan oleh instansi terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan h. Melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam Izin Usaha			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perpanjangan/ penyesuaian) a. Studi Kelayakan b. Dokumen pasokan berupa Penetapan alokasi gas bumi dari Menteri atau Perjanjian jual beli Gas Bumi (PJBG/ GSA) dengan Badan Usaha Niaga Minyak Gas Bumi atau Dokumen kerja Sama Pengolahan gas bumi c. Dokumen kontrak jual beli dengan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengguna akhir atau Badan Usaha Niaga Gas Bumi/ LNG / LPG d. *BA commisioning* atau BA hasil pemeriksaan keselamatan instalasi dan peralatan yang ditanda-tangani oleh Petugas Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas atau Persetujuan Layak Operasi (PLO) e. Badan Usaha yang me-lakukan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kegiatan usaha pengolahan yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau hasil olahan dapat memiliki laboratorium uji terakreditasi untuk melakukan pengujian terhadap mutu hasil olahan sesuai standar dan mutu yang ditetapkan Menteri atau dokumen					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kerja sama dengan Laboratorium *independent* yang terakreditasi f. Bukti kepemilikan/ penguasaan atau kontrak sewa menyewa sarana dan fasilitas g. SK Izin Usaha Sementara dan/atau Izin Usaha/ Penyesuaian/ Perpanjangannya (apabila ada)					
64	19211	Industri Bahan Bakar	Seluruh	Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Persyaratan Administratif a. Surat Permohonan	15 Hari	1. Menjamin mutu produk atau	- Persetujuan Layak	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Dari Pemurnian Dan Pengilangan Minyak Bumi				(Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi dengan Jenis Kegiatan Pengolahan Minyak Bumi)	b. Daftar Penerima Manfaat (*Beneficial Ownership*) c. Identitas dan Surat Kuasa Narahubung d. Surat Pernyataan tertulis diatas materai mengenai: 1) Kesanggupan Badan Usaha memenuhi aspek keselamatan, kesehatan kerja		komoditas sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal 2. Menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup, serta pengembangan masyarakat setempat 3. Melaksanakan penunjukkan Menteri dalam rangka penyediaan cadangan Bahan Bakar	Operasi Instalasi Minyak dan Gas Bumi - Penyimpanan mineral ikutan radioaktif sebagai penunjang kegiatan utama		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan pengelolaan lingkungan hidup 2) Kesanggupan memenuhi kewajiban Badan Usaha 3) Kesanggupan Badan Usaha memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan		Minyak dan Bahan Bakar Gas Nasional 4. Melaporkan dan/atau menyampaikan permohonan penyesuaian Izin Usaha apabila terdapat perubahan data administratif dan teknis 5. Melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4) Ketersediaan dilakukan audit kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan 5) Kesanggupan Badan Usaha menjamin dan bertanggung jawab bahwa sarana dan		mengenai kegiatan usahanya setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan 6. Memenuhi perizinan yang ditetapkan oleh instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 7. Melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam Izin Usaha			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							fasilitas yang dimiliki/ dikuasai layak beroperasi dan mampu dijalankan sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik selama masa operasi 6) Badan Usaha bebas dari konflik atau perma-		8. Menjamin dan bertanggung jawab atas penggunaan peralatan, keakuratan, dan sistem alat ukur yang digunakan yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 9. Memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kewajiban lainnya yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							salahan hukum lainnya dengan pihak lain 7) Dokumen persya-ratan dan keterang-an/ pernya-taan yang diberikan adalah benar adanya dan apabila dike-mudian hari terbukti tidak benar		ditetapkan oleh instansi yang berwenang 10. Memenuhi aspek keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan, serta pengem-bangan masyarakat setempat 11. Bersedia dilakukan inspeksi lapangan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi berkenaan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							akan dicabut Izin Usahanya sesuai dengan peraturan perun-dang-undangan 8) Kesang-gupan Badan Usaha menerima penunju-kan dan penuga-san dari Menteri untuk meng-hasilkan dan/ atau		pelaksanaan Izin Usaha Sementara 12. Melaporkan pelaksanaan Izin Usaha Sementara Pengolahan Minyak dan Gas Bumi secara berkala setiap 1 (satu) bulan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi 13. Menjamin keselamatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							mengu-sahakan jenis BBM untuk peme-nuhan cadangan BBM Nasi-onal 2. Persyaratan Teknis (Izin Usaha Sementara) a. Studi Kelayakan b. Kesepakatan awal (MoU/HoA/Perjanjian Jual Beli) dengan calon pemasok bahan baku		instalasi dan peralatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.D.969

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Minyak Bumi dan/atau dokumen lain yang mengindikasikan tersedianya pasokan dengan calon pemasok yang difasilitasi oleh SKK Migas c. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau Persetujuan Pemerintah/ instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku atau pengelola					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kawasan yang berwenang mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana d. SK Izin Usaha Sementara/ Perpanjangan (apabila ada) e. Jaminan kecukupan pendanaan, yang dibuktikan dengan: 1) Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sudah diaudit 2) Dokumen kesepakatan dengan pihak lain untuk pendanaan (mencantumkan nominal tertentu) atau 3) Surat keterangan dari bank umum yang berkedudukan					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.D.972

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							di Indonesia, yang menerangkan bahwa Badan Usaha memiliki kemampuan pendanaan dengan nominal tertentu 3. Persyaratan Teknis (Izin Usaha/ Perpanjangan/ Penyesuaian) a. Studi Kelayakan					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.D.973

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							b. Persetujuan Lingkungan c. Berita Acara Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan terkait Fasilitas dan/atau Sarana yang ditanda-tangani oleh Petugas Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas/PLO yang masih berlaku/ sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							d. Kontrak Perjanjian Pasokan Bahan Baku Minyak Bumi paling sedikit memuat sumber, volume, jangka waktu kesepakatan, dan waktu dimulainya pasokan e. Memiliki laboratorium uji terakreditasi untuk melakukan pengujian terhadap mutu produk yang dihasilkan sesuai					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							standar dan mutu yang ditetapkan Menteri f. SK Izin Usaha Sementara dan/atau Izin Usaha/ Penyesuaian/ Perpanjangan (apabila ada) g. Dokumen hasil uji laboratorium atas seluruh parameter sesuai standar dan mutu (spesifikasi) yang ditetapkan Pemerintah					
65	19214	Industri Peng-	Seluruh	Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Persyaratan Administratif	15 Hari	1. Izin Usaha:	Perse-tujuan	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		olahan Minyak Pelumas Bekas Menjadi Bahan Bakar				(Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi dengan Jenis Kegiatan Pengolahan Minyak Bumi)	a. Surat Permohonan b. Daftar Penerima Manfaat (*Beneficial Ownership*) c. Identitas dan Surat Kuasa Narahubung d. Surat Pernyataan tertulis diatas materai mengenai: 1) Kesanggupan Badan Usaha memenuhi aspek keselamatan,		a. Menjamin dan bertanggung jawab atas penggunaan peralatan, keakuratan, dan sistem alat ukur yang digunakan yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan b. Menjamin mutu	Layak Operasi Instalasi Minyak dan Gas Bumi		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup 2) Kesanggupan memenuhi kewajiban Badan Usaha 3) Kesanggupan Badan Usaha memenuhi ketentuan peraturan perun-		produk atau komoditas sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal c. Menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dang-undangan 4) Kese-diaan di-lakukan audit kepatu-han ter-hadap keten-tuan per-aturan perun-dang-undangan 5) Kesang-gupan Badan Usaha menja-min dan ber-tanggung jawab bahwa		d. Melaksa-nakan pen-ugasan Menteri dalam rangka pe-nyediaan cadangan bahan bakar binyak dan bahan bakar gas nasional e. Melapor-kan dan/atau menyam-paikan permohon-an penye-suaian Izin Usaha apabila			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sarana dan fasilitas yang dimiliki/ dikuasai layak beroperasi dan mampu dijalankan sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik selama masa operasi 6) Badan Usaha bebas dari konflik		terdapat perubahan data administratif dan teknis f. Melaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai kegiatan usahanya setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							atau permasalahan hukum lainnya dengan pihak lain 7) Dokumen persyaratan dan keterangan/ pernyataan yang diberikan adalah benar adanya dan apabila dikemudian hari terbukti tidak		apabila diperlukan g. Memenuhi perizinan yang ditetapkan oleh instansi terkait sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan h. Melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam Izin Usaha			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							benar akan dicabut Izin Usahanya sesuai dengan peraturan perun-dang-undangan 8) Kesang-gupan Badan Usaha menerima penunju-kan dan penuga-san dari Menteri untuk meng-hasilkan		i. Menjamin keselamat-an insta-lasi dan peralatan sesuai ketentuan peraturan perun-dang-undangan 2. Izin Usaha Sementara: a. Memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kewajiban lainnya yang di-tetapkan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan/ atau mengu-sahakan jenis BBM untuk peme-nuhan cadang-an BBM Nasi-onal 2. Persyaratan Teknis (Izin Usaha Sementara) a. Studi Kelayakan b. Kesepakatan awal (MoU/HoA/Perjanjian Jual Beli) dengan calon pemasok		oleh instansi yang ber-wenang b. Memenuhi aspek keselamat-an dan ke-sehatan kerja dan pengelola-an ling-kungan, serta pe-ngembang-an masya-rakat setempat c. Bersedia dilakukan inspeksi lapangan oleh Direktorat			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bahan baku Minyak Bumi dan/atau dokumen lain yang mengindikasikan tersedianya pasokan dengan calon pemasok yang difasilitasi oleh SKK Migas c. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau Persetujuan Pemerintah/ instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku atau		Jenderal Minyak dan Gas Bumi berkenaan pelaksanaan Izin Usaha Sementara 3. Melaporkan pelaksanaan Izin Usaha Sementaran Pengolahan Minyak dan Gas Bumi secara berkala setiap 1 (satu) bulan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							pengelola kawasan yang berwenang mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana d. SK Izin Usaha Sementara/ Perpanjangan (apabila ada) e. Jaminan kecukupan pendanaan, yang dibuktikan dengan: 1) Laporan keuangan 3 (tiga) tahun		melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							terakhir yang sudah diaudit 2) Dokumen kesepakatan dengan pihak lain untuk pendanaan (mencantumkan nominal tertentu) atau 3) Surat keterangan dari bank umum yang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							berkedudukan di Indonesia, yang menerangkan bahwa Badan Usaha memiliki kemampuan pendanaan dengan nominal tertentu 3. Persyaratan Teknis (Izin Usaha/ Perpanjangan/ Penyesuaian)					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							a. Studi Kelayakan b. Persetujuan Lingkungan c. Berita Acara Pemeriksaan Keselamatan Instalasi dan Peralatan terkait Fasilitas dan/atau Sarana yang ditanda-tanganı oleh Petugas Direktorat Teknik dan Lingkungan Migas/PLO yang masih berlaku/ sesuai ketentuan peraturan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							perundang-undangan d. Kontrak Perjanjian Pasokan Bahan Baku Minyak Bumi paling sedikit memuat sumber, volume, jangka waktu kesepakatan, dan waktu dimulainya pasokan e. Memiliki laboratorium uji ter-akreditasi untuk melakukan pengujian terhadap mutu produk yang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dihasilkan sesuai standar dan mutu yang ditetapkan Menteri f. SK Izin Usaha Sementara dan/atau Izin Usaha/ Penyesuaian/ Perpanjangan (apabila ada) g. Dokumen hasil uji laboratorium atas seluruh parameter sesuai standar dan mutu (spesifikasi) yang ditetapkan Pemerintah					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							h. Spesifikasi dan hasil uji laboratorium produk yang dihasilkan (untuk produk bahan bakar dengan spesifikasi tertentu yang berbeda dengan standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah)					
66	35202	Distribusi Gas Alam Dan Buatan	Seluruh	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Tinggi	NIB dan Izin (Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi	1. Administrasi (Sementara/ Tetap/ Perpanjangan/ Penyesuaian) a. Surat Permohonan	15 Hari	1. Menjamin ketersediaan komoditas yang diniagakan secara berkesinam-	Persetujuan Layak Operasi Instalasi Minyak dan Gas	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
						untuk jenis kegiatan Niaga Gas Bumi melalui Pipa dan Niaga Gas Bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi)	b. Daftar Penerima Manfaat/ *Beneficial Ownership* c. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atau Persetujuan Pemerintah/ instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku atau pengelola kawasan yang berwenang mengenai lokasi untuk pembangu-nan fasilitas		bungan pada jaringan distribusi niaganya 2. Menjamin harga jual komoditas yang diniagakan sesuai yang diatur dan/atau ditetapkan oleh Menteri 3. Menjamin dan bertanggung-jawab atas standar dan mutu (spesifikasi) komoditas yang diniagakan sampai ke	Bumi		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan sarana Dalam hal fasilitas berupa floating Storage diperlukan Surat Persetujuan Penggunaan Permukaan Perairan untuk Lokasi Penyimpanan (penetapan Titik Koordinat) dari instansi yang berwenang d. Pernyataan tertulis di atas materai mengenai:		konsumen akhir sesuai dengan ketentuan peraturan 4. Menjamin dan bertanggung jawab atas penggunaan peralatan, keakuratan dan sistem alat ukur yang digunakan yang memenuhi standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 5. Menjamin keselamatan dan kesehatan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							1) Kesanggupan memenuhi aspek keselamatan, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup 2) Kesanggupan memenuhi kewajiban badan usaha 3) Kesediaan dilakukan audit kepatuhan terhadap ke-		kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat 6. Bersedia dilakukan inspeksi oleh petugas Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan 7. Memenuhi perizinan yang ditetapkan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							tentuan peraturan perun-dang-undangan 4) Kesang-gupan badan usaha menjamin dan ber-tang-gung jawab bahwa sarana dan fasilitas yang di-miliki/ di-kuasai layak beroper-asi dan mampu dijalan-kan sesuai		oleh instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 8. Melakukan penyesuaian terhadap Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi apabila terjadi perubahan dan/atau penambahan terhadap: a. Sarana dan fasilitas maupun lokasi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dengan kaidah keteknikan yang baik selama masa operasi 5) Badan usaha bebas dari konflik atau permasalahan hukum lainnya dengan pihak lain 6) Dokumen persyaratan dan keterangan/ pernyataan yang		kegiatan usaha atau b. Jenis komoditas dan/atau merek-dagang 9. Menyampaikan laporan kepada Menteri energi dan sumber daya mineral melalui direktur jenderal minyak dan gas bumi mengenai pelaksanaan kegiatan usaha niaganya dan/atau			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							diberikan adalah benar adanya dan apabila dike-mudian hari ter-bukti tidak benar akan dicabut izin usahanya sesuai dengan per-aturan perun-dang-undangan 7) Kesang-gupan menerima penunju-		terdapat perubahan terhadap data administrasi 10. Memenuhi dan mematuhi peraturan perundang-undangan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							kan dan penugasan dari Menteri untuk melaksanakan penyimpanan dalam rangka penyediaan cadangan penyangga energi dan pemenuhan kebutuhan minyak bumi di dalam negeri pada fasilitas dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sarana penyimpanan miliknya (untuk kegiatan usaha niaga minyak bumi) 8) Kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri untuk melaksanakan penyimpanan dalam rangka penye-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							diaan cadangan penya-ngga energi dan peme-nuhan kebu-tuhan bahan bakar minyak di dalam negeri pada fasilitas dan sarana penyim-panan miliknya (untuk ke-giatan usaha niaga bahan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bakar minyak) 9) Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan badan usaha menerima penugasan dari Menteri untuk pemanfaatan secara bersama dengan pihak lain atas fasilitas yang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dimiliki (untuk kegiatan usaha niaga gas bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi) 10) Kesanggupan badan usaha menerima penugasan dari Menteri untuk pemanfaatan secara bersama dengan pihak lain atas fa-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							silitas penyimpanan dan/ atau pengangkutan LPG yang dimiliki dan/ atau dikuasai termasuk penyalurnya secara bersama dengan pihak lain (untuk kegiatan usaha niaga LPG) dan/ atau dikuasai termasuk penyalurnya secara					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							bersama dengan pihak lain (untuk kegiatan usaha niaga LPG) 2 Teknis (Izin Usaha Sementara) a. Analisis kelayakan b. Kesepakatan jual beli Gas Bumi/ LNG/CNG dengan pemasok yang telah memiliki perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							c. Kesepakatan jual beli Gas Bumi dengan konsumen yang telah memiliki perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan d. Kesepakatan pengangkutan gas bumi dengan Badan Usaha yang telah mendapat Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi dan/atau Hak Khusus					

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.D.1005

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi, (jika ada) e. Salinan surat permohonan kepada Menteri mengenai usulan Pengem-bangan Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi untuk rencana pipa Gas Bumi yang akan dibangun pada wilayah					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							yang belum ditetapkan sebagai Wilayah Jaringan Distribusi ke dalam Rencana Induk Gas Bumi Nasional beserta tanda terima f. Rencana pemanfaatan atau pembangu-nan sarana dan fasilitas Niaga Gas Bumi, yang meliputi antara lain teknologi yang digunakan,					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							jalur, dimensi, kapasitas, right of way pipa serta sarana dan fasilitas selain pipa dan data titik koordinat berupa Data *Geo-reference Standard* Datum WGS84 g. Terhadap Pemegang Hak Khusus Wilayah Jaringan Distribusi, salinan dokumen penetapan pemenang lelang Hak					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							Khusus Wilayah Jaringan Distribusi dari Badan Pengatur/ salinan dokumen penugasan Menteri untuk membangun dan mengoperasikan Wilayah Jaringan Distribusi dan/atau Wilayah Niaga Tertentu h. Jaminan kecukupan pendanaan, yang					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dibuktikan dengan: 1) Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir 2) Dokumen kesepakatan dengan pihak lain untuk nominal tertentu atau 3) Surat keterangan dari bank umum yang berkedudukan di Indone-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sia, yang menerangkan bahwa Badan Usaha memiliki kemampuan pendanaan dengan nominal tertentu (minimal 70% dari total nilai investasi) 4) SK Izin Usaha Sementara awal untuk permohonan perpanja-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							ngan IU Sementara (apabila ada) 3 Teknis (Izin Usaha Tetap/ perpanjanga/ penyesuaian) a. Analisis kelayakan usaha paling sedikit memuat: 1) Sumber pasokan dan calon konsumen 2) Neraca gas bumi 3) Spesifikasi gas bumi					



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.D.1012

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							4) Lokasi kegiatan usaha beserta data teknis sarana dan fasilitas beserta data titik koordinat berupa data *georefe-rence stan-dard* datum wgs84 (tamba-han baru belum ada di aplika-si) 5) Skema usaha dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							rencana pengembangan usaha 6) Penggunaan tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal 7) Capaian tkdn dan 8) Harga beli gas bumi, komponen dan besaran harga jual gas bumi b. Dokumen pasokan berupa Penetapan alokasi gas bumi/LNG					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dari Menteri atau kontrak jual beli LNG/CNG dengan pemasok yang bukan kontraktor kontrak kerja sama hulu migas atau kontrak jual beli dengan BU Niaga gas bumi dengan skema interruptible sesuai ketentuan yang berlaku c. Kontrak jual beli Gas Bumi dengan konsumen akhir atau BU Pengo-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							lahan LNG atau BU niaga CNG atau BU niaga BBG atau BU niaga gas bumi dengan skema interruptible sesuai ketentuan yang berlaku d. Perjanjian pengangkutan gas bumi dengan badan usaha yang telah mendapat izin Usaha Pengangkutan dan/atau hak khusus ruas transmisi					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dan/atau wilayah jaringan distribusi, jika ada e. Salinan surat permohonan kepada Menteri mengenai usulan pengem-bangan jaringan transmisi dan/atau distribusi gas bumi untuk rencana pipa gas bumi yang telah dibangun pada wilayah yang belum ditetapkan sebagai					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							wilayah jaringan distribusi ke dalam rencana induk gas bumi nasional beserta tanda terima f. Berita Acara Pemeriksaan Keselamatan Insta-lasi dan Peralatan terkait Fasilitas dan/atau Sarana yang ditandata-ngani oleh Petugas Direktorat Teknik dan Lingkung-an Migas/ PLO /					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							COI yang masih berlaku/ sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan g. Terhadap pemegang hak khusus wilayah jaringan distribusi, salinan dokumen penetapan pemenang lelang hak khusus wilayah jaringan distribusi dari badan pengatur/ salinan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							dokumen penugasan Menteri untuk membangun dan mengoperasikan wilayah jaringan distribusi dan/atau wilayah niaga tertentu h. Bukti kepemilikan/ penguasan atau kontrak sewa menyewa sarana dan fasilitas niaga i. SK Izin Usaha Sementara dan/atau Izin Usaha/ Penye-					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							suaian/ Perpan-jangannya (apabila ada)					
67	06100	Pertam-bangan Minyak Bumi	Kegiatan Survei Seismik 2D/3D/ Lainnya Minyak Bumi yang dilakukan secara tidak menetap kurang dari 30 hari, Kegiatan Eksplorasi Minyak Bumi, Kegiatan Eksploitasi Minyak	Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Keputusan Menteri mengenai Penetapan Kontraktor Kontrak Kerja Sama atau Keputusan Menteri mengenai Persetujuan Perpanjangan/ Alih Kelola/ Pengelolaan Bersama 2. Salinan Kontrak Kerja Sama 3. Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*)	30 Hari	BU/ BUT wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan ketentuan Kontrak Kerja Sama	- Perse-tujuan Layak Operasi Instala-si Minyak dan Gas Bumi - Perse-tujuan Gudang Bahan Peledak Minyak dan Gas Bumi	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Bumi, Kegiatan Penang-kapan, Penyim-panan, Peman-faatan Karbon di Wilayah Kerja Migas				4. Salinan Jaminan Pelaksanaan			- Perse-tujuan Penga-lihan Nilai Sisa Komit-men Pasti ke Wilayah Terbu-ka - Pe-nyimpa nan Mineral Ikutan Radio-aktif sebagai penun-jang kegia-		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										tan utama		
68	39000	Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya	Kegiatan Usaha Eksplorasi zona target injeksi Karbon di Formasi Geologi (Wilayah Izin Penyimpanan Karbon)	Besar	Tinggi	NIB dan Izin (Izin Eksplorasi Zona Target Injeksi Karbon)	1. Pemilik Manfaat *(Beneficial Ownership)* 2. Keputusan Menteri mengenai Pemenang Lelang atau Seleksi Terbatas 3. Salinan jaminan pelaksanaan komitmen pasti Eksplorasi Zona Target Injeksi 4. Surat keterangan fiskal untuk Badan Usaha yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	20 Hari	1 Menyampaikan rencana kerja dan anggaran pelaksanaan komitmen pasti Eksplorasi ZTI serta menyusun analisis manajemen risikonya 2. Membuat perjanjian dengan Kontraktor yang memuat prinsip-prinsip kesepakatan (*mutually agreed*	- Persetujuan Layak Operasi Instalasi Minyak dan Gas Bumi - Persetujuan Gudang Bahan Peledak Minyak dan Gas Bumi	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan		*principles*), dalam hal Wilayah Izin Penyimpanan Karbon bertampalan (*overlay*) dengan Wilayah Kerja 3. Melaksanakan komitmen pasti Eksplorasi ZTI 4. Melaksanakan kegiatan Eksplorasi ZTI sesuai rencana kerja yang telah disetujui 5. Menyampaikan laporan tertulis atas pelaksanaan kegiatan Eksplorasi ZTI			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Menyediakan jaminan pelaksanaan komitmen pasti Eksplorasi ZTI 7. Melaksanakan kewajiban penyerahan data Eksplorasi ZTI yang diperoleh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 8. Menjamin mutu data yang dihasil-kan dari			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Kegiatan Eksplorasi ZTI 9. Melaksanakan kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak kepada Pemerintah dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 10. Menyampaikan permohonan persetujuan Rencana Pengembangan dan Operasi ZTI dalam hal akan melanjutkan ke			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									tahap kegiatan operasi penyimpanan Karbon 11. Menyertakan sertifikasi kapasitas penyimpanan Karbon dalam permohonan persetujuan Rencana Pengembangan dan Operasi ZTI 12. Menjamin dan bertanggung jawab atas penggunaan instalasi dan peralatan serta keakuratan sistem alat ukur yang digunakan yang meme-			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									nuhi standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 13. Mengutama-kan peman-faatan barang dan jasa yang diproduksi di Indonesia 14. Menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, serta pengelolaan lingkungan hidup 15. Menyediakan sistem tanggap darurat untuk menghadapi kondisi berbahaya			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									yang berpotensi mengancam keselamatan pekerja, keselamatan instalasi dan peralatan, keselamatan lingkungan, dan/atau keselamatan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 16. Menyediakan asuransi yang minimal meliputi perlindungan atas kerusakan fasilitas, pekerja,			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									kerusakan lingkungan, pembongkaran akibat kecelakaan dengan *coverage* yang wajar berdasarkan paparan risiko dan biaya 17. Memastikan bahwa sub kontraktor yang terlibat dalam aktivitas juga menyediakan asuransi untuk pekerjanya 18. Melaksanakan kewajiban pasca operasi Kegiatan Eksplorasi ZTI			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									19. Melaporkan dan/atau menyampaikan permohonan penyesuaian izin apabila terdapat perubahan data administratif dan teknis 20. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan			
			Kegiatan Usaha Operasi Penyimpanan Karbon di Formasi Geologi (Wilayah	Besar	Tinggi	NIB dan Izin (Izin Operasi Penyimpanan Karbon)	1. Pemilik manfaat *(beneficial ownership)* 2. Peta usulan wilayah izin penyimpanan karbon yang dilengkapi	20 Hari	1. Menyampaikan rencana kerja dan anggaran pelaksanaan operasi Penyimpanan Karbon yang paling sedikit	- Persetujuan Gudang Bahan Peledak Minyak dan	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Izin Penyimpanan Karbon)				dengan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional 3. Persetujuan rencana pengembangan dan operasi (*plan for development and operation*) 4. Salinan jaminan pelaksanaan operasi penyimpanan karbon 5. Surat pernyataan kesediaan membayar		meliputi kegiatan pengadaan, konstruksi, *commissioning*, injeksi, pemeliharaan, monitoring, MRV dan penutupan serta menyusun analisis manajemen risikonya 2. Melaksanakan Kegiatan Operasi penyimpanan karbon sesuai Rencana Pengembangan dan Operasi ZTI dan rencana kerja	Gas Bumi - Persetujuan Layak Operasi Instalasi Minyak dan Gas Bumi		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
							komitmen sumur injeksi yang tidak dilaksanakan 6. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.		yang telah disetujui 3. Melaksanakan kegiatan pengadaan, konstruksi, *commissioning*, injeksi, pemeliharaan, monitoring, MRV dan penutupan sesuai standar kaidah keteknikan yang baik 4. Menyampaikan laporan tertulis atas pelaksanaan Rencana Kerja Izin Operasi sesuai ketentuan peraturan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									perundang-undangan 5. Melaksanakan kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak (royalti) dan penerimaan negara bukan pajak lainnya kepada Pemerintah dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 6. Menyediakan jaminan pelaksanaan operasi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Penyimpanan Karbon 7. Menyerahkan data hasil kegiatan Izin Operasi Penyimpanan Karbon yang diperoleh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 8. Menjamin dan bertanggung jawab atas penggunaan instalasi dan peralatan serta keakuratan sistem alat ukur yang digunakan yang			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 9. Menjamin mutu produk atau komoditas sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah 10. Mengutamakan pemanfaatan barang dan jasa yang diproduksi di Indonesia 11. Menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, serta			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									pengelolaan lingkungan hidup 12. Menangani kebocoran pada saat operasi penyimpanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 13. Menyediakan sistem tanggap darurat untuk menghadapi kondisi ber-bahaya yang berpotensi mengancam keselamatan pekerja, keselamatan instalasi dan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									peralatan, keselamatan lingkungan, dan/atau keselamatan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 14. Menyediakan asuransi yang minimal meliputi perlindungan atas kerusakan fasilitas, pekerja, kerusakan lingkungan, pembongkar-an akibat kecelakaan dengan			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									coverage yang wajar berdasarkan paparan risiko dan biaya 15. Memastikan bahwa sub kontraktor yang terlibat dalam aktivitas juga menyediakan asuransi untuk pekerjanya 16. Menyediakan jaminan pasca operasi 17. Melaksanakan pengembalian Wilayah Izin Penyimpanan Karbon dan kegiatan pasca operasi			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									18. Melaporkan dan/atau menyampaikan permohonan penyesuaian izin apabila terdapat perubahan data administratif dan teknis 19. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan			
69	06201	Pertambangan Gas Alam	Kegiatan Survei Seismik 2D/3D/ Lainnya Gas Bumi yang dilakukan	Besar	Tinggi	NIB dan Izin	1. Keputusan Menteri mengenai Penetapan Kontraktor Kontrak Kerja Sama atau Keputusan	30 Hari	BU/ BUT wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan ketentuan	- Persetujuan Layak Operasi Instalasi Minyak	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			secara tidak menetap kurang dari 30 hari, Kegiatan Eksplorasi Gas Bumi, Kegiatan Eksploitasi Gas Bumi, Kegiatan Penangkapan, Penyimpanan, Pemanfaatan Karbon di Wilayah Kerja Migas				Menteri mengenai Persetujuan Perpanjangan/Alih Kelola/ Pengelolaan Bersama 2. Salinan Kontrak Kerja Sama 3. Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) 4. Salinan Jaminan Pelaksanaan		Kontrak Kerja Sama	dan Gas Bumi - Persetujuan Gudang Bahan Peledak Minyak dan Gas Bumi - Persetujuan Pengalihan Nilai Sisa Komitmen Pasti ke Wilayah Terbuka - Penyimpanan		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
										Mineral Ikutan Radio-aktif sebagai Penunjang Kegiatan Utama		
70	09100	Aktivitas Penunjang Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Alam	Kegiatan usaha jasa penunjang pertambangan minyak dan gas bumi yang dilakukan atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak Kegiatan	- Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	1. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) untuk perusahaan yang telah berdiri minimal 1 tahun 2. Laporan keuangan tahun terakhir untuk perusahaan yang telah berdiri minimal 1 tahun	15 Hari	Wajib mengikuti standar internasional, Standar Nasional Indonesia, dan standar lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	- Persetujuan Layak Operasi Instalasi Minyak dan Gas Bumi - Penanda dan/-atau	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			ini mencakup jasa penunjang eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi yang berkaitan dengan kegiatan pemboran/ *drilling*, pemboran inti/*coring*, pemboran berarah/ *directional drilling*, pemboran *unconventional* UBD & MPD,				3. Akta perusahaan yang mencantumkan maksud dan tujuan sesuai ruang lingkup KBLI 09100 4. Surat Pernyataan diatas meterai mengenai komitmen kemampuan/kapasitas produk/jasa meliputi: a. Daftar Peralatan b. Daftar Tenaga kerja c. Daftar Pengalaman perusahaan (kecuali			Perunut Menggunakan Zat Radioaktif		

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			pekerjaan ulang sumur/ *workover*, perawatan sumur/ *well service*, penyemenan sumur/ *cementing*, pelayanan *mud logging*, rekayasa lumpur pemboran, pelayanan *electrical logging* dan perforasi sumur, penanganan *casing* dan				untuk perusahaan baru) dan pengalaman personil 5. Analisis manajemen risiko keselamatan Minyak dan Gas Bumi 6. Surat Pernyataan diatas meterai mengenai: a. Kesanggupan Badan Usaha terhadap pemenuhan: 1) Aspek keselamatan, kesehatan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			tubing, pengujian kandungan lapisan/ *drill stem testing*, pelayanan *slickline* dan penyelesaian sumur/ *well completion*, stimulasi sumur/ *well stimulation* serta perekahan hidrolik dan *coil tubing*, *fishing*, perawatan				kerja dan pengelolaan perlindungan lingkungan hidup 2) Ketentuan peraturan perundang-undangan b. Badan Usaha bebas dari konflik atau permasalahan hukum lainnya dengan pihak lain c. Kebenaran atas dokumen persyaratan dan					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			alat produksi sampai kepala sumur, *monitoring* sumur minyak dan gas, pengelola-an limbah di area pemboran, penangan-an gas beracun, pelayanan *top drive*, pelayanan MWD dan LWD, penutupan sumur dan pekerjaan				keterangan/per nyataan yang disampaikan Badan Usaha					

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			pasca operasi pemboran, penanganan semburan liar, serta data *acquisition, processing, interpretation, operation,* dan *technical analysis*									
71	47301	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG),	Sarana Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Transportasi Darat, Laut, dan Udara	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Memiliki kontrak perjanjian kerjasama dengan Badan Usaha Niaga Migas	5 Hari	1. Berbentuk Koperasi, usaha kecil dan/atau Badan Usaha Swasta Nasional 2. Hanya dapat menerima penunjukan	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara	(SPBU dengan skema CODO/ DODO, SPBN, SPDN, dll) dengan kapasitas penyimpanan <20 Kilo Liter						dari 1 (satu) Badan Usaha Niaga Migas 3. Menggunakan logo dan merek dagang Badan Usaha Niaga Migas 4. Menyampaikan laporan kegiatan penyaluran kepada Badan Usaha Niaga Migas			
			Sarana Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Transpor-	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Memiliki kontrak perjanjian kerjasama dengan Badan Usaha Niaga Migas	5 Hari	1. Berbentuk Koperasi, usaha kecil dan/atau Badan Usaha Swasta Nasional	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			tasi Darat, Laut, dan Udara (SPBU dengan skema CODO/ DODO, SPBN, SPDN, dll) dengan kapasitas penyimpa-nan ≥ 20 Kilo Liter						2. Hanya dapat menerima penunjukan dari 1 (satu) Badan Usaha Niaga Migas 3. Mengguna-kan logo dan merek dagang Badan Usaha Niaga Migas 4. Menyampai-kan laporan kegiatan penyaluran kepada Badan Usaha Niaga Migas			
			Sarana Pengisian Bahan Bakar Gas	- Mikro - Kecil - Mene-ngah	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Memiliki kontrak perjanjian kerjasama dengan	5 Hari	1. Berbentuk Koperasi, usaha kecil dan/atau	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			untuk Transp-ortasi Darat, Laut, dan Udara (SPBG, SPBLGV, dll)	- Besar			Badan Usaha Niaga Migas		Badan Usaha Swasta Nasional 2. Hanya dapat menerima penunjukan dari 1 (satu) Badan Usaha Niaga Migas 3. Mengguna-kan logo dan merek dagang Badan Usaha Niaga Migas 4. Menyampai-kan laporan kegiatan penyaluran kepada Badan Usaha Niaga Migas			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
72	47302	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi	Penyalur/ Agen LPG Umum	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Memiliki kontrak perjanjian kerjasama dengan Badan Usaha Niaga Migas	5 Hari	1. Berbentuk Koperasi, usaha kecil dan/atau Badan Usaha Swasta Nasional 2. Hanya dapat menerima penunjukan dari 1 (satu) Badan Usaha Niaga Migas 3. Menggunakan logo dan merek dagang Badan Usaha Niaga Migas 4. Menyampaikan laporan kegiatan penyaluran kepada	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Darat, Laut, dan Udara							Badan Usaha Niaga Migas 5. Memiliki/ menguasai sarana pengangku-tan yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh kementerian terkait			
			Penyalur/ Agen LPG Tertentu (3 kg)	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Memiliki kontrak perjanjian kerjasama dengan Badan Usaha Penerima Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu	5 Hari	1. Berbentuk Koperasi, usaha kecil dan/atau Badan Usaha Swasta Nasional 2. Hanya dapat menerima penunjukan	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									dari 1 (satu) Badan Usaha Penerima Penugasan Penyediaan dan Pendis-tribusian LPG Tertentu 3. Menggunakan logo dan merek dagang Badan Usaha Penerima Penugasan Penyediaan dan Pendis-tribusian LPG Tertentu 4. Menyampaikan laporan kegiatan penyaluran kepada			

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I.D.1053

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Badan Usaha Penerima Penugasan Penyediaan dan Pendis-tribusian LPG Tertentu 5. Memiliki/ menguasai sarana pengangku-tan yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh kementerian terkait			

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			Penyalur/ Agen Bahan Bakar Minyak selain SPBU	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	Memiliki kontrak perjanjian kerjasama dengan Badan Usaha Niaga Migas	5 Hari	1. Berbentuk Koperasi, usaha kecil dan/atau Badan Usaha Swasta Nasional 2. Hanya dapat menerima penunjukan dari 1 (satu) Badan Usaha Niaga Migas 3. Menggunakan logo dan merek dagang Badan Usaha Niaga Migas 4. Menyampaikan laporan kegiatan penyaluran kepada	-	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									Badan Usaha Niaga Migas 5. Memiliki/ menguasai sarana pengangkutan yang memenuhi standar yang ditetapkan oleh kementerian terkait			
73	47772	Perdagangan Eceran Gas Elpiji	Pangkalan LPG Tertentu (3 Kg)	- Mikro - Kecil - Menengah - Besar	Menengah Rendah	NIB dan Sertifikat Standar	-	Otomatis	1. Memiliki perjanjian Kerjasama Pangkalan LPG Tertentu (3 Kg) dengan Penyalur (Agen) LPG Tertentu (3 Kg) yang	-	Hanya untuk pelaku usaha yang memiliki perjanjian Kerjasama Pangkalan LPG Tertentu (3 Kg) dengan Penyalur (Agen) LPG 3 Kg	Menteri/ Kepala Badan

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Ruang Lingkup	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	PB UMKU	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
									masih berlaku 2. Mematuhi standar kegiatan usaha untuk kegiatan Pangkalan LPG Tertentu (3 Kg)			
			Sub Pangkalan LPG Tertentu (3 Kg)	- Mikro - Kecil - Mene-ngah - Besar	Rendah	NIB	-	Otomatis	Memiliki surat penunjukan Sub Pangkalan LPG Tertentu (3 Kg) dari Pangkalan LPG (3 Kg) yang masih berlaku	-	Hanya untuk pelaku usaha yang memiliki surat penunjukan Sub Pangkalan LPG Tertentu (3 Kg) dengan Pangkalan LPG Tertentu (3 Kg)	Menteri/ Kepala Badan